



**LAPORAN  
AKUNTABILITAS KINERJA  
KABUPATEN  
SAROLANGUN TAHUN  
2019**





## Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2019 Kabupaten Sarolangun dengan visi “ **Sarolangun Lebih Sejahtera**” untuk pencapaian sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 ini adalah sebagai pertanggungjawaban atas Kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019 sebagai diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Yang merupakan wujud pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate. Hal ini sebagai perwujudan komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes dalam rangka penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif dan akuntabel.

Sejalan dengan focus pada peningkatan Akuntabilitas dan Capaian Kinerja, Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 memberikan informasi tentang Capaian Kinerja kegiatan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, serta hasil evaluasi Capaian Kinerja beserta permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam Tahun 2019 serta komitmen untuk meningkatkan kinerja pada masa-masa mendatang.



Perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan Kinerja dimasa mendatang. Kemudian dalam penyusunan LKJ Pemerintah Kabupaten Sarolangun tahun 2019 ini tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi oleh masing-masing SKPD, namun diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi hal-hal tersebut melalui pendekatan koordinasi serta asistensi dari berbagai nara sumber yang berkompeten. Mudah-mudahan LKJ Pemerintah Kabupaten Sarolangun dapat memberikan informasi untuk seluruh pihak yang berkepentingan dan menjadi parameter peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada tahun-tahun mendatang.

BUPATI SAROLANGUN  
  
CEK ENDRA





## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun tahun 2019 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022 dan Rencana Kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun tahun 2019 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2019. Dalam upaya merealisasikan *good governance*, Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2017-2022.

Berdasarkan hasil evaluasi sepanjang tahun 2019 terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sarolangun, masih terdapat satu sasaran yang belum memuaskan atau dalam kategori kurang. Adapun pencapaian sasaran secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 12 ( Dua belas ) Sasaran Strategis atau 57,14 % diperoleh pencapaian baik sekali yang berimplikasi terhadap pencapaian Visi, Misi serta Tujuan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- 9 ( Sembilan ) Sasaran Strategis atau 42,86 % diperoleh pencapaian baik yang berimplikasi terhadap pencapaian Visi, Misi serta Tujuan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.



Tabel Pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sarolangun tahun

2019 adalah sebagai berikut :

| NO  | SASARAN  | INDIKATOR   | RATA -<br>RATA<br>TINGKAT<br>CAPAIAN | KATEGORI    |
|-----|--|-------------|--------------------------------------|-------------|
| 1.  | Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan                               | 1 Indikator | 99,22                                | Baik        |
| 2.  | Terwujudnya Infrastruktur Listrik yang Memadai   | 1 Indikator | 101,4                                | Baik Sekali |
| 3.  | Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Irigasi dan Air Bersih                             | 2 Indikator | 82,76                                | Baik        |
| 4.  | Meningkatnya Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Lainnya     | 3 Indikator | 103,19                               | Baik Sekali |
| 5.  | Meningkatnya Kualitas Pendidikan   | 2 Indikator | 98,235                               | Baik        |
| 6.  | Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat   | 6 Indikator | 115,06                               | Baik Sekali |
| 7.  | Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Sesuai Kompetensi   | 2 Indikator | 95,97                                | Baik        |
| 8.  | Meningkatnya Pengamalan Nilai-nilai Agama dan Pengembangan Budaya Lokal Dalam Kehidupan Masyarakat | 1 Indikator | 128,15                               | Baik Sekali |
| 9.  | Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi  | 1 Indikator | 95,93                                | Baik        |
| 10. | Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah   | 1 Indikator | 87,88                                | Baik        |
| 11. | Menurunnya Angka Kemiskinan  | 1 Indikator | 95,70                                | Baik        |
| 12. | Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Daesa   | 1 Indikator | 102,49                               | Baik Sekali |
| 13. | Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Desa/Kelurahan  | 1 Indikator | 80,11                                | Baik        |
| 14. | Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Beragam Berbasis Sumber Daya Lokal                           | 1 Indikator | 121,45                               | Baik Sekali |



| NO  | SASARAN  | INDIKATOR   | RATA - RATA TINGKAT CAPAIAN | KATEGORI    |
|-----|--|-------------|-----------------------------|-------------|
| 15. | Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan   | 1 Indikator | 100                         | Baik Sekali |
| 16. | Mempertahankan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Terhadap Perubahan Iklim                | 1 Indikator | 100                         | Baik Sekali |
| 17. | Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Pemerintahan yang Baik                              | 2 Indikator | 100                         | Baik Sekali |
| 18. | Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas   | 1 Indikator | 113,16                      | Baik Sekali |
| 19. | Meningkatnya Jaminan Kapasitas Hukum dan Perlindungan Hukum                                  | 1 Indikator | 88,6                        | Baik        |
| 20. | Meningkatkan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Daerah dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak | 3 Indikator | 155,09                      | Baik Sekali |
| 21. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik   | 3 Indikator | 101,67                      | Baik Sekali |

Dari tabel diatas dapat kita lihat dari semua Sasaran capaian dan indikatornya sangat baik, adapun rata-rata capain kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada tahun 2019 adalah sebesar 98,59% Pencapaian kinerja input dan penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada tahun 2019 adalah sebesar 100, 16 % dari total pagu Anggaran atau sebesar Rp. 1.316.532.806.281.,59.-

Melalui Laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun tahun 2019 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis RPJMD Kabupaten Sarolangun tahun 2017-2022.



## DAFTAR ISI

|   | Halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR .....  | i       |
| DAFTAR ISI .....  | i       |
| RINGKASAN ESEKUTIF.....   | i       |
| BAB I PENDAHULUAN   |         |
| 1. Latar Belakang .....   | I - 1   |
| 1.1. Isu Strategis.....   | I - 3   |
| 1.2. Kondisi Kabupaten Sarolangun.....  | I - 3   |
| 1.2.1. Kondisi Geografis .....  | I - 4   |
| 1.2.2. Luas Wilayah Kabupaten Sarolangun .....  | I - 5   |
| 1.2.3. Demografis Kabupaten Sarolangun .....  | I - 6   |
| 1.2.4. Perekonomian Masyarakat .....  | I - 7   |
| 1.2.4.1. Usaha Tanaman Pangan .....   | I - 7   |
| 1.2.4.2. Perikanan dan Peternakan .....   | I - 9   |
| 1.2.4.3. Perkebunan.....  | I -11   |
| 1.2.4.4. Energi dan Industri.....   | I -11   |
| 1.2.4.4.1. Energi.....  | I -11   |
| 1.2.4.4.2. Industri .....   | I -13   |
| 1.2.4.5. Pariwisata .....   | I -13   |
| 1.3. Kewenangan dan Tugas Pokok Serta Struktur Organisasi.....                                  | I -16   |
| 1.3.1. Kewenangan dan Tugas Pokok .....   | I -16   |
| 1.3.2. Struktur Organisasi.....   | I -18   |
| 1.4. Inovasi Dalam Sistem Akip dan Pengelolaan Kinerja Pemerintah<br>Kabupaten Sarolangun ..... | I -20   |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA  |         |
| 2.1. Perencanaan.....   | II - 22 |
| 2.1.1. Visi dan Misi Kabupaten Sarolangun.....  | II - 25 |
| 2.1.1.1. Visi Kabupaten Sarolangun.....   | II - 25 |
| 2.1.1.2. Misi Kabupaten Sarolangun .....  | II - 26 |
| 2.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sarolangun .                                    | II - 30 |
| 2.1.2.1. Tujuan Pembangunan Kabupaten Sarolangun .....  | II - 30 |





2.1.2.2. Sasaran Pembangunan Kabupaten Sarolangun ..... II - 31

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 ..... II - 37

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

3.1. Capaian Kinerja Organisasi ..... III -42

3.1.1. Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik..... III -48

3.1.2. Rasio Desa Berlistrik ..... III -53

3.1.3. Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik ..... III -56

3.1.4. Akses Terhadap Air Minum Layak..... III -59

3.1.5. Rasio Ruang Kelas Terhadap Siswa SD ..... III -62

3.1.6. Rasio Ruang Kelas Terhadap Siswa SMP ..... III -63

3.1.7. Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk  
Per 30.000 Penduduk ..... III -64

3.1.8. Persentase SD Yang Terakreditasi..... III -67

3.1.9. Persentase SMP Yang Terakreditasi..... III -67

3.1.10. Angka Harapan Hidup ..... III -69

3.1.11. Angka Kematian Ibu (AKI) ..... III -70

3.1.12. Angka Kematian Bayi (AKB)..... III -72

3.1.13. Prevalensi Balita Gizi Buruk ..... III -75

3.1.14. Persentase Puskesmas Terakreditasi ..... III -76

3.1.15. Contraceptive Prevalence Rate ..... III -78

3.1.16. Tingkat Pengangguran Terbuka ..... III -82

3.1.17. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja ..... III -84

3.1.18. Persentase Buta Aksara Al-Quran..... III -90

3.1.19. Pertumbuhan Ekonomi..... III -91

3.1.20. Indeks Gini ..... III -94

3.1.21. Persentase Penduduk Miskin ..... III -95

3.1.22. Indeks Desa Membangun (IDM)..... III -97

3.1.23. Pengeluaran Perkapita..... III -98

3.1.24. Persentase Tercukupinya Pangan Pada Tingkat Rumah  
Tangga Dalam Jumlah, Mutu, Ragam, Keamanan Serta  
Keterjangkauan Harga ..... III -100

3.1.25. Tingkat Pencemaran Lingkungan ..... III -118





### 3.1.26. Tersedianya Dokumen Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup . ..... III -120

3.1.27. Predikat Sakip ..... III -122

3.1.28. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan ..... III -123

3.1.29. Tingkat Keselarasan Antara Renja SKPD Dengan

Dokumen Perencanaan Diatasnya ..... III -124

3.1.30. Persentase Penyelesaian Perda ..... III -127

3.1.31. Indeks Pembangunan Gender (IPG) ..... III -129

3.1.32. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) ..... III -130

3.1.33. Indeks Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan

dan Anak ..... III -130

3.1.34. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Perizinan .... III -133

3.1.35. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan... III -134

3.1.36. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang

Kependudukan..... III -136

3.2. Akuntabilitas Keuangan ..... III -138

3.2.1. Komposisi APBD Kabupaten Sarolangun

Tahun 2016-2019 ..... III -139

3.2.2. komposisi PAD Kabupaten Sarolangun

Tahun 2014-2019 ..... III -141

3.2.3. komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Sarolangun

Tahun 2014-2019 ..... III -143

3.2.4. komposisi Belanja Kabupaten Sarolangun

Tahun 2014-2019 ..... III -144

3.2.5. kesehatan Keuangan Daerah ..... III -145

3.2.6. Analisis Kapasitas Fisikal Daerah..... III -145

3.2.7. Analisis Ruang Fiskal Daerah..... III -147

3.3. Pendapatan. .... III - 148

BAB IV PENUTUP ..... IV - 149

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



## **BAB I** **PENDAHULUAN**

---

### **1. Latar Belakang**

---

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan terjadinya perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana sebagai daerah otonom Propinsi, Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan serta mengatur sumber-sumber penerimaan daerah agar mampu membiayai kewenangan yang telah diserahkan kepada daerah dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan masyarakat serta meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam pembangunan, sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah.

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,



Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara termasuk Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan dimana laporan tersebut menggambarkan kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan





Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj merupakan bagian dari SAKIP yang secara implisit merupakan suatu bentuk asertasi atas kinerja instansi pemerintah, dalam rangka perbaikan dan mendorong terwujudnya pemerintahan Kabupaten Sarolangun yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) dalam penyelenggaraan pemerintahan serta bahan evaluasi perbaikan pelayanan dan kinerja Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah.

---

### 1.1. Isu Strategis

---

Berdasarkan rangkaian proses sebagaimana dipaparkan dalam bab ini, ada beberapa rumusan isu strategis Kabupaten Sarolangun periode 2017-2022 dikelompokkan dalam 5(lima) kelompok yaitu:

1. Tata kelola Pemerintahan (Governance)
2. Peningkatan daya saing daerah
3. Kesejahteraan masyarakat
4. Lingkungan hidup
5. Kesenjangan wilayah

---

### 1.2. Kondisi Kabupaten Sarolangun

---

Secara yuridis formal Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi resmi terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya diperkuat dengan keputusan DPRD Propinsi Jambi Nomor 2/DPRD/1999 tanggal 9 Juli 1999 tentang Pemekaran Kabupaten di Propinsi Jambi.

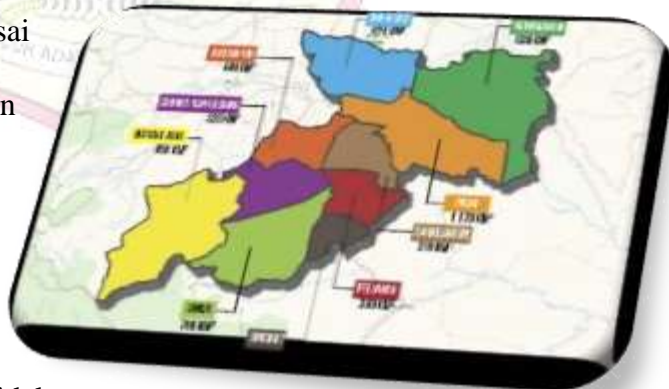


### 1.2.1. Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Sarolangun berada pada posisi  $102^{\circ} 03' 39''$  sampai  $103^{\circ} 13' 17''$  BT dan  $01^{\circ} 53' 39''$  LS sampai  $02^{\circ} 46' 24''$  LS (Meridian Greenwich) terletak di wilayah Barat Propinsi Jambi. Ibukota Kabupaten berada di Kota Sarolangun yang berjarak lebih kurang 179 Km dari Ibukota Propinsi Jambi.



Kabupaten Sarolangun termasuk beriklim tropis. Keadaan iklim rata-rata berkisar antara  $23^{\circ}\text{C}$  sampai dengan  $32^{\circ}\text{C}$  dengan kelembaban udara rata-rata berkisar 78% dan curah hujan rata-rata 260 mm, Kabupaten Sarolangun merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Sarolangun Bangko. Terletak pada ketinggian 20 sampai dengan 1.950 m dari permukaan laut (dpal). Kabupaten Sarolangun terdiri dari 10 Kecamatan 9 Kelurahan dan 149 Desa. Rincian masing-masing kecamatan sebagai berikut : Kecamatan Batang Asai terdiri dari 23 Desa definitif dan tidak ada kelurahan serta semua desa berstatus desa pedesaan. Kecamatan Limun terdiri dari 16 Desa definitif, tidak



ada kelurahan dan semua desa merupakan desa pedesaan. Kecamatan Cermin Nan Gedang terdiri dari 10 Desa definitif, tidak ada kelurahan dan semua desa merupakan desa pedesaan. Kecamatan Pelawan terdiri dari 14 Desa definitif, tidak ada kelurahan



dan semua desa merupakan desa pedesaan. Kecamatan Singkut terdiri dari 10 Desa definitif, dan 1 kelurahan yaitu Sungai Benteng. Salah satu desa (desa Bukit Tigo) berstatus desa perkotaan sedangkan yang lainnya merupakan desa pedesaan. Kecamatan Sarolungun terdiri dari 10 desa definitif dan 6 kelurahan yaitu kelurahan Dusun Sarolungun, kelurahan Pasar Sarolungun, kelurahan Sukasari, Kelurahan Aur Gading, Kelurahan Gunung Kembang dan kelurahan Sarolungun Kembang. Dari 15 desa/kelurahan tersebut, 2 desa/kelurahan berstatus desa/kelurahan perkotaan (Kelurahan Pasar Sarolungun dan kelurahan Sukasari), sisanya adalah desa/kelurahan pedesaan. Kecamatan Batin VIII terdiri dari 14 desa definitif dan 1 kelurahan yaitu Limbur Tembesi dan seluruh desa merupakan desa pedesaan.

Kecamatan Pauh terdiri dari 13 Desa definitif, 1 kelurahan yaitu kelurahan Pauh dan seluruh desa merupakan desa pedesaan. Kecamatan Air Hitam terdiri dari 9 Desa definitif, dan seluruh desa merupakan desa pedesaan Kecamatan Mandiangan terdiri dari 28 Desa definitif semua desa merupakan desa pedesaan.

### **1.2.2. Luas Wilayah Kabupaten Sarolungun**

Luas Wilayah Kabupaten Sarolungun 6.174 km<sup>2</sup>. Batas-batas wilayah Administrasi Kabupaten Sarolungun Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Musi Banyuasin. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Merangin.

Luas masing-masing kecamatan adalah : Kecamatan Batang Asai 858 km<sup>2</sup>, Kecamatan Limun 799 km<sup>2</sup>, Kecamatan Cermin Nan Gedang 320 km<sup>2</sup>, Kecamatan Pelawan 330 km<sup>2</sup>, Kecamatan Singkut 173 km<sup>2</sup>, Kecamatan Sarolungun 319 km<sup>2</sup>,





Kecamatan Batin VIII 498 km<sup>2</sup>, Kecamatan Pauh 1.770 km<sup>2</sup>, Kecamatan Air Hitam 471 km<sup>2</sup>, Kecamatan Mandiangin 636 km<sup>2</sup>.

### 1.2.3. Demografis Kabupaten Sarolangun

Menurut Laporan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun, jumlah penduduk kabupaten sarolangun berdasarkan jenis kelamin laki-laki 157,426 jiwa dan perempuan 149,459 jiwa total keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Sarolangun 306,885 jiwa. Dapat kita lihat table dibawah ini:

**TABEL 1.1**  
**JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN SAROLANGUN BERDASARKAN JENIS**  
**KELAMIN DAN JUMLAH DESA**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAROLANGUN**  
**TAHUN 2019**

| NO | KECAMATAN         | JUMLAH PENDUDUK (JIWA) |                |                 |             |
|----|-------------------|------------------------|----------------|-----------------|-------------|
|    |                   | LAKI-LAKI              | PEREMPUAN      | JUMLAH PENDUDUK | JUMLAH DESA |
| 1  | 2                 | 3                      | 4              | 5               | 6           |
| 1  | BATANG ASAI       | 10.103                 | 10.011         | 20.114          | 23          |
| 2  | LIMUN             | 9.804                  | 9.355          | 19.159          | 16          |
| 3  | SAROLANGUN        | 29.896                 | 28.648         | 58.544          | 16          |
| 4  | PAUH              | 13.725                 | 12.926         | 26.651          | 14          |
| 5  | PELAWAN           | 18.633                 | 17.828         | 36.461          | 14          |
| 6  | MANDIANGIN        | 20.251                 | 18.808         | 39.059          | 28          |
| 7  | AIR HITAM         | 14.833                 | 13.637         | 28.470          | 9           |
| 8  | BATHIN VIII       | 11.331                 | 10.738         | 22.069          | 15          |
| 9  | SINGKUT           | 21.328                 | 20.326         | 41.554          | 13          |
| 10 | CERMIN NAN GEDANG | 7.522                  | 7.182          | 14.704          | 10          |
|    | <b>TOTAL</b>      | <b>157.426</b>         | <b>149.459</b> | <b>305.885</b>  | <b>158</b>  |

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Sarolangun (data diolah)



## 1.2.4. Perekonomian Masyarakat

### 1.2.4.1. Usaha Tanaman Pangan

Pada tahun 2019 luas area produksi padi di kabupaten Sarolangun seluas 19.111 ha dengan jumlah produksinya 75.772 ton atau 7.74 ton per hektar. Sedangkan pada tahun 2016 luas area produksi padi seluas 15.575 ha dengan jumlah produksi 66.343 ton atau 4.16 ton per hektar. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada table 1.2 di bawah ini

**TABEL 1.2.**

### **LUAS AREA PRODUKSI DAN JUMLAH PRODUKSI KOMODITI PERTANIAN DI KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2019**

| No | Komoditi           | Jumlah<br>2019 | Satuan | No. | Komoditi           | Jumlah<br>2019 | Satuan |
|----|--------------------|----------------|--------|-----|--------------------|----------------|--------|
| 1. | Padi               |                |        |     |                    |                |        |
|    | a. Luas Panen      | 19.111         | Ha     |     | a. Jumlah Produksi | 4.480          | Ton    |
|    | b. Jumlah Produksi | 75.772         | Ton    |     | b. Produktifitas   | 35.00          | Ton/Ha |
|    | c. Produktifitas   | 7.74           | Ton/Ha |     |                    |                |        |
| 2. | Jagung             |                |        | 5.  | Ketela Rambat      |                |        |
|    | a. Luas Panen      | 340            | Ha     |     | a. Luas Panen      | 25             | Ha     |
|    | b. Jumlah Produksi | 2.380          | Ton    |     | b. Jumlah Produksi | 300            | Ton    |
|    | c. Produktifitas   | 7.00           | Ton/Ha |     | c. Produktifitas   | 12.00          | Ton/Ha |
| 3. | Kedelai            |                |        | 6.  | Kacang tanah       |                |        |
|    | a. Luas Panen      | 304            | Ha     |     | a. Luas Panen      | 40             | Ha     |
|    | b. Jumlah Produksi | 1.140          | Ton    |     | b. Jumlah Produksi | 80             | Ton    |
|    | c. Produktifitas   | 3.75           | Ton/Ha |     | c. Produktifitas   | 2.00           | Ton/Ha |
| 4. | Ketela Pohon       |                |        | 7.  | Kacang Hijau       |                |        |
|    | a. Luas Panen      | 128            | Ha     |     | a. Luas Panen      | 5              | Ha     |
|    |                    |                |        |     | b. Jumlah Produksi | 8              | Ton    |
|    |                    |                |        |     | c. Produktifitas   | 1.60           | Ton/Ha |

(Sumber Dinas TPHP Kab. Sarolangun, 2019)



Disamping komoditi tanaman strategis (Padi, Jagung dan Kedelai) juga diusahakan tanaman palawija dan hortikultura. Tanaman palawija yang diusahakan petani Kabupaten Sarolangun meliputi Ketela Pohon, Ketela Rambat, Kacang Tanah dan Kacang Hijau. Sedangkan hortikultura terdiri dari Buah – buahan dan sayuran, antara lain Alpokat, Mangga, Rambutan, Duku, Jeruk, Durian , Sawo, Pepaya , Pisang, Nanas, Manggis, Nangka, Salak dan Sirsak. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel 1.3. dibawah ini :

**TABEL. 1.3.**  
**BANYAK TANAMAN , TANAMAN DIPANEN DAN RATA – RATA PRODUKSI**  
**TANAMAN BUAH – BUAHAN MENURUT JENIS TANAMAN TAHUN 2019.**

| No  | Jenis Tanaman | Banyak Tanaman (Batang) | Banyak Tanaman Dipanen (Batang) | Rata-rata Produksi (Ton/Ha) |
|-----|---------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1.  | Alpokat       | 1,573                   | 184                             | 3,6                         |
| 2.  | Mangga        | 7,607                   | 807                             | 2                           |
| 3.  | Rambutan      | 22,574                  | 3,510                           | 6                           |
| 4.  | Duku          | 82,824                  | 7,351                           | 2,5                         |
| 5.  | Jeruk         | 48,740                  | 11,612                          | 4                           |
| 6.  | Durian        | 110,455                 | 8,080                           | 2,5                         |
| 7.  | Sawo          | 3,997                   | 716                             | 3,5                         |
| 8.  | Pepaya        | 3,518                   | 988                             | 66                          |
| 9.  | Pisang        | 290,570                 | 125,651                         | 25                          |
| 10. | Nanas         | 4,071                   | 1,445                           | 43                          |
| 11. | Belimbing     | 2,544                   | 444                             | 7,5                         |
| 12. | Manggis       | 7,327                   | 447                             | 2                           |
| 13. | Nangka        | 17,209                  | 3,662                           | 4,5                         |
| 14. | Salak         | 10,490                  | 6,041                           | 10,5                        |
| 15. | Sirsak        | 1,266                   | 321                             | 8,5                         |

(Sumber : Dinas TPHP Kab. Sarolangun,2019)

Selain tanaman buah- buahan di Kabupaten Sarolangun, masih ada tanaman hortikultura lainnya yakni tanaman sayur-sayuran seperti : Cabe, Kacang panjang , Tomat, Terong, Buncis, Ketimun, Labu Siam , Kankung dan Bayam.





#### 1.2.4.2. Perikanan dan Peternakan

Potensi sumber daya perikanan di Kabupaten Sarolungun terdiri dari kolam, keramba dan perairan umum (sungai & Danau). Produksi perikanan yang terdapat di Kabupaten Sarolungun tahun terakhir (Tahun 2019) sebesar **3.191** ton. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.4 dibawah ini :

**TABEL 1.4.**  
**JUMLAH PRODUKSI DAN NILAI BUDI DAYA IKAN DI KOLAM DAN KERAMBA PER KECAMATAN DI KABUPATEN SAROLUNGUN TAHUN 2019.**

| No | Kecamatan         | Kolam (Ton) | No | Kecamatan   | Kolam (Ton) |
|----|-------------------|-------------|----|-------------|-------------|
| 1  | Sarolungun        | 451         | 6  | Batang Asai | 370         |
| 2  | Pelawan           | 320         | 7  | Pauh        | 210         |
| 3  | Singkut           | 660         | 8  | Mandiingin  | 420         |
| 4  | Limun             | 360         | 9  | Bathin VIII | 105         |
| 5  | Cermin nan Gedang | 115         | 10 | Air Hitam   | 180         |

(Sumber Dinas Peternakan dan Perikanan, 2019)

**TABEL 1.5.**  
**JENIS PERIKANAN YANG BUDIDAYANYA DI KOLAM DAN KERAMBA DI KABUPATEN SAROLUNGUN TAHUN 2019.**

| No.           | Jenis Ikan | Tahun 2019     |               | No | Jenis Ikan | Tahun 2019     |               |
|---------------|------------|----------------|---------------|----|------------|----------------|---------------|
|               |            | Produksi (Ton) | Nilai (Rp.00) |    |            | Produksi (Ton) | Nilai (Rp.00) |
| 1             | Ikan Mas   | 258            | 8,256         | 4  | Ikan Patin | 354            | 7,080         |
| 2             | Ikan Nila  | 2,118          | 57,186        | 5  | Lele       | 223            | 3,791         |
| 3             | Gurami     | 64             | 2,240         | 6  | Lainnya    | 174            | 11,986        |
| <b>Jumlah</b> |            |                |               |    |            | <b>3.191</b>   | <b>90,539</b> |

(Sumber Dinas Peternakan dan Perikanan, 2019)

Penyelenggaraan bidang usaha peternakan cukup berkembang di Kabupaten Sarolungun. Hal ini dapat dilihat beragamnya jenis ternak yang diusahakan oleh masyarakat . populasi ternak pada tahun 2016 dan 2019 di Kabupaten Sarolungun dan gambaran tentang rincian usaha peternakan berkenaan dengan jenis ternak yang diushakan dapat dilihat pada tabel 1.6. dibawah ini :



**TABEL 1.6.**  
**POPULASI KEADAAN PENGELOLAAN USAHA PETERNAKAN DI KABUPATEN**  
**SAROLANGUN TAHUN 2016 – 2019**

| No       | Jenis Usaha Ternak               | Jumlah     |           |            |            | Satuan |
|----------|----------------------------------|------------|-----------|------------|------------|--------|
|          |                                  | 2016       | 2017      | 2018       | 2019       |        |
| <b>1</b> | Ternak Sapi Potong               |            |           |            |            |        |
|          | a. Jumlah Populasi               | 9.225      | 9.419     | 9.561      | 9.680      | Ekor   |
|          | b. Jumlah Pemotongan per tahun   | 1.780      | 1.782     | 1.840      | 1.739      | Ekor   |
|          | c. Jumlah Produksi Daging Ternak | 227.147    | -         | 286.488    | 279.170    | Kg     |
| <b>2</b> | Ternak Kerbau                    |            |           |            |            |        |
|          | a. Jumlah Populasi               | 8.145      | 8.754     | 8.880      | 8.945      | Ekor   |
|          | b. Jumlah Pemotongan per tahun   | 1.187      | 1.474     | 1.483      | 1.486      | Ekor   |
|          | c. Jumlah Produksi Daging Ternak | 242.291,20 | -         | 244.101,80 | 244.596    | Kg     |
| <b>3</b> | Ternak Kecil (Kambing)           |            |           |            |            |        |
|          | a. Jumlah Populasi Kambing       | 45.658     | 55.735    | 46.298     | 46.325     | Ekor   |
|          | b. Jumlah Pemotongan per tahun   | 3.654      | 3.653     | 3.671      | 3.689      | Kg     |
|          | c. Jumlah Produksi (Domba)       | 40.705,56  | -         | 40.894,94  | 41.095     | Ekor   |
|          | a. Jumlah Populasi Domba         | 16.293     | 25.126    | 16.354     | 15.715     | Ekor   |
|          | b. Jumlah Pemotongan per tahun   | 1.369      | 1.372     | 1.414      | 1.426      | Kg     |
|          | c. Jumlah Produksi               | 15.086,38  | -         | 15.582,28  | 15.715     | Kg     |
|          | <b>4</b> Unggas                  |            |           |            |            |        |
|          | a. Ayam kampung                  |            |           |            |            |        |
|          | - Jumlah Populasi                | 324.603    | 327.424   | 774.305    | 297.450    | Ekor   |
|          | - Produksi Daging                | 347.803,39 | 361.673   | 361.782,52 | 361.846,04 | Kg     |
|          | - Produksi Telur                 | 2.537.691  | 2.842.057 | 411.827,58 | 2.789.399  | Butir  |
|          | b. Jumlah Ayam Pedaging          |            |           |            |            |        |
|          | - Jumlah Populasi                | 405.108    | 405.108   | 361.746    | 399.505    | Ekor   |
|          | - Produksi Daging                | 398.499,60 | 399.413   | 813.741    | 405.108    | Kg     |
|          | c. Jumlah Ayam Petelur           | 138.068    | 138.891   | 506.133    | 511.100    | Ekor   |



|                   |              |           |  |  |       |
|-------------------|--------------|-----------|--|--|-------|
| - Jumlah Populasi | 901.119      |           |  |  | Kg    |
| - Produksi Daging |              |           |  |  |       |
| d. Jumlah itik    | 44.473       | 41.599    |  |  | Ekor  |
| - Jumlah Populasi | 15.540,80    | 14.044    |  |  | Kg    |
| - Produksi Daging | 2.849.189,88 | 2.577.110 |  |  | Butir |
| - Produksi Telur  |              |           |  |  |       |

(Sumber Dinas Peternakan dan Perikanan, 2019)

### 1.2.4.3. Perkebunan

Kabupaten Sarolangun memiliki potensi untuk pengembangan Perkebunan Khususnya perkebunan kelapa sawit dan karet, dimana merupakan usaha bidang perkebunan yang paling dominan perkembangannya . Hal ini terlihat dari jumlah luas area perkebunan dan jumlah produksi yang cukup besar . Luas perkebunan Karet di Kabupaten Sarolangun sebanyak 126.725 hektar dan luas perkebunan sawit sebanyak 35.454 hektar pada tahun 2016. Selain itu, usaha perkebunan yang juga berkembang di kabupaten Sarolangun adalah kopi, lada, pinang, kulit kayu manis, Kelapa dalam, Nilam dan tebu.

### 1.2.4.4. Energi Dan Industri

#### 1.2.4.4.1. Energi

Jangkauan pelayanan energi listrik yang ada di kabupaten Sarolangun meliputi hampir seluruh wilayah baik perkotaan dan pedesaan. Sampai tahun 2015, jangkauan pelayanan energi listrik yang ada di Kabupaten Sarolangun sudah mencapai seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sarolangun walaupun masih ada sedikit desa yang belum terjangkau dan masih ada pemadaman listrik sekali – kali. Jumlah desa yang belum teraliri listrik pada tahun 2015 sebanyak 18 desa dalam kabupaten Sarolangun . Apalagi dengan telah dibangunnya PLTU Samaran maka akan dapat memenuhi seluruh kecamatan di Kabupaten Sarolangun bahkan



surplus sumber energi listrik di Kabupaten Sarolangun. Apabila produksi energi listrik yang bersumber dari bahan baku batu bara yang tersedia dapat di kelola di Kabupaten Sarolangun sendiri, maka akan dapat untuk memenuhi kebutuhan energi listrik Kabupaten tetangga. Jumlah sumber energi listrik Kabupaten Sarolangun tahun 2016 – 2017 dapat dilihat pada tabel 1.7.berikut :

**TABEL 1.7.**  
**JUMLAH SUMBER ENERGI LISTRIK KABUPATEN SAROLANGUN**  
**TAHUN 2016 – 2017**

| No | Sumber Energi Listrik | Tahun                  |                     |                 |                        |                     |                 |
|----|-----------------------|------------------------|---------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|
|    |                       | 2016                   |                     |                 | 2017                   |                     |                 |
|    |                       | Banyaknya Mesin (Unit) | Daya Terpasang (Kw) | Daya Mampu (Kw) | Banyaknya Mesin (Unit) | Daya Terpasang (Kw) | Daya Mampu (Kw) |
| 1  | PLTG                  | -                      |                     |                 | -                      | -                   | -               |
| 2  | PLTD Batang Asai      | 4                      | 920                 | 920             | 4                      | 920                 | 600             |
| 3  | PLTS                  | -                      | -                   | -               | -                      | -                   | -               |
| 4  | PLTU Semarang         | 2                      | 14.000              | 12.000          | 2                      | 14.000              | 12.000          |

(Sumber Sarolangun Dalam Angka, 2018)

Sumber energi lain yang juga memiliki peranan penting bagi masyarakat Kabupaten Sarolangun adalah ketersediaan bahan bakar terutama minyak tanah , bensin, dan solar. Untuk menunjang pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak bagi masyarakat kabupaten Sarolangun, di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2016 terdapat fasilitas pelayanan seperti keberadaan SPBU sebanyak 6 Unit , dan UPPDN Pertamina sebanyak 2 Unit . Jumlah masing – masing fasilitas pelayanan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.8.





**TABEL 1.8.**  
**JUMLAH SARANA PELAYANAN BAHAN BAKAR KABUPATEN SAROLANGUN**  
**TAHUN 2016 – 2017**

| No | Sarana Pelayanan Bahan Bakar | Jumlah |      | Satuan |
|----|------------------------------|--------|------|--------|
|    |                              | 2016   | 2017 |        |
| 1  | SPBU                         | 6      | 7    | Buah   |
| 2  | Depo Minyak Tanah            | 27     | 27   | Buah   |
| 3  | UPPDN Pertamina              | 2      | 2    | Buah   |

(Sumber Sarolangun Dalam Angka, 2018)

#### **1.2.4.4.2. Industri**

Industri di Kabupaten Sarolangun setiap tahun mengalami peningkatan baik jumlah unit usaha tenaga kerja, nilai investasi maupun produksinya. Jumlah industry kecil dan menengah di Kabupaten Sarolangun tahun 2016 dan 2017 sebanyak 1200 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 3.666 orang.

Dan pada tahun 2015 ada 5 perusahaan yang berskala besar yang bergerak di bidang usaha industry pengolahan buah sawit atau pabrik minyak kelapa sawit (PMKS) dengan kapasitas produksi 45-60 ton/jam yakni PT. Krena Duta Agrindo (KDA), PT. Bahana Karya Semesta, PT. Inti Guna Nabati (IGUN), PT. Lambang Sawit Perkasa (LSP) dan PT. Sukses Gemilang Palm (SGP), sedangkan untuk jenis usaha crumb rubber pada tahun 2015 sebanyak 1 perusahaan yakni PT. HEVEA dan pada tahun 2016 terjadi penambahan 1 perusahaan crumb rubber yakni PT. Karet Bathin VIII yang berlokasi di kecamatan Bathin VIII.

#### **1.2.4.5. Pariwisata**

Potensi pariwisata Kabupaten Sarolangun yang juga dikenal dengan bumi sepucuk Adat Serumpun Pseko ini, sangat menjanjikan dengan berbagai jenis objek wisata mulai dari wisata alam hingga wisata budaya dan sejarah.



Potensi – potensi wisata ini tersebar di berbagai kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sarolangun. Objek yang umumnya adalah objek wisata alam, selain itu juga wisata ziarah, wisata minat khusus, wisata budaya dan wisata sejarah. Meski demikian , sebagian objek wisata yang terdapat di Kecamatan-kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun butuh perhatian dan pemeliharaan serta pengelolaan yang baik agar dapat dinikmati baik oleh masyarakat Sarolangun maupun para wisatawan dari luar Kabupaten Sarolangun. Gambaran potensi wisata di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 1.9:

**TABEL 1.9.**  
**GAMBARAN POTENSI OBJEK WISATA YANG ADA**  
**DI KABUPATEN SAROLANGUN.**

| No | Kecamatan          | Nama Objek Wisata  | Keterangan   |
|----|--------------------|--|--|
| 1  | <b>Sarolangun</b>  | Perkampungan Tradisional Muaro Sawah<br>Panorama di antara Dua Jembatan<br>Panorama Jembatan Beatrix<br>Taman Perkantoran Gunung Kembang<br>Danau Ladang Panjang<br>Mesjid Al-Falah Pasar Sarolangun<br>Mesjid Al- Sulthon Sarolangun<br>Sport Center “ Sarolangun Emas”   | Wisata Budaya<br>Wisata ALam<br>Wisata Alam<br>Wisata Buatan<br>Wisata Alam<br>Wisata Alam<br>Wisata Rohani<br>Wisata Rohani<br>Wisata Kesehatan Jasmani   |
| 2  | <b>Batang Asai</b> | Danau Kaco<br>Minyak Wajang wali<br>Air Terjun Telun Tujuh<br>Air Terjun Mudek Niban<br>Air Terjun Rantau Uba<br>Air Terjun Narso<br>Air Terjun Inum<br>Air Terjun telun seluro<br>Makam Keramat<br>Panorama Bukit Rayo<br>Panorama Sungai Batang Asai<br>Pendulang emas Tradisional<br>Makam Keramat Bukit Lupo<br>Batu Tinggi<br>Arum Jeram Ma. Talang<br>Olah Raga Paralayang | Wisata ALam<br>Wisata Budaya<br>Wisata Alam<br>Wisata Alam<br>Wisata Alam<br>Wisata Alam<br>Wisata Alam<br>Wisata Alam<br>Wisata Budaya<br>Wisata Alam<br>Wisata Alam<br>Wisata Budaya<br>Wisata Budaya<br>Wisata Alam<br>Wisata Minat Khusus<br>Wisata Minat Khusus |
| 3  | <b>Air Hitam</b>   | Taman Nasional Bukit Dua Belas<br>Komuitas Suku Anak Dalam (SAD)   | Wisata Alam<br>Wisata Budaya   |



|   |                   |   |  |
|---|-------------------|---|--|
|   |                   | Habitat Kayu Bulian<br>Habitat Tanaman Anggrek/Neventes<br>Air Panas Paku Aji<br>Sungai Air Jernih<br>Air Terjun Talun<br>Batu Sesudung<br>Batu Batumang<br>Air Meruap Jernih   | Ecowisata<br>Ecowisata<br>Ecowisata<br>Wisata Alam<br>Wisata Alam<br>Wisata Budaya<br>Wisata Budaya<br>Wisata Alam                                 |
| 4 | <b>Limun</b>      | Dam Muaro Kutur<br>Goa Bukit Bulan<br>Goa Calow Petak<br>Panorama Alam Bukit Temalun<br>Panorama Alam Bukit Bulan<br>Panorama Alam Bukit Barisan<br>Panorama Hutan Adat<br>Panorama Sungai Batang Limun<br>Panorama Sungai Muaro Limun<br>Panorama Sungai Binjai Lubuk Bedorong | Wisata Alam<br>Wisata Alam<br>Wisata Alam<br>Wisata Alam<br>Wisata Alam<br>Wisata Alam<br>Wisata Alam<br>Wisata Alam<br>Wisata Alam<br>Wisata Alam |
| 5 | <b>Mandiingin</b> | Hutan Masyarakat  | Wisata Alam  |
| 6 | <b>Pauh</b>       | Danau Pauh<br>Batu Tulis  | Wisata Alam<br>Wisata Budaya   |
| 7 | <b>Pelawan</b>    | Danau Kampung Pulau<br>Danau Godang Semaru<br>Perkebunan Durian Semaru<br>Persawahan Payo Mangkuang<br>Makam Karomah Datuk Ijuk<br>Lesung Batu Desa Lubuk Sepuh<br>Lesung Batu Desa Rantau Tenang<br>Rumah Tuo Lubuk Sepuh  | Wisata Alam<br>Wisata Budaya<br>Wisata Alam<br>Wisata Alam<br>Wisata Agro<br>Wisata Agro<br>Wisata Budaya<br>Wisata Budaya                         |

Pengembangan kegiatan wisata di kabupaten Sarolangun perlu didukung usaha perhotelan. Usaha perhotelan di Kabupaten Sarolangun baru mulai bergeliat sepanjang tahun 2015-2017, salah satunya dengan berdirinya Hotel Abadi di Sentra Bisnis Sarolangun yang mulai beroperasi pada tahun 2008. Meski jenis hotel yang dominan di Kabupaten Sarolangun meliputi jenis hotel non bintang, namun usaha perhotelan di kabupaten Sarolangun mulai menjanjikan terutama sejak Pemkab Sarolangun dapat dilihat pada tabel 1.10 berikut :



**TABEL 1.10**  
**JUMLAH HOTEL DI KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018 – 2019**

| No | Jenis Hotel         | Jumlah |      | Satuan | No | Jenis Hotel        | Jumlah |      | Satuan |
|----|---------------------|--------|------|--------|----|--------------------|--------|------|--------|
|    |                     | 2018   | 2019 |        |    |                    | 2018   | 2019 |        |
| 1  | Hotel Bintang Lima  | -      | -    | Buah   | 5  | Hotel Bintang Satu | -      | -    | Buah   |
| 2  | Hotel Bintang Empat | -      | -    | Buah   | 6  | Hotel Non Bintang  | 7      | 7    | Buah   |
| 3  | Hotel Bintang Tiga  | 1      | 1    | Buah   | 7  | Penginapan         | 7      | 7    | Buah   |
| 4  | Hotel Bintang Dua   | -      | -    | Buah   |    |                    |        |      |        |

(Sumber Sarolangun Dalam Angka, 2019)

### **1.3. Kewenangan dan Tugas Pokok Serta Struktur Organisasi**

#### **1.3.1. Kewenangan dan Tugas Pokok**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dimaksud adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat(2) meliputi:

- Pendidikan;
- Kesehatan;
- Pekerjaan umum dan penataan ruang;





- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial

Urusan Pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi;

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olah raga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan

Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan pilihan dimaksud meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;



- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

### **1.3.2. Struktur Organisasi**

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten Sarolangun kembali menyesuaikan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Susunan organisasi tersebut dijabarkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun, Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 07 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun, Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun dan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Sarolangun.

Pada tahun 2017 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun terdiri atas Sekretariat Daerah (9 Bagian),



Sekretariat DPRD, Inspektorat, Satuan Pol PP, RSUD, 8 Badan, 14 Dinas, 3 Kantor, 10 Kecamatan dan 9 Kelurahan.

Selain tata pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan, Persentase aparatur pemerintah (ASN) Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 juga didukung oleh Aparatur yang sangat memadai. Dari jumlah pegawai keseluruhan sebanyak 4.459 orang, aparatur pemerintah Kabupaten Sarolangun dari segi tingkat pendidikan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel.1.11.  
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

| No    | Pendidikan | Jenis Kelamin |           | Jumlah |
|-------|------------|---------------|-----------|--------|
|       |            | Laki-Laki     | Perempuan |        |
| 1     | SD         | 9             | 0         | 9      |
| 2     | SMP        | 28            | 3         | 31     |
| 3     | SMA        | 543           | 334       | 877    |
| 4     | DI         | 3             | 27        | 30     |
| 5     | DII        | 180           | 255       | 435    |
| 6     | DIII       | 103           | 464       | 567    |
| 7     | S1         | 1.070         | 1217      | 2.287  |
| 8     | S2         | 145           | 74        | 219    |
| 9     | S3         | 2             | 2         | 4      |
| Total |            | 2.083         | 2.376     | 4.459  |

(Sumber Data BKPSDM Kab. Sarolangun)

Melihat latar belakang dan tingkat pendidikan ASN di Pemerintah Kabupaten Sarolangun maka sangat berpeluang untuk dapat mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kab. Sarolangun tahun 2017-2022.



Tabel.1.12.  
Jumlah Golongan PNS Dilingkungan  
Kabupaten Sarolangun Tahun 2019

| Golongan                        | JK           |              | Jumlah       |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                 | Laki-Laki    | Perempuan    |              |
| Range                           | Male         | Female       | Total        |
| <b>I</b>                        | 2            | 3            | 4            |
| I/A (Juru Muda)                 | 1            | 0            | 1            |
| I/B (Juru Muda TK I)            | 4            | 0            | 4            |
| I/C (Juru)                      | 7            | 0            | 7            |
| I/D (Juru TK I)                 | 12           | 2            | 14           |
| <b>Golongan I / Range I</b>     | 24           | 2            | 26           |
| II/A (Pengatur Muda)            | 64           | 29           | 93           |
| II/B (Pengatur Muda TK I)       | 118          | 59           | 177          |
| II/C (Pengatur)                 | 233          | 284          | 517          |
| II/D (Pengatur TK I)            | 125          | 167          | 292          |
| <b>Golongan II / Range II</b>   | 540          | 539          | 1.079        |
| III/A (Penata Muda)             | 282          | 395          | 677          |
| III/B (Penata Muda TK I)        | 239          | 361          | 600          |
| III/C (Penata)                  | 305          | 380          | 685          |
| III/D (Penata TK I)             | 326          | 304          | 630          |
| <b>Golongan III / Range III</b> | 1.152        | 1.440        | 2.592        |
| IV/A (Pembina Muda)             | 281          | 374          | 655          |
| IV/B (Pembina Muda TK I)        | 60           | 18           | 78           |
| IV/C (Pembina)                  | 26           | 3            | 29           |
| IV/D (Pembina TK I)             | 0            | 0            | 0            |
| <b>Golongan IV/ Range IV</b>    | 367          | 395          | 762          |
| <b>JUMLAH</b>                   | <b>2.083</b> | <b>2.376</b> | <b>4.459</b> |

(Sumber Data BKPSDM Kab. Sarolangun)

Jika dilihat berdasarkan tingkat kepangkatan maka persentase golongan aparatur pemerintah (PNS) Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 Golongan I sebesar 0,58%, Golongan II sebesar 24,20% dan Golongan III sebesar 58,13% dan golongan IV sebesar 17,09% .

#### 1.4. Inovasi Dalam Sistem Akip dan Pengelolaan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun



Untuk mewujudkan pemerintah yang berbasis elektronik (*e-Government*), Pemerintah Kabupaten sarolangun telah melakukan inovasi sistem pelaporan dengan menggunakan sistem E-SAKIP yang diadopsi dari Pemerintah Kota Bandung





melalui Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan Pemerintah Kota Bandung yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 17/HK.HAM/X/2018 dan nomor 119/3996-Bag. KS tanggal 30 Oktober 2018.

Dengan sistem berbasis elektronik ini dimaksudkan untuk mempermudah pelaporan Akuntabilitas yang pada akhirnya akan mewujudkan efisiensi dan efektifitas baik program maupun anggaran.



Gambar. 1.1  
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Tentang E-SAKIP  
Antara  
Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2018



## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menetapkan **Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Nomor 63/BAPPEDA/2019** tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Sarolangun juga melakukan evaluasi pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama, pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam melakukan evaluasi dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

---

#### **2.1. Perencanaan**

---

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah serta sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Daerah, diberi ruang dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan tujuan agar mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan



daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global. Kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Kerangka dasar pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain itu, hal ini diharapkan juga dapat meningkatkan daya saing yang ada di daerah. Oleh karena itu, kebijakan yang disusun di daerah pada dasarnya dilakukan untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Secara eksplisit undang-undang otonomi menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan daerah tetap harus memperhatikan antara perencanaan pemerintahan pusat, provinsi dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah mendukung pencapaian tujuan nasional. Aspek hubungan tersebut memperhatikan kewenangan yang diberikan, baik yang terkait dengan hubungan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, pelayanan umum serta keuangan.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan RPJMD disusun sesuai dengan Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yaitu:

- a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. Dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, agar terwujud *good government*. Dalam mensinkronisasikan prioritas nasional antara pusat-daerah dan antar daerah penyusunan RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022 juga mengacu pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJM Nasional Tahun 2016-2021, RPJMD Provinsi Tahun 2016-2021, RPJMD Provinsi Tetangga, RPJMD Kabupaten/Kota Tetangga, RPJP Kabupaten Sarolangun Tahun 2006-2025, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sarolangun Tahun 2009-2029 serta sejumlah kebijakan dan prioritas program pemerintah dan pemerintah provinsi, dengan tujuan untuk menjamin terwujudnya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal maupun horizontal antar tingkat pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional Pemerintah Kabupaten Sarolangun





telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sarolangun Tahun 2006-2025 dan RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022.

RPJMD Kabupaten Sarolangun merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kerja Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun terpilih selama 5 tahun ke depan. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun ditempuh melalui strategi pokok yang dijabarkan dalam agenda pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun yang memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan dan program-program pembangunan.

### **2.1.1. Visi dan Misi Kabupaten Sarolangun**

#### **2.1.1.1. Visi Kabupaten Sarolangun**

Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 tahun sesuai tugas yang diemban. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sarolangun selama lima tahun (2017-2022) adalah visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu:

**“SAROLANGUN LEBIH SEJAHTERA”.**

Visi tersebut terdiri dari dua- frase, yaitu lebih dan sejahtera. Frase lebih menunjukkan kemajuan, peningkatan, perbaikan, percepatan dan daya saing dalam seluruh aspek pembangunan. Sedangkan kata sejahtera mengacu pada kondisi dimana masyarakat Kabupaten Sarolangun mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup sehat, leluasa berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses



terhadap informasi, pelayanan publik yang baik, serta lingkungan yang damai, tenteram dan nyaman. Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari pentahapan capaian pembangunan sesuai dengan arah pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) sebagaimana tercantum dalam Perda Kabupaten Sarolangun Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sarolangun Tahun 2006-2026.

#### **2.1.1.2. Misi Kabupaten Sarolangun**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan, sasaran dan kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan arah untuk mencapai visi. Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Sarolangun ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022, sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan umum***
- 2. Meningkatkan kualitas SDM, penguatan nilai-nilai agama dan sosial budaya***
- 3. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat berbasis potensi lokal***
- 4. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang optimal dan berkelanjutan***
- 5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif gender***
- 6. Meningkatkan pelayanan publik.***

Berangkat dari Visi dan Misi tersebut maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran sebagaimana dijelaskan sebagai berikut. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.



1. Dalam rangka pencapaian Misi I yaitu ***Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan umum***, maka tujuan pembangunan daerah Kabupaten Sarolangun 5 (lima) tahun ke depan ditetapkan sebagai berikut :

1. ***Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan***, dengan ***sasaran pembangunan :***

a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan

2. ***Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur listrik***, dengan ***sasaran pembangunan :***

a. Terwujudnya infrastruktur listrik yang memadai

3. ***Mewujudkan peningkatan kualitas dan ketersediaan jaringan irigasi dan air bersih***, dengan ***sasaran pembangunan :***

a. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan jaringan irigasi dan air bersih

4. ***Mewujudkan Ketersedian infrastruktur pendidikan, kesehatan, perumahan dan lainnya***, dengan ***sasaran pembangunan :***

b. Meningkatnya Percepatan Pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, perumahan dan lainnya

2. Dalam rangka pencapaian Misi II yaitu ***Meningkatkan kualitas SDM, penguatan nilai-nilai agama dan sosial budaya***, maka tujuan pembangunan daerah Kabupaten Sarolangun 5 (lima) tahun ke depan ditetapkan sebagai berikut :

1. ***Mewujudkan Peningkatan kualitas pendidikan, Kesehatan serta kualitas tenaga kerja***, dengan ***sasaran pembangunan :***

a. Meningkatnya kualitas pendidikan

b. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

c. Meningkatnya kualitas tenaga kerja sesuai kompetensi



2. ***Mewujudkan penguatan nilai-nilai agama dan budaya dalam pembangunan, dengan sasaran pembangunan :***

- a. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dan pengembangan budaya lokal dalam kehidupan masyarakat

3. Dalam rangka pencapaian Misi III yaitu ***Meningkatkan Perekonomian Daerah Dan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal***, maka tujuan pembangunan daerah ditetapkan sebagai berikut :

1. ***Meningkatkan perekonomian daerah, dengan sasaran pembangunan :***

- a. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi
- b. Menurunnya kesenjangan antar wilayah
- c. Menurunnya angka kemiskinan
- d. Meningkatnya kapasitas dan kemandirian desa

2. ***Mewujudkan Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan(P2DK), dengan sasaran pembangunan :***

- a. Meningkatnya pendapatan masyarakat desa/kelurahan

3. ***Mewujudkan peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan daerah, dengan sasaran pembangunan :***

- a. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal

4. Dalam rangka pencapaian Misi IV yaitu ***Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Optimal Dan Berkelanjutan***, maka tujuan pembangunan daerah ditetapkan sebagai berikut:

1. ***Peningkatan Kualitas Dan Kelestarian Sumberdaya Air Dan Lahan, dengan sasaran pembangunan :***

- a. Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan





2. ***Mewujudkan Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup***, dengan ***sasaran pembangunan*** :

a. Mempertahankan kualitas kelestarian lingkungan hidup terhadap perubahan iklim

5. Dalam rangka pencapaian Misi V yaitu ***Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Responsif Gender***, maka tujuan pembangunan daerah ditetapkan sebagai berikut :

1. ***Mewujudkan Peningkatan Tata Pemerintahan Yang Baik***, dengan ***sasaran pembangunan*** :

a. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pemerintahan yang baik

b. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas

2. ***Mewujudkan Peningkatan Jaminan Kepastian Dan Perlindungan Hukum***, dengan ***sasaran pembangunan*** :

a. Meningkatnya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum

3. ***Mewujudkan Peningkatan Kesetaraan Gender***, dengan ***sasaran pembangunan*** :

a. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah dan pemenuhan hak perempuan dan anak

6. Dalam rangka pencapaian Misi VI yaitu ***Meningkatkan Pelayanan Publik***, maka tujuan pembangunan daerah ditetapkan sebagai berikut :

1. ***Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Publik***, dengan ***sasaran pembangunan*** :

a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.



## 2.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sarolangun

### 2.1.2.1. Tujuan Pembangunan Kabupaten Sarolangun

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1( satu ) sampai dengan 5 ( Lima ) tahun. Tujuan merupakan target yang dalam penetapannya mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki dengan indikator keberhasilan yang terukur

Tingkat pencapaian tujuan merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan dari perencanaan kinerja lima tahunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD ( *performance indikator* ). Untuk itu tujuan mempunyai posisi strategis dalam pencapaian visi dan misi yang dalam kurun waktu 2017-2022 Pemerintah Kabupaten Sarolangun mengelompokkan atas 15 ( Lima Belas ) tujuan sebagai berikut:

**TABEL 2.1**  
**PENGELOMPOKAN MISI DAN TUJUAN TAHUN 2019**

| MISI           |  | NO        | TUJUAN  |
|----------------|--|-----------|---|
| <b>PERTAMA</b> | <b>Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Umum</b>        | <b>1.</b> | <b>Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan</b>                    |
|                |  | <b>2.</b> | <b>Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur listrik</b>                              |
|                |  | <b>3.</b> | <b>Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Ketersedian Jaringan Irigasi dan Air Bersih</b>      |
|                |  | <b>4.</b> | <b>Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Lainnya</b>   |
| <b>KEDUA</b>   | <b>Meningkatkan Kualitas SDM Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Sosial Budaya</b> | <b>5.</b> | <b>Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Serta Kualitas Tenaga Kerja</b> |
|                |  | <b>6.</b> | <b>Mewujudkan Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Dalam Pembangunan</b>                  |



| MISI    |   | NO  | TUJUAN  |
|---------|---|-----|---|
| KETIGA  | Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Berbasis Potensial Lokal           | 7.  | Meningkatkan Perekonomian Daerah                                |
|         |   | 8.  | Mewujudkan Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P2DK)     |
|         |   | 9.  | Mewujudkan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Daerah   |
| KEEMPAT | Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Optimal dan Berkelanjutan | 10. | Peningkatan Kualitas dan Kelestarian Sumber Daya Air dan lahan  |
|         |   | 11. | Mewujudkan Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup             |
| KELIMA  | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Responsif Gender    | 12. | Mewujudkan Peningkatan Tata Pemerintahan Yang Baik              |
|         |   | 13. | Mewujudkan Peningkatan jaminan Kapasitas dan Perlindungan Hukum |
|         |   | 14. | Mewujudkan Peningkatan Kesenjangan Gender                       |
| KEENAM  | Meningkatkan Pelayanan Publik   | 15. | Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Publik                         |

#### 2.1.2.2. Sasaran Pembangunan Kabupaten Sarolangun

Sasaran yang dimaksud disini adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu, yang merupakan penjabaran dari tujuan. Penetapan sasaran didasari atas isi-isu strategis, analisis lingkungan internal dan eksternal, untuk menentukan factor kunci keberhasilan, sejalan dengan proses perencanaan strategis. Focus utama penentu sasaran adalah tindakan dan alokasi dana dan sumber sumber daya kedalam kegiatan atau operasional untuk pencapaian kinerja yang diinginkan. Dalam penetapan sasaran juga juga dirancang dan diidentifikasi indikator pencapaiannya, yaitu suatu ukuran tingkat keberhasilan perwujudan pencapaiannya pada periode tahun tertentu. Setiap indikator pencapaian sasaran disertai dengan targetnya masing-masing.

Penetapan indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Sarolangun, baik yang bersifat makro maupun mikro, diharapkan dapat memberikan fokus pada penentu



strategi dan prioritas dalam menetapkan kebijakan-kebijakan dan program-program pilihan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan, visi dan misi Kabupaten Sarolangun.

Adapun sasaran strategis yang merupakan penjabaran dan tujuan secara terukur pada tahun 2018 sebagai ukuran kinerja utama Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan sejalan dengan RPJMD Kabupaten Sarolangun tahun 2017-2022 dengan uraian sebagai berikut :

**TABEL 2.2**  
**PENGELOMPOKAN TUJUAN DAN SASARAN**

| NO | TUJUAN   | NO  | SASARAN  |
|----|--|-----|--|
| 1. | Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan                    | 1.  | Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan                               |
| 2. | Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur listrik                              | 2.  | Terwujudnya Infrastruktur Listrik yang Memadai   |
| 3. | Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Irigasi dan Air Bersih     | 3.  | Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Irigasi dan Air Bersih                             |
| 4. | Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Lainnya   | 4.  | Meningkatnya Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Lainnya     |
| 5. | Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Serta Kualitas Tenaga Kerja | 5.  | Meningkatnya Kualitas Pendidikan   |
|    |  | 6.  | Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat   |
|    |  | 7.  | Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Sesuai Kompetensi   |
| 6. | Mewujudkan Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Dalam Pembangunan                  | 8.  | Meningkatnya Pengamalan Nilai-nilai Agama dan Pengembangan Budaya Lokal Dalam Kehidupan Masyarakat |
| 7. | Meningkatkan Perekonomian Daerah   | 9.  | Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi  |
|    |  | 10. | Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah   |
|    |  | 11. | Menurunnya Angka Kemiskinan  |
|    |  | 12. | Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Daerah  |





| NO  | TUJUAN  | NO  | SASARAN  |
|-----|---|-----|--|
| 8.  | Mewujudkan Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P2DK)     | 13. | Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Desa/Kelurahan  |
| 9.  | Mewujudkan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Daerah   | 14. | Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Beragam Berbasis Sumber Daya Lokal                     |
| 10. | Peningkatan Kualitas dan Kelestarian Sumber Daya Air dan lahan  | 15. | Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan   |
| 11. | Mewujudkan Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup             | 16. | Mempertahankan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Terhadap Perubahan Iklim                |
| 12. | Mewujudkan Peningkatan Tata Pemerintahan Yang Baik              | 17. | Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Pemerintahan yang Baik                              |
|     |   | 18. | Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas   |
| 13. | Mewujudkan Peningkatan jaminan Kapasitas dan Perlindungan Hukum | 19. | Meningkatnya Jaminan Kapasitas Hukum dan Perlindungan Hukum                                  |
| 14. | Mewujudkan Peningkatan Kesetaraan Gender                        | 20. | Meningkatkan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Daerah dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak |
| 15. | Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Publik                         | 21. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik   |

Adapun program-program yang mendukung sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam kurun waktu selama tahun 2018 Sebanyak 40 Program adalah sebagai berikut:

**TABEL 2.3**  
**PROGRAM YANG MENDUKUNG SASARAN TAHUN 2019**

| NO | SASARAN  | NO | PROGRAM  |
|----|--|----|--|
| 1. | Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan   | 1. | Program pembangunan jalan dan jembatan   |
| 2. | Terwujudnya Infrastruktur Listrik yang Memadai                         | 1. | Program koordinasi, fasilitasi dan monitoring bidang sumber energi daya mineral (ESDM)     |
| 3. | Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Irigasi dan Air Bersih | 1. | Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya |
|    |  | 2. | Program pengembangan pengelolaan air minum dan air limbah                                  |



| NO | SASARAN  | NO   | PROGRAM   |
|----|--|--|---|
| 4. | Meningkatnya Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Lainnya     | 1.<br>2.   | Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun<br>Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya  |
| 5. | Meningkatnya Kualitas Pendidikan   | 1.   | Program pengembangan manajemen pelayanan pendidikan   |
| 6. | Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat   | 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9.<br>10.<br>11.<br>12.<br>13.<br>14.<br>15.<br>16.<br>17. | Program pengawasan dan pengendalian kesehatan masyarakat<br>Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular<br>Program Obat dan perbekalan kesehatan<br>Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia<br>Program pelayanan kesehatan rujukan<br>Program pengembangan obat asli Indonesia<br>Program penanggulangan penyakit menular dan keswa<br>Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat<br>Program bantuan operasional kesehatan<br>Program pengembangan lingkungan sehat<br>Program pembinaan kesehatan bayi, anak dan remaja<br>Program pembinaan kesehatan ibu dan reproduksi<br>Program jaminan persalinan<br>Program perbaikan gizi<br>Program peningkatan pelayanan kesehatan anak<br>Program upaya kesehatan masyarakat<br>Program keluarga berencana |
| 7. | Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Sesuai Kompetensi   | 1.<br>2.   | Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja<br>Program peningkatan kesempatan kerja   |
| 8. | Meningkatnya Pengamalan Nilai-nilai Agama dan Pengembangan Budaya Lokal Dalam Kehidupan Masyarakat | 1.   | Program kegiatan pembinaan guru seni baca AL-Qur'an dan pembinaan anak khatam AL-Qur'an   |



| NO  | SASARAN   | NO | PROGRAM  |
|-----|---|----|--|
| 9.  | Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi   | 1. | Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi  |
| 10. | Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah  | 1. | Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan  |
| 11. | Menurunnya Angka Kemiskinan   | 1. | Program perlindungan dan jaminan sosial  |
|     |   | 2. | Program rehabilitasi sosial  |
|     |   | 3. | Program pemberdayaan sosial  |
|     |   | 4. | Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana   |
|     |   | 5. | Program penanganan dan pemberdayaan komunitas adat terpencil                                       |
|     |   | 6. | Program penanganan parkir miskin   |
| 12. | Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Daesa                                  | 1. | Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa                                    |
| 13. | Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Desa/Kelurahan                             | 1. | Program monitoring evaluasi dan pelaporan percepatan pembangunan Desa/Kelurahan, alokasi dana desa |
| 14. | Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Beragam Berbasis Sumber Daya Lokal      | 1. | Program peningkatan ketahanan pangan   |
| 15. | Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan                                      | 1. | Program pengendalian pencemaran lingkungan   |
| 16. | Mempertahankan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Terhadap Perubahan Iklim | 1. | Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH  |
| 17. | Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Pemerintahan yang Baik               | 1. | Program pembinaan dan pengembangan Aparatur (Penyusunan Lakip Kabupaten)                           |
|     |   | 2. | Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian KDH                                |
|     |   | 3. | Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas                         |
|     |   | 4. | Program pengintegrasian system pedoman hasil pengawasan yang efektif                               |



| NO  | SASARAN   | NO | PROGRAM   |
|-----|---|----|---|
| 18. | Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas  | 1. | Program perencanaan pembangunan daerah                                  |
| 19. | Meningkatnya Jaminan Kapasitas Hukum dan Perlindungan Hukum                                   | 1. | Program penataan peraturan perundangan-undangan                         |
| 20. | Meningkatkan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan Daerah dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak | 1. | program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan |
|     |   | 2. | Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan           |
|     |   | 3. | Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan dan gender dan anak       |
| 21. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik  | 1. | Program optimalisasi pemanfaatan TIK                                    |
|     |   | 2. | Program standarisasi pelayanan publik                                   |
|     |   | 3. | Program pelayanan kesehatan primer                                      |
|     |   | 4. | Program peningkatan kualitas pelayanan publik                           |







## 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja, maka untuk tahun 2018 pelaporan kinerja telah diperbaiki dengan terbitnya perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja sebagai perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk mencapai tujuan strategis telah menerapkan tata laksana dengan baik meliputi 21 ( Dua puluh satu ) sasaran strategis. Perencanaan Kinerja yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada tahun 2019 dan kemudian ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada tahun bersangkutan. Oleh karena itu, Perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah.

Dokumen perjanjian kinerja memuat sasaran strategis berupa terwujudnya penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif dan akuntabel yang diukur dengan 36 ( Tiga puluh Enam ) indikator kinerja sebagai berikut :



**TABEL 2.4**  
**PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2019**

| NO | SASARAN  | NO | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN | TARGET | INSTANSI  |
|----|--|----|--|--------|--------|-----------|
| 1. | Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan                           | 1. | Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik                          | %      | 74     | PUPR      |
| 2. | Terwujudnya Infrastruktur Listrik yang Memadai   | 2. | Rasio Desa Berlistrik  | %      | 90     | ESDA      |
| 3. | Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Irigasi dan Air Bersih                         | 3. | Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik               | %      | 32.4   | PUPR      |
|    |  | 4. | Akses Terhadap Air Minum Layak                               | %      | 70     |           |
| 4. | Meningkatnya Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Lainnya | 5. | Rasio Ruang Kelas Terhadap Siswa SD                          | %      | 23     | DISDIKBUD |
|    |  | 6. | Rasio Ruang Kelas Terhadap Siswa SMP                         | %      | 24     |           |
|    |  | 7. | Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk Per 30.000 Penduduk | %      | 17.961 | DINKES    |
| 5. | Meningkatnya Kualitas Pendidikan   | 8. | Persentase SD yang Terakreditasi                             | %      | 93     | DISDIKBUD |
|    |  | 9. | Persentase SMP yang Terakreditasi                            | %      | 87     |           |



| NO  | SASARAN   | NO  | INDIKATOR KINERJA                  | SATUAN         | TARGET | INSTANSI        |
|-----|---|-----|------------------------------------|----------------|--------|-----------------|
| 6.  | Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat  | 10. | Angka Harapan Hidup                | Tahun          | 68.86  | DINKES          |
|     |   | 11. | Angka Kematian Bayi (AKB)          | Per 1.000      | 3.5    |                 |
|     |   | 12. | Angka Kematian Ibu (AKI)           | Per 100.000 KH | 2.2    |                 |
|     |   | 13. | Prevelensce Balita Gizi Buruk      | 0.10%          | 0.08   | DP2KB<br>DINKES |
|     |   | 14. | Contraceptive Prevalence Rate      | %              | 69     |                 |
|     |   | 15. | Persentase Puskesmas Terakreditasi | %              | 80     |                 |
| 7.  | Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Sesuai Kompetensi  | 16. | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | %              | 70.94  | DISNAKERTRANS   |
|     |   | 17. | Tingkat Pengangguran Terbuka       | %              | 4.49   |                 |
| 8.  | Meningaktanya Pengamalan Nilai-nilai Agama dan Pengembangan Budaya Lokal Dalam Kehidupan Masyarakat | 18. | Persentase Buta Aksara Al-Quran    | %              | 13     | BINA KESRA      |
| 9.  | Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi   | 19. | Pertumbuhan Ekonomi                | %              | 4.92   | BPS             |
| 10. | Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah  | 20. | Indeks Gini                        | %              | 0.330  | DPMPD           |
| 11. | Menurunnya Angka Kemiskinan   | 21. | Persentase Penduduk Miskin         | %              | 8.83   | BPS/DINSOS      |
| 12. | Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Daesa  | 22. | Indeks Desa Membangun (IDM)        | %              | 53.69  | DPMD            |



| NO  | SASARAN  | NO  | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN    | TARGET | INSTANSI                              |
|-----|--|-----|---|-----------|--------|---------------------------------------|
| 13. | Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Desa/Kelurahan  | 23. | Pengeluaran Perkapita   | %         | 795.15 | DPMPD                                 |
| 14. | Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Beragam Berbasis Sumber Daya Lokal                     | 24. | Persentase Tercukupinya Pangan Pada Tingkat Rumah Tangga Dalam Jumlah, Mutu, Ragam, Keamanan Serta Keterjangkauan Harga | %         | 69     | DKP                                   |
| 15. | Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan   | 25. | Tingkat Pencemaran Lingkungan   | Peringkat | Sedang | DLH                                   |
| 16. | Mempertahankan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Terhadap Perubahan Iklim                | 26. | Tersedianya Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup  | Dokumen   | Ada    |                                       |
| 17. | Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Pemerintahan yang Baik                              | 27. | Predikat Sakip  | Peringkat | B      | BAGIAN ORGANISASI INSPEKTORAT BAPPEDA |
| 18. | Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas   | 28. | Opini BPK Terhadap LKPD   | Peringkat | WTP    |                                       |
| 19. | Meningkatnya Jaminan Kapasitas Hukum dan Perlindungan Hukum                                  | 29. | Tingkat Keselarasan Antara Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Diatasnya  | %         | 88.37  |                                       |
| 20. | Meningkatnya Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Daerah dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak | 30. | Persentase Penyelesaian Perda   | %         | 88     | BAGIAN HUKUM                          |
| 21. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik   | 31. | Indeks Pembangunan Gender (IPG)   | %         | 67.07  | BPS                                   |
|     |  | 32. | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)  | %         | 61.23  | BPS                                   |
|     |  | 33. | Indeks Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak  | %         | 42.31  | DP3A                                  |
|     |  | 34. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Perizinan   | Nilai     | 81.70  | DPMPTSP                               |
|     |  | 35. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan   | Nilai     | 77.30  | DINKES                                |
|     |  | 36. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kependudukan  | Nilai     | 78.00  | DUKCAPIL                              |





### **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dari pengguna sumber daya organisasi oleh penerima amanah kepada pemberi amanah secara transparan dalam rangka pencapaian tujuan, visi dan misi organisasi yang mewujudkan dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja.

Pemerintah Kabupaten Sarolangun melaksanakan kewajiban melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Kabupaten Sarolangun yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan penilaian tingkat pencapaian target sasaran strategis dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2017-2022. Pengukuran Indikator Kinerja Utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.



### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja utama. Skala pengukuran dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :

**TABEL 3.1**  
**SKALA PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN LKJ 2019**

| No. | Rentang Capaian | Kategori Capaian |
|-----|-----------------|------------------|
| 1.  | 85% s.d 100%    | Sangat Baik      |
| 2.  | 70% s.d < 85%   | Baik             |
| 3.  | 55% s.d 70%     | Cukup            |
| 4.  | < 55 %          | Kurang           |

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

#### *Indikator Kinerja*

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), dan hasil (*outcomes*).

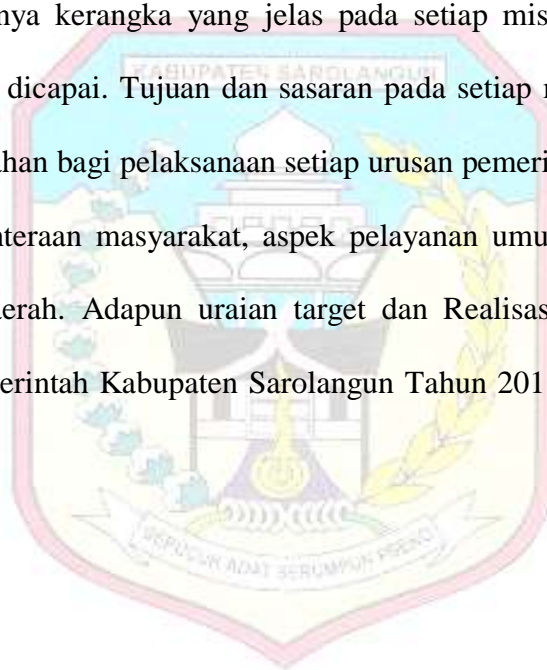
#### *Indikator Sasaran*

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.



Tujuan pembangunan Kabupaten Sarolangun ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan Kabupaten Sarolangun telah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauhmana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan itu sendiri.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun urusan terkait aspek daya saing daerah. Adapun uraian target dan Realisasi Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018, dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini :

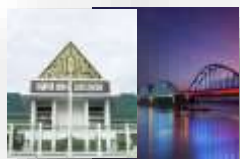




**TABEL 3.2**  
**PENGUKURAN DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019**

| O  | SASARAN  | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN | TAHUN 2019 |           |               |
|----|--|--|--------|------------|-----------|---------------|
|    |  |  |        | TARGET     | REALISASI | CAPAIAN ( % ) |
| 1. | Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan                           | Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik                          | %      | 74         | 73,42     | 99,22         |
| 2. | Terwujudnya Infrastruktur Listrik yang Memadai   | Rasio Desa Berlistrik  | %      | 90         | 91,28     | 101,4         |
| 3. | Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Irigasi dan Air Bersih                         | Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik               | %      | 32,4       | 43,59     | 134,25        |
|    |  | Akses Terhadap Air Minum Layak                               | %      | 70         | 21,88     | 31,26         |
| 4. | Meningkatnya Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Lainnya | Rasio Ruang Kelas Terhadap Siswa SD                          | %      | 23         | 21        | 109,52        |
|    |  | Rasio Ruang Kelas Terhadap Siswa SMP                         | %      | 24         | 22        | 109,09        |
|    |  | Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk Per 30.000 Penduduk | %      | 17.961     | 19,585    | 90,96         |
| 5. | Meningkatnya Kualitas Pendidikan   | Persentase SD yang Terakreditasi                             | %      | 93         | 89,19     | 95,90         |
|    |  | Persentase SMP yang Terakreditasi                            | %      | 87         | 87,50     | 100,57        |





| NO  | SASARAN  | INDIKATOR KINERJA                  | SATUAN         | TAHUN 2019 |           |               |
|-----|--|------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
|     |  |                                    |                | TARGET     | REALISASI | CAPAIAN ( % ) |
| 6.  | Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat   | Angka Harapan Hidup                | Tahun          | 68.86      | 68,94     | 100,12        |
|     |  | Angka Kematian Bayi (AKB)          | Per 1.000 KH   | 3.5        | 3,7       | 88,57         |
|     |  | Angka Kematian Ibu (AKI)           | Per 100.000 KH | 2.2        | 64,4      | 121,65        |
|     |  | Prevelence Balita Gizi Buruk       | 0.10%          | 0.08       | 0,04      | 150           |
|     |  | Contraceptive Prevalence Rate      | %              | 69         | 72,88     | 105           |
|     |  | Persentase Puskesmas Terakreditasi | %              | 80         | 100       | 125           |
| 7.  | Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Sesuai Kompetensi   | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | %              | 70.94      | 67,28     | 98,84         |
|     |  | Tingkat Pengangguran Terbuka       | %              | 4.49       | 4,18      | 93,10         |
| 8.  | Meningkatnya Pengamalan Nilai-nilai Agama dan Pengembangan Budaya Lokal Dalam Kehidupan Masyarakat | Persentase Buta Aksara Al-Quran    | %              | 13         | 16,66     | 128,15        |
| 9.  | Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi  | Pertumbuhan Ekonomi                | %              | 4.92       | 4,72      | 95.93         |
| 10. | Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah   | Indeks Gini                        | %              | 0.330      | 0,92      | 278,79        |
| 11. | Menurunnya Angka Kemiskinan  | Persentase Penduduk Miskin         | %              | 8.83       | 8,45      | 95,70         |



| NO  | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN    | TAHUN 2019 |           |               |
|-----|---|---|-----------|------------|-----------|---------------|
|     |   |   |           | TARGET     | REALISASI | CAPAIAN ( % ) |
| 12. | Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Daesa                                  | Indeks Desa Membangun (IDM)   | %         | 53.69      | 55,03     | 102,49        |
| 13. | Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Desa/Kelurahan                             | Pengeluaran Perkapita   | %         | 795.15     | 637       | 80,11         |
| 14. | Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Beragam Berbasis Sumber Daya Lokal      | Persentase Tercukupinya Pangan Pada Tingkat Rumah Tangga Dalam Jumlah, Mutu, Ragam, Keamanan Serta Keterjangkauan Harga | %         | 69         | 83,8      | 121,45        |
| 15. | Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan                                      | Tingkat Pencemaran Lingkungan   | Peringkat | Sedang     | Sedang    | 100           |
| 16. | Mempertahankan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Terhadap Perubahan Iklim | Tersedianya Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup  | Dokumen   | Ada        | Ada       | 100           |
| 17. | Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Pemerintahan yang Baik               | Predikat Sakip  | Peringkat | B          | B         | 100           |
|     |   | Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan   | Peringkat | WTP        | WTP       | 100           |
| 18. | Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas                          | Tingkat Keselarasan Antara Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Diatasnya  | %         | 88.37      | 100       | 113,16        |
| 19. | Meningkatnya Jaminan Kapasitas Hukum dan Perlindungan Hukum                   | Persentase Penyelesaian Perda   | %         | 88         | 78        | 88,6          |



|     | SASARAN  | INDIKATOR KINERJA                                    | SATUAN | TAHUN 2019 |           |               |
|-----|--|--|--------|------------|-----------|---------------|
|     |  |  |        | TARGET     | REALISASI | CAPAIAN ( % ) |
| 20. | Meningkatkan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Daerah dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak | Indeks Pembangunan Gender (IPG)                      | %      | 67.07      | 90,29     | 134,6         |
|     |  | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)                     | %      | 61.23      | 57,37     | 93,69         |
|     |  | Indeks Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak | %      | 42.31      | 100       | 236,35        |
| 21. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Perizinan    | Nilai  | 81.70      | 86,23     | 106           |
|     |  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan    | Nilai  | 77.30      | 77,89     | 100,76        |
|     |  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kependudukan | Nilai  | 78.00      | 76,63     | 98,24         |
|     | TOTAL  |  |        |            |           | 2070,37       |
|     | RATA RATA  |  |        |            |           | 98,59         |
|     |  |  |        |            |           |               |



**TABEL 3.3**  
**PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 1**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2019**

| NO | SASARAN  | INDIKATOR KINERJA                   | SATUAN | TAHUN 2019 |           |             | TAHUN 2018 |           |        |
|----|--|-------------------------------------|--------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|--------|
|    |  |                                     |        | TARGET     | REALISASI | CAPAIAN (%) | TARGET     | REALISASI | %      |
| 1. | Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan | Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik | %      | 74         | 73,42     | 99,22       | 71         | 72,15     | 101,62 |

(Sumber data Dinas PUPR Kab. Sarolangun)

### 3.1.1 Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik

Dari tabel 3.3. dapat diuraikan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2018, realisasi kinerjanya 72,15% dengan pencapaian sebesar 101,62%. Pada tahun 2019 realisasi 73,42% dengan pencapaian sebesar 99,22%. Sehingga jika dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami Penurunan sebesar 2,40%. Jika dilihat dari perbandingan realisasi tahun 2018 dan tahun 2019, pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2018.

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis. Analisis juga dilakukan terhadap indikator yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis.

Analisis tentang dua sasaran strategis yang ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sarolangun sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis pada akhir masa Rensta 2017-2022, disajikan sebagai berikut :





Sasaran strategis ini mencakup indikator Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik. Tingkat capaian kinerja indikator Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 857,41 km atau sebesar 99,22 %. Untuk lebih jelasnya pencapaian IKU tersebut diuraikan di bawah ini:

➤ *Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik*

Dalam peningkatan kualitas dan kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sarolangun dengan pekerjaan pembangunan jalan sebanyak 97 Pembangunan jalan, yang terdiri dari Pembangunan jalan sebanyak 55 jalan, Peningkatan jalan sebanyak 40 jalan , Peningkatan Jalan (DAK Fisik Reguler Pendukung Konektivitas) sebanyak 1 jalan dan DAK Afirmasi Transportasi sebanyak 1 jalan. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan realisasi fisik sebesar 100%.

Pada Tahun 2019 penanganan jalan di Kabupaten Sarolangun dilaksanakan pada 10 kecamatan yaitu : Kecamatan Sarolangun, Kecamatan Bathin VIII, Kecamatan Pelawan, Kecamatan Singkut, Kecamatan Pauh, Kecamatan Air Hitam, Kecamatan Mandiangin, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kecamatan Limun, dan Kecamatan Batang Asai. Adapun jenis penanganannya sebagai berikut :

- **Pembukaan Jalan Baru** sepanjang **16,228 km** dengan rincian Kecamatan Pelawan sepanjang 1,541 km, Kecamatan Sarolangun sepanjang 1,127 km, Kecamatan Bathin VIII sepanjang 7,344 km, dan Kecamatan Pauh sepanjang 6,216 km.



- **Pengaspalan Jalan** sepanjang **54,308 km** dengan rincian Kecamatan Limun sepanjang 1,266 km, Kecamatan Cermin Nan Gedang sepanjang 4,582 km, Kecamatan Singkut sepanjang 4,231 km, Kecamatan Sarolangun sepanjang 0,765 km, Kecamatan Bathin VIII sepanjang 3,59 km, Kecamatan Pauh sepanjang 3,131 km, Kecamatan Air Hitam sepanjang 11,109 km, dan Kecamatan Mandiingin sepanjang 8,218 km.
- **Rigid beton** sepanjang **6,701 km** dengan rincian Kecamatan Batang Asai sepanjang 0,798 km, Kecamatan Limun sepanjang 0,069 km, Kecamatan Cermin Nan Gedang sepanjang 0,75 km, Kecamatan Pelawan sepanjang 0,075 km, Kecamatan Singkut sepanjang 0,786 km, Kecamatan Sarolangun sepanjang 1,401 km, dan Kecamatan Pauh sepanjang 2,820 km.
- **Perkerasan Jalan** sepanjang **45,675 km** dengan rincian Kecamatan Batang Asai sepanjang 1,629 km, Kecamatan Limun sepanjang 1,913 km, Kecamatan Cermin Nan Gedang sepanjang 1,466 km, Kecamatan Pelawan sepanjang 12,166 km, Kecamatan Singkut sepanjang 6,432 km, Kecamatan Sarolangun sepanjang 10,303 km, Kecamatan Bathin VIII sepanjang 5,073 km, Kecamatan Pauh sepanjang 1,918 km, Kecamatan Air Hitam sepanjang 1,892 km dan Kecamatan Mandiingin sepanjang 2,882 km.

Terhadap penanganan jalan per kecamatan sebanyak 10 kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun, jalan yang tertangani sepanjang 857,41 km atau naik sebesar 1,27% dari tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :



- ✓ Panjang Jalan di Kecamatan Sarolangun sepanjang 151,33 km dengan kondisi baik sepanjang 114,63 km (75,75%), kondisi sedang sepanjang 3,70 km (2,45%), kondisi rusak ringan sepanjang 28,00 km (18,50%), dan kondisi rusak berat sepanjang 5,00 km (3,30%).
- ✓ Panjang Jalan di Kecamatan Bathin VIII sepanjang 88,97 km dengan kondisi baik sepanjang 54,07 km (60,77%), kondisi sedang sepanjang 17,10 km (19,22%), kondisi rusak ringan sepanjang 6,20 km (5,87%), dan kondisi rusak berat sepanjang 11,60 km (13,04%).
- ✓ Panjang Jalan di Kecamatan Pelawan sepanjang 86,00 km dengan kondisi baik sepanjang 55,10 km (64,07%), kondisi sedang sepanjang 7,10 km (8,26%), kondisi rusak ringan sepanjang 10,80 km (12,56%), dan kondisi rusak berat sepanjang 13,00 km (15,17%).
- ✓ Panjang Jalan di Kecamatan Singkut sepanjang 132,39 km dengan kondisi baik sepanjang 91,50 km (69,11%), kondisi sedang sepanjang 8,40 km (6,34%), kondisi rusak ringan sepanjang 17,05 km (12,88%), dan kondisi rusak berat sepanjang 15,44 km (11,66%).
- ✓ Panjang Jalan di Kecamatan Pauh sepanjang 114,57 km dengan kondisi baik sepanjang 63,42 km (55,35%), kondisi sedang sepanjang 3,60 km (3,14%), kondisi rusak ringan sepanjang 34,20 km (29,85%), dan kondisi rusak berat sepanjang 13,35 km (11,65%).
- ✓ Panjang Jalan di Kecamatan Air Hitam sepanjang 57,17 km dengan kondisi baik sepanjang 37,57 km (65,72%), kondisi sedang sepanjang 6,80 km (11,89%), kondisi rusak ringan sepanjang 5,40 km (9,45%), dan kondisi rusak berat sepanjang 7,40 km (12,94%).



- ✓ Panjang Jalan di Kecamatan Mandiangin sepanjang 132,27 km dengan kondisi baik sepanjang 110,15 km (82,65%), kondisi sedang sepanjang 11,12 km (8,34%), dan kondisi rusak berat sepanjang 12,00 km (9,00%).
- ✓ Panjang Jalan di Kecamatan Cermin Nan Gedang sepanjang 86,60 km dengan kondisi baik sepanjang 17,44 km (20,14%), kondisi sedang sepanjang 7,40 km (8,55%), kondisi rusak ringan sepanjang 28,66 km (33,09%), dan kondisi rusak berat sepanjang 33,10 km (38,22%).
- ✓ Panjang Jalan di Kecamatan Limun sepanjang 166,32 km dengan kondisi baik sepanjang 43,72 km (26,29%), kondisi sedang sepanjang 25,80 km (15,51%), kondisi rusak ringan sepanjang 33,60 km (20,20%), dan kondisi rusak berat sepanjang 63,20 km (38,00%).
- ✓ Panjang Jalan di Kecamatan Batang Asai sepanjang 151,20 km dengan kondisi baik sepanjang 101,50 km (75,10%), kondisi sedang sepanjang 15,40 km (10,19%), kondisi rusak ringan sepanjang 13,16 km (15,40%), dan kondisi rusak berat sepanjang 14,40 km (9,52%).

Pada tahun 2019 realisasi kinerja sebesar 73,42% terhadap target yang telah ditentukan sebesar 74%. Dari Panjang jalan Kabupaten Sarolangun sepanjang 1.167,82 km yang terakomodir dalam DPA SKPD sebesar 857,41 km dalam kondisi baik dan pada tahun 2018 realisasi kinerja sebesar 72,15% terhadap target yang telah ditentukan sebesar 71 % dari panjang jalan Kabupaten Sarolangun sepanjang 1.167,82 km yang terakomodir dalam DPA SKPD sebesar 842,61 km dalam kondisi baik dengan rumusan capaian :





Pada tahun 2018 :

$$\frac{\text{Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik ( 842, 61)}}{\text{Panjang Jalan Kabupaten Seluruhnya (1.167,82)}} \times 100 \% = 72,15\%$$

Pada tahun 2019 :

$$\frac{\text{Panjang Jalan Kabupaten Kondisi Baik ( 857,41)}}{\text{Panjang Jalan Kabupaten Seluruhnya (1.167,82)}} \times 100 \% = 73,42\%$$

Permasalahan/hambatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

- Disini dapat kita lihat perbandingan realisasi panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2018, 842,61 km dan pada tahun 2019 panjang jalan dalam kondisi baik 857,41 km, dapat kita lihat peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2019 sebesar **14,8 km yaitu sebesar 1,02 %** jika dibandingkan dengan target pada tahun 2019 realisasi memang tidak mengalami peningkatan namun kondisi panjang jalan dalam kondisi baik pada tahun 2019 tetap mengalami peningkatan. Tidak tercapainya realisasi terhadap target yang dicapai hal ini dikarenakan penyesuaian pekerjaan terhadap SK Jalan yang ditetapkan, akan tetapi tidak berpengaruh terhadap pekerjaan yang ada, secara pembangunan mengalami peningkatan pekerjaan, akan tetapi secara administrasi terhadap penyesuaian SK Jalan mengalami penurunan.

Solusi/strategis pemecahan masalah yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

- Akan dilakukan inventarisir dan identifikasi kembali terhadap pekerjaan-pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan dan disesuaikan dengan SK jalan terbaru guna percepatan pembangunan dan pemerataan wilayah di



kecamatan yang mana akan berdampak terhadap pertumbuhan perekonomian.

Realisasi dana dan Program yang mendukung untuk mencapai sasaran **Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan**, indikatornya adalah **Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik** yaitu :

1. **Program pembangunan jalan dan jembatan** dengan anggaran Rp.244.585.382.000 dan terealisasi sebesar Rp. 241.525.226.862,80 atau 98,75 %. Realisasi keuangan sebesar 98,75 % dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 99,22% maka terjadinya efisiensi pengguna sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

**TABEL 3.4**  
**PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 2**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2019**

| NO | SASARAN  | INDIKATOR KINERJA     | SATUAN | TAHUN 2019 |           |             | TAHUN 2018 |           |        |
|----|--|-----------------------|--------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|--------|
|    |  |                       |        | TARGET     | REALISASI | CAPAIAN (%) | TARGET     | REALISASI | %      |
| 2. | Terwujudnya Infrastruktur Listrik yang Memadai | Rasio Desa Berlistrik | %      | 90         | 91,28     | 101,4       | 89         | 95,97     | 107,84 |

(sumber data bagian ESDA Kab. Sarolangun)

### 3.1.2. **Rasio Desa Berlistrik**

Dapat kita lihat dari tabel diatas bahwasanya dimana Pemerintah Kabupaten Sarolangun menargetkan 89 % untuk memenuhi terwujudnya infrastruktur listrik, dan untuk tahun 2018 ini mencapai realisasi 95,97% , dengan capaian 107, 84%. Kemudian pada tahun 2019 terealisasi 91,28% dengan capaian 101,4 %. Disini artinya Kabupaten Sarolangun sukses dalam mengerjakan sasaran strategis yang telah ditetapkan didalam dokumen RPJMD. dan sifat indikator ini memang sangat



berperan penting didalam kehidupan masyarakat banyak karna semakin tingginya realisasi yg terwujud maka akan menjadi salah satu tolak ukur kemajuan suatu kabupaten, baik dari bidang pertumbuhan ekonomi yang ada Di kabupaten Sarolangun.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM nomor 38 tahun 2016 tentang percepatan elektrifikasi dipedesaan belum berkembang. Terpencil, perbatasan dan pulau kecil berpenduduk melalui pelaksanaan tenaga listrik skala kecil.

Disini dapat kita lihat penyebab keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam menerpakan sasaran terwujudnya infrastruktur listrik yang memadai, dimana Kabupaten Sarolangun mendapatkan alokasi anggaran melalui program listrik desa dari PT. PLN (persero) jambi, dimana tahun 2019 melalui program listrik desa Kabupaten Sarolangun sudah teraliri arus listrik sebanyak 10 desa, diantaranya sebagai berikut :

1. Desa Pulau Salak Baru
2. Desa Paniban Baru
3. Desa Muara Cuban
4. Desa Pekan Gedang
5. Desa Raden Anom
6. Desa Rantau Panjang
7. Desa Padang Jering
8. Desa Sungai Baung
9. Desa Sungai Bemban
10. Desa Lubuk Bangkar

Untuk tahun 2019, dengan jumlah desa sebanyak 149, yang sudah teraliri listrik sebanyak 136 desa dengan jenis pembangkit PLN , artinya sudah 136 desa yang teraliri listrik. Dan 13 desa lagi yang belum teraliri listrik, mudah-mudahan dalam



3 tahun kedepan seluruh desa yang ada di Kabupaten Sarolangun telah teraliri listrik keseluruhan desa. Desa yang belum teraliri listrik adalah sebagai berikut :

1. Desa Sungai Keradak Kecamatan Batang Asai
2. Desa Kasiro Kecamatan Batang Asai
3. Desa Kasiro Ilir Kecamatan Batang Asai
4. Desa Datuk Nan Duo Kecamatan Batang Asai
5. Desa Tambak Ratu Kecamatan Batang Asai
6. Desa Muara Air Dua Kecamatan Batang Asai
7. Desa Batu Empang Kecamatan Batang Asai
8. Desa Bukit Kelimau Ulu Kecamatan Batang Asai
9. Desa Muara Pemuat Kecamatan Batang Asai
10. Desa Bathin Pengambang Kecamatan Batang Asai
11. Desa Simpang Narso Kecamatan Batang Asai
12. Desa Bukit Sulah Kecamatan Batang Asai
13. Desa Bukit Berantai Kecamatan Batang Asai

Realisasi dana dan Program yang mendukung untuk mencapai sasaran Terwujudnya Infrastruktur Listrik yang Memadai, indikatornya adalah Rasio Desa Berlistrik yaitu :

1. ***Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monitoring Bidang Sumber Energi Daya Mineral (ESDM)*** dengan anggaran Rp.198.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 197.969.882 atau 99,98 %. Realisasi keuangan sebesar 99,98% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 101,4% maka terjadi efisiensi pengguna sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.





**TABEL 3.5**  
**PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 3**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2019**

| NO | SASARAN  | INDIKATOR KINERJA                              | SATUAN | TAHUN 2019 |           |             | TAHUN 2018 |           |        |
|----|--|--|--------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|--------|
|    |  |  |        | TARGET     | REALISASI | CAPAIAN (%) | TARGET     | REALISASI | %      |
| 3. | Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Irigasi dan Air Bersih | Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik | %      | 32,47      | 43,59     | 134,25      | 30         | 37,93     | 126,44 |
|    |  | Akses Terhadap Air Minum Layak                 | %      | 70         | 21,88     | 31,26       | 67         | 53,34     | 76,94  |

(Sumber data Dinas PUPR Kab. Sarolangun)

### 3.1.3. *Persentase Panjang DI/Jaringan Irigasi Kondisi Baik*

Dari tabel 3.5. dapat diuraikan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik pada tahun 2018, realisasi kinerjanya 37,93% dengan pencapaian sebesar 126,44%. Pada tahun 2019 realisasi 43,59% dengan pencapaian sebesar 134,25%. Sehingga jika dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami Kenaikan sebesar 7,81%.

Sasaran strategis ini mencakup indikator Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik, dan Persentase akses terhadap air minum layak. Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik sebesar 134,25%, dan Akses terhadap air minum layak sebesar 31,26%. Untuk lebih jelasnya, masing-masing pencapaian IKU tersebut diuraikan di bawah ini:

#### ➤ *Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik*

Jaringan Irigasi adalah salah satu infrastruktur yang merupakan bagian utama dalam upaya peningkatan Ketahanan Pangan. Di dalam upaya peningkatan kinerja, sasaran 2 (dua) didukung oleh 2 indikator kinerja yaitu Persentase



Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik (dibangun/ditingkatkan dan dioperasikan/dipelihara) dan akses terhadap air minum layak.

Untuk mendukung sasaran 2 (dua), maka Ditjen Sumber Daya Air berupaya untuk membangun/meningkatkan serta melakukan pemeliharaan dan pengoperasian pelayanan irigasi dan rawa di beberapa tempat. Dengan infrastruktur jaringan irigasi yang handal, maka akan mudah suplai kebutuhan air bagi para petani, sehingga hasil panen akan meningkat. Sementara itu, peningkatan/pemeliharaan jaringan rawa dilakukan untuk meningkatkan fungsi dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat terutama dalam peningkatan produksi pangan serta mempercepat pembangunan daerah.

Dari total kewenangan Daerah Irigasi Kabupaten yaitu seluas 7.962 Ha dengan 139 lokasi Daerah Irigasi, pada Tahun 2019 Daerah Irigasi yang terbangun sebanyak 6 lokasi Daerah Irigasi, yang terdiri dari 2 lokasi Pembangunan Jaringan Daerah Irigasi yang di tangani oleh Dana APBD dengan total panjang saluran terbangun sepanjang .P. 226 meter antara lain:

- Pembangunan Irigasi Sawah di Desa Panti Kecamatan Sarolangun yaitu Pembangunan Saluran .P. 126 m’.
- ✓ Pembangunan Saluran Irigasi DI. Marga Rahayu Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam yaitu Pembangunan Saluran .P. 100 m’.

Dan 4 lokasi Pembangunan jaringan Daerah Irigasi yang di tangani oleh Dana DAK dengan luas 364 Ha dan total panjang saluran yang terbangun sepanjang 2.591,6 meter antara lain:

1. Kecamatan Batang Asai :



✓ Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sei. Besa Desa Desa Ma. Cuban Kecamatan Batang Asai yaitu Pembangunan Saluran .P. 911 m’.

✓ Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sei. Sekuang Kecamatan Batang Asai yaitu Pembangunan Saluran .P. 366 m’.

## 2. Kecamatan Air Hitam :

✓ Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sei. Jernih Desa Jernih Kecamatan Air Hitam (Lanjutan) yaitu Pembangunan Saluran .P. 664,6 m’.

## 3. Kecamatan Singkut :

✓ Rehilitasi Jaringan Irigasi DI. Perdamaian Kec. Singkut (Lanjutan) yaitu Pembangunan tanggul .P. 200 m’ Saluran .P. 250 m’.

Tercapainya target realisasi sebesar 43,59% terhadap target yang telah ditentukan sebesar 32,47% merupakan suatu prestasi yang membanggakan hal ini dikarenakan dari luas irigasi di Kabupaten Sarolangun seluas 7.962 Ha yang terakomodir dalam DPA SKPD seluas 3.020 Ha pada tahun 2018 dan 364 Ha pada tahun 2019 dalam kondisi baik dengan rumusan capaian :

$$\frac{\text{Luas Irigasi Kabupaten Kondisi Baik (3.384)}}{\text{Luas Irigasi Seluruhnya (7.762)}} \times 100\% = 43,59\%$$

Permasalahan/hambatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

- Dari segi pencapaian target dan realisasi di tahun 2019 hanya sebesar 43, 59% hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran yang terakomodir, namun dari segi pembangunan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 3.084 Ha atau 364 Ha di tahun 2019, atau naik sebesar 11,12%.



Solusi/strategis pemecahan masalah yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

Dalam hal pencapaian target, akan di akomodir lebih pada peningkatan kualitas hasil yang merupakan tolok ukur suatu keberhasilan pembangunan dengan cara menambah anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan irigasi dalam Kabupaten Sarolangun.

#### **3.1.4. Akses Air Minum Layak**

Indikator Kinerja Akses terhadap air minum layak pada tahun 2018, realisasi kinerjanya 53,34% dengan pencapaian sebesar 79,62%. Pada tahun 2019 realisasi 21,88% dengan pencapaian sebesar 31,26%. Sehingga jika dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami Penurunan sebesar 48,36%.

Untuk meningkatkan jumlah layanan air minum yang layak, dilakukan melalui pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM). Dengan Pembangunan sistem penyediaan air minum/Air Bersih, dengan sambungan rumah terbangun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sebanyak 1,250 unit di hibah kan ke PDAM, dan pada tahun 2019 sambungan rumah terbangun sebanyak 2.316 unit di hibahkan ke PDAM dan KPSPAM. Jadi total sambungan rumah terbangun sampai tahun 2019 sebanyak 3.566 unit.

Pada tahun 2019 realisasi kinerja sebesar 21,88% terhadap target yang telah ditentukan sebesar 70%, dari Jumlah seluruh Penduduk sebanyak 277.475 Jiwa, pada tahun 2019 penduduk yang memiliki akses air minum sebanyak 60.704 unit dengan rumusan capaian :

$$\frac{\text{Penduduk yang memiliki Akses Air Minum Layak}}{\text{Jumlah Seluruh Penduduk (277.475)}} \times 100\% = 21,88$$

**Jumlah Seluruh Penduduk (277.475)**





Permasalahan/hambatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

- Tidak tercapainya target capaian realisasi di tahun 2019 di karenakan jumlah anggaran yang terakomodir dalam DPA SKPD tidak sepenuhnya tercapai, hal ini kerena masih banyaknya jumlah penduduk yang setiap tahun bertambah sedangkan akses air minum layak berkurang.

Solusi/strategis pemecahan masalah yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

- Akan dilakukan inventalisir dan identifikasi suatu perluasan akses air minum layak yang masih sangat di butuhkan masyarakat khususnya daerah-daerah yang memang benar-benar membutuhkan agar apa yang menjadi tujuan visi misi pembangunan di Kabupaten Sarolangun terpenuhi.

Realisasi dana dan Program yang mendukung untuk mencapai sasaran **Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Irigasi dan Air Bersih, indikatornya adalah :**

**1. Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik**

**2. Akses Terhadap Air Minum Layak**

1. ***Program Pengembangan dan Pengelola Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya*** dengan anggaran Rp.4.124.773.000 dan terealisasi sebesar Rp.3.835.863.131,00 atau 93,00%. Realisasi keuangan sebesar 93,00% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 134,25% maka terjadi efesiensi pengguna sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



2. **Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah** dengan anggaran Rp. 17.351.444.000 dan terealisasi sebesar Rp. 16.491.739.700,00 atau 95,05%. Realisasi keuangan sebesar 95,05% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 31,26% maka tidak terjadi efesiensi pengguna sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

**TABEL 3.6**  
**PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 4**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2019**

| NO | SASARAN  | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN | TAHUN 2019 |           |             | TAHUN 2018 |           |       |
|----|--|--|--------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------|
|    |  |  |        | TARGET     | REALISASI | CAPAIAN (%) | TARGET     | REALISASI | %     |
| 4. | Meningkatnya Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Lainnya | Rasio Ruang Kelas Terhadap Siswa SD                          | %      | 23         | 21        | 109,52      | 24         | 21        | 87,5  |
|    |  | Rasio Ruang Kelas Terhadap Siswa SMP                         | %      | 24         | 22        | 109,09      | 25         | 23        | 92,00 |
|    |  | Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk Per 30.000 Penduduk | %      | 17,961     | 19,585    | 90,96       | 18.453     | 19.585    | 94,22 |

(Sumber data DISDIKBUD, DINKES Kab. Sarolangun)

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018, maka dapat kita lihat :

- Pada tahun 2019 untuk Rasio Ruang Kelas Terhadap Siswa SD mempunyai target 23 % yang terealisasi sebesar 21 % sama seperti realisasi tahun 2018 yaitu 21 %.
- Pada tahun 2019 untuk Rasio Ruang Kelas Terhadap Siswa SMP mempunyai target 24 % yang terealisasi sebesar 22 % mengalami peningkatan dari tahun 2018 yaitu 23%.



- SD yang Terakreditasi dari target 93,00 % dapat terealisasi sebesar 89,19 % menurun dari realisasi tahun 2018 91,73 %.
- SMP yang Terakreditasi dari target 87,00 % dapat terealisasi sebesar 87,50 % menurun dari realisasi tahun 2018 89,40 %.

### ***3.1.5. Rasio Ruang Kelas Terhadap Siswa SD***



Jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan, pada tahun 2019 indikator kinerja ini telah

berhasil mencapai target. Dari target yang ditetapkan sebesar 23 Siswa/kelas berhasil terealisasi sebesar 21 Siswa/kelas dengan persentase capaian kinerja sebesar 109,52%.

Pada tahun 2019 jumlah siswa SD seluruh kecamatan sebanyak 33.365 siswa, sedangkan Jumlah kelas SD yang ada di seluruh kecamatan sebanyak 1625 ruang. Pencapaian target Indikator Kinerja sebesar 109,52% dilakukan melalui dana APBD RKB SD sebanyak 8 Ruang, RKB untuk MI 3 ruang dan melalui dana DAK RKB SD 7 Ruang, Rehab SD APBD 2 Lokal, dan Rehab SD DAK 291 Ruang.

Dengan banyaknya pembangunan infrastruktur sekolah baik dari Pusat maupun pemda maka Rasio Ruang Kelas Terhadap Siswa SD dapat tercapai, walaupun masih terdapat kekurangan seperti kurang meratanya sebaran siswa yang sekolah pada daerah-daerah tertentu, sehingga apabila dilihat di





lapangan masih terdapat sekolah yang Rasio Ruang Kelas Terhadap Siswa SD masih di atas 23 siswa perkelas, dimana kebanyakan berada di sekolah sekolah yang terdapat di Kota.

### ***3.1.6. Rasio Ruang Kelas Terhadap Siswa SMP***



Jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan, pada tahun 2019 indikator kinerja ini telah berhasil mencapai

target. Dari target yang di tetapkan sebesar 24 Siswa/kelas berhasil terealisasi sebesar 22 Siswa/kelas dengan persentase capaian kinerja sebesar 109,09%. Pada tahun 2019 jumlah siswa SMP seluruh kecamatan sebanyak 10.102 siswa, sedangkan Jumlah kelas SMP yang ada di seluruh kecamatan sebanyak 456 ruang. Pencapaian target Indikator Kinerja sebesar 109,09% dilakukan melalui dana DAK RKB SMP 4 Lokal dan melalui dana DAK Rehab SMP 43 Ruang.

Dengan banyaknya pembangunan infrastruktur sekolah baik dari Pusat maupun pemda maka Rasio Ruang Kelas Terhadap Siswa SMP dapat tercapai, walaupun masih terdapat kekurangan seperti kurang meratanya sebaran siswa yang sekolah pada daerah-daerah tertentu, sehingga apabila dilihat di lapangan masih terdapat sekolah yang Rasio Ruang Kelas Terhadap Siswa SMP masih di atas 24 siswa perkelas, dimana kebanyakan berada di sekolah sekolah yang terdapat di Kota.





Upaya dan Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah :

- a. Perlu adanya update data masyarakat secara berkala setiap setahun sekali agar data rata-rata lama sekolah bisa lebih akurat.
- b. Meningkatkan kesadaran kepada orang tua agar menyekolahkan anaknya sesuai dengan usia sekolah.
- c. Meningkatkan kualitas sekolah di daerahnya agar membuat siswa menjadi berkeinginan untuk melanjutkan sekolah di daerahnya masing-masing.
- d. Meningkatkan kualitas guru dengan cara melakukan seleksi guru secara selektif dan wajib minimal memiliki pendidikan S1/D-IV agar dapat meningkatkan kualitas murid.
- e. Perlu adanya tindakan melalui surat perjanjian agar peserta tes seleksi BUD IPB tidak lagi menolak kelulusan tes pada IPB karena mengambil kuliah di Universitas yang lain.

### ***3.1.7. Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk per 30.000 Penduduk***

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat disebutkan bahwa setiap kecamatan harus memiliki puskesmas, dan dalam kondisi tertentu 1 kecamatan boleh lebih dari 1 puskesmas dengan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk dan aksesibilitas. Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa seluruh masyarakat yang ada di wilayahnya masing-masing harus memiliki akses terhadap sarana pelayanan kesehatan yang merata dan berkeadilan sehingga dapat terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Puskesmas mempunyai fungsi sebagai penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat



pertama di wilayah kerjanya dan penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya. Pencapaian Misi 1 di bidang kesehatan yaitu penyediaan sarana pelayanan kesehatan dengan standar per satuan 30.000 jiwa penduduk untuk Kabupaten Sarolangun sudah tercapai sejak tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.6.1**  
**Persebaran Puskesmas per Kecamatan**  
**Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun Tahun 2019**

| No. | Nama Kecamatan    | Jumlah Penduduk | Nama Puskesmas                                 |
|-----|-------------------|-----------------|--|
| 1.  | Sarolangun        | 55.684 Jiwa     | Puskesmas Sarolangun<br>Puskesmas Sungai baung |
| 2.  | Bathin VIII       | 23.829          | Puskesmas Limbur Tembesi                       |
| 3.  | Pelawan           | 37.427          | Puskesmas Pelawan                              |
| 4.  | Singkut           | 41.254          | Puskesmas Singkut<br>Puskesmas Singkut V       |
| 5.  | Limun             | 18.085          | Puskesmas Pulau Pandan<br>Puskesmas Mersip     |
| 6.  | Pauh              | 27.471          | Puskesmas Pauh<br>Puskesmas Sepintun           |
| 7.  | Air Hitam         | 31.125          | Puskesmas Jernih<br>Puskesmas Pematang Kabau   |
| 8.  | Mandiingin        | 42.322          | Puskesmas Mandiingin<br>Puskesmas Butang Baru  |
| 9.  | Cermin Nan Gedang | 17.209          | Puskesmas Cermin Nan Gedang                    |
| 10. | Batang Asai       | 18.967          | Puskesmas Batang Asai                          |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 1 kecamatan dibandingkan dengan jumlah penduduk masing-masing kecamatan minimal sudah memiliki 1 unit puskesmas yaitu sebanyak 4 kecamatan dan 6 kecamatan dengan 2 unit puskesmas. Pencapaian indikator ini sudah terapai sejak tahun 2014 dimana Kabupaten Sarolangun sejak saat itu sudah memiliki 16 unit puskesmas. Kondisi ini diharapkan sudah dapat memenuhi harapan masyarakat dalam hal penyediaan



sarana pelayanan kesehatan dalam mendekatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Realisasi dana dan Program yang mendukung untuk mencapai sasaran **Meningkatnya Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan lainnya, indikatornya adalah :**

1. **Rasio Ruang Kelas Terhadap Siswa SD**
2. **Rasio Ruang Kelas Terhadap Siswa SMP**
3. **Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk Per 30.000 Penduduk**
  1. ***Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun*** dengan anggaran Rp. 64.14.80.08.000 dan terealisasi sebesar Rp 62.743.208.761,00 atau 97,81%. Realisasi keuangan sebesar 97,81% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 109,305% maka terjadi efisiensi pengguna sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.
  2. ***Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringan*** dengan anggaran Rp. 5.284.199.000 dan terealisasi sebesar Rp. 4.941.610.523 atau 93,52%. Realisasi keuangan sebesar 93,52% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 90,96% maka tidak terjadi efisiensi pengguna sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

**TABEL 3.7**  
**PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 5**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2019**

| NO | SASARAN                          | INDIKATOR KINERJA                 | SATUAN | TAHUN 2019 |           |             | TAHUN 2018 |           |        |
|----|----------------------------------|-----------------------------------|--------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|--------|
|    |                                  |                                   |        | TARGET     | REALISASI | CAPAIAN (%) | TARGET     | REALISASI | %      |
| 5. | Meningkatnya Kualitas Pendidikan | Persentase SD yang Terakreditasi  | %      | 93         | 89,19     | 95,90       | 92         | 91,73     | 99,71  |
|    |                                  | Persentase SMP yang Terakreditasi | %      | 87         | 87,50     | 100,57      | 86         | 89,40     | 103,95 |

(sumber data DISDIKBUD Kab. Sarolangun)



### **3.1.8. Persentase SD Yang Terakreditasi**

Jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan, pada tahun 2019 indikator kinerja ini Mengalami penurunan. Dari target yang di tetapkan sebesar 93,00% berhasil terealisasi sebesar 89,19% dengan persentase capaian kinerja sebesar 95,90%.

Pada tahun 2019 Jumlah SD/MI yang terakreditasi sebesar 231 sekolah, sedangkan Jumlah SD/MI Seluruh Kecamatan sebesar 259 Sekolah. Dibandingkan dengan capaian SD/MI yang Terakreditasi tahun 2018 sebesar 91,73%, terdapat penurunan sebesar 0,97%. Pencapaian target Indikator Kinerja sebesar 89,19% dilakukan melalui Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Sekolah, Pendampingan Operator Dapodik, Pemberian Bea Siswa SD/SMP yang berprestasi, dan Pendamping Operator Penjamin Mutu Pendidikan (PMP).

Dengan gencarnya pelaksanaan Akreditasi Sekolah baik dari Pusat dan dari daerah membuat capaian Sekolah yang Terakreditasi semakin meningkat dari tahun sebelumnya walaupun tidak tercapai bila dilihat dari target yang di tetapkan, hal ini sesuai dengan program pemerintah agar dapat meningkatkan kualitas Pendidikan melalui akreditasi yang telah dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas Pendidikan khususnya di daerah kabupaten Sarolangun.

### **3.1.9. Persentase SMP Yang Terakreditasi**

Jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan, pada tahun 2019 indikator kinerja ini Mengalami peningkatan. Dari target yang di tetapkan sebesar 87,00% berhasil terealisasi sebesar 87,50% dengan persentase capaian kinerja sebesar 100,57%.





Pada tahun 2019 Jumlah SMP/MTs yang terakreditasi sebesar 105 sekolah, sedangkan Jumlah SMP/MTs Seluruh Kecamatan sebesar 120 Sekolah. Dibandingkan dengan capaian SMP/MTs yang Terakreditasi tahun 2018 sebesar 89,40%, terdapat penurunan sebesar 0,98%. Pencapaian target Indikator Kinerja sebesar 87,50% dilakukan melalui Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Sekolah, Pendampingan Operator Dapodik, Pemberian Bea Siswa SD/SMP/SMA yang berprestasi, dan Pendamping Operator Penjamin Mutu Pendidikan (PMP).

Dengan gencarnya pelaksanaan Akreditasi Sekolah baik dari Pusat dan dari daerah membuat capaian Sekolah yang Terakreditasi semakin meningkat dari tahun sebelumnya, hal ini sesuai dengan program pemerintah agar dapat meningkatkan kualitas Pendidikan melalui akreditasi yang telah dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas Pendidikan khususnya di daerah kabupaten Sarolangun.

Realisasi dana dan Program yang mendukung untuk mencapai sasaran **Meningkatnya Kualitas Pendidik, indikatornya adalah :**

- 1. SD yang Terakreditasi**
- 2. SMP yang Terakreditasi**

1. ***Program Pengembangan Manajemen Pelayanan Pendidik*** dengan anggaran Rp. 320.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 320.000.000 atau 100%. Realisasi keuangan sebesar 100% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 98,235% maka tidak terjadi efisiensi pengguna sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



**TABEL 3.8**  
**PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 6**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2019**

| NO | SASARAN                                    | INDIKATOR KINERJA                  | SATUAN         | TAHUN 2019 |           |             | TAHUN 2018 |           |        |
|----|--|------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|--------|
|    |  |                                    |                | TARGET     | REALISASI | CAPAIAN (%) | TARGET     | REALISASI | %      |
| 6. | Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat | Angka Harapan Hidup                | Tahun          | 68,86      | 68,94     | 100,12      | 68,83      | 68,83     | 100    |
|    |  | Angka Kematian Bayi (AKB)          | Per 1.000 KH   | 3,5        | 3,7       | 88,57       | 3,7        | 3,4       | 108,82 |
|    |  | Angka Kematian Ibu (AKI)           | Per 100.000 KH | 2,2        | 64,4      | 121,65      | 82,5       | 64,05     | 122,36 |
|    |  | Prevelence Balita Gizi Buruk       | 0.10%          | 0,08       | 0,04      | 150         | 0,1        | 0,07      | 130    |
|    |  | Contraceptive Prevalence Rate      | %              | 69         | 72.88     | 105         | 68         | 72,72     | 106    |
|    |  | Persentase Puskesmas Terakreditasi | %              | 80         | 100       | 125         | 40         | 68,75     | 171,88 |

(sumber data DINKES Dan DISP2KB )

### 3.1.10. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup adalah jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke x. ukuran yang umum digunakan adalah harapan hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan saat itu. Capaian indikator angka harapan hidup pada tahun 2019 adalah sebesar 100.12% dengan capaian kinerja nyata 68.94 tahun, capaian sudah melebihi target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun 2018 capain indikator ini meningkat dari 68.83 tahun pada tahun 2018 menjadi 68.94 pada tahun 2019.

Faktor yang mendorong tercapainya target indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Sarolangun.



2. Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang semakin meningkat dimana saat ini rata-rata satu puskesmas melayani 19.585 jiwa. 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Sarolangun sudah memiliki minimal 1 unit puskesmas. Selain itu juga fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia termasuk 51 unit puskesmas pembantu dan 102 unit pos kesehatan desa.
3. Kualitas lingkungan hidup masyarakat yang semakin baik, hal ini dibuktikan dengan Kabupaten Sarolangun memperoleh penghargaan *swasti saba* kabupaten/kota sehat dari Kementerian Kesehatan RI.
4. Pemahaman masyarakat tentang upaya promotif dan preventif bidang kesehatan semakin meningkat dengan semakin meningkatnya kegiatan promosi kesehatan di seluruh desa.

#### **3.1.11. Angka Kematian Ibu**

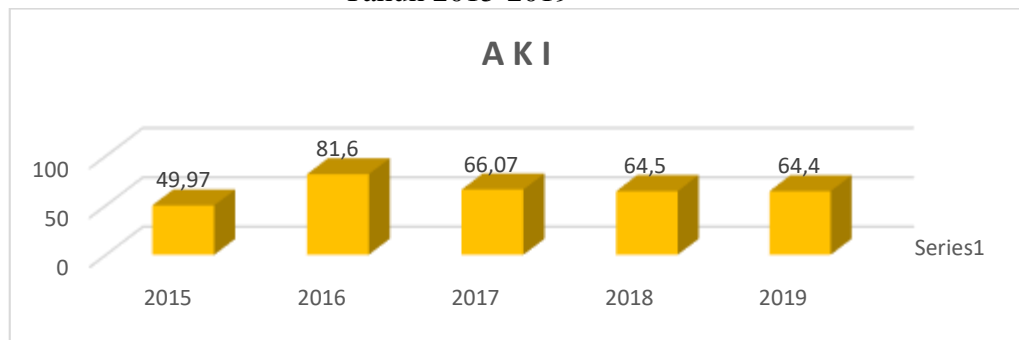
Untuk melihat risiko yang dihadapi oleh ibu hamil selama proses kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian komplikasi selama kehamilan dan kelahiran, serta gambaran tersedianya dan penggunaan fasilitas kesehatan pelayanan prenatal dan obstetri. Angka Kematian ibu adalah jumlah kematian ibu karena kehamilan, persalinan, masa nifas dalam suatu wilayah dan periode tertentu. Cara perhitungannya adalah jumlah kematian ibu karena kehamilan, persalinan, masa nifas dalam suatu wilayah dan periode tertentu dibandingkan dengan jumlah lahir hidup dalam waktu dan periode yang sama x 100.000 Kelahiran Hidup. Capaian Indikator Kinerja Angka Kematian Ibu pada tahun 2019 adalah sebesar 121.65% dengan capaian kinerja nyata sebesar



64.4 per 100.000 Kelahiran Hidup melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 82.2 per 100.000 Kelahiran Hidup.

Bila melihat perkembangan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Sarolangun dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 1  
Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Sarolangun  
Tahun 2015-2019



Angka Kematian Ibu pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami penurunan dari 64.5 per 100.000 Kelahiran Hidup tahun 2018 menjadi 64.4 per 100.000 Kelahiran Hidup.

Faktor tercapainya target AKI yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan sudah meningkat dengan tercapainya persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar.
2. Meningkatnya kompetensi tenaga kesehatan untuk penanganan kegawatdaruratan neonatal untuk tingkat puskesmas.
3. Adanya kerjasama dengan organisasi profesi dalam melakukan pembinaan dan pelayanan neonatus dan bayi.
4. Adanya upaya aktif tenaga kesehatan untuk menjaring ibu hamil di wilayah kerjanya untuk memeriksakan kehamilan ke fasilitas kesehatan.





5. Meningkatnya penanganan komplikasi kebidanan dan penguatan sistem rujukan.
6. Adanya kegiatan Audit Maternal Perinatal secara rutin untuk melakukan pemantauan, evaluasi sebagai upaya pencegahan terjadinya kejadian kematian ibu dan kematian bayi.
7. Meningkatnya kegiatan promosi kesehatan melalui kelas ibu hamil.
8. Jumlah fasilitas kesehatan baik primer maupun sekunder dalam pelayanan ibu dan anak sudah mencukupi dan mudah diakses.
9. Adanya jaminan kesehatan (BPJS dan Jampersal) untuk menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan ibu dan bayi.

Adapun Penyebab Kematian Ibu terbanyak adalah seperti pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.8.1**  
**Penyebab Kematian Ibu**  
**Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun**  
**Tahun 2019**

| No | Penyebab Kematian        | Jumlah  |
|----|--------------------------|---------|
| 1. | Gangguan peredaran darah | 1 kasus |
| 2. | Riwayat jantung          | 1 kasus |
| 3. | Ketuban pecah dini       | 1 kasus |
| 4. | Partus lama              | 1 kasu  |

### **3.1.12. Angka Kematian Bayi**

Angka Kematian Bayi adalah untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi.



Angka kematian bayi adalah jumlah kematian bayi di bawah usia 1 tahun di wilayah tertentu selama 1 tahun. Cara perhitungannya adalah jumlah kematian bayi di bawah usia 1 tahun di wilayah tertentu selama 1 tahun dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup di wilayah dan periode waktu yang sama dikali 1000 kelahiran hidup.

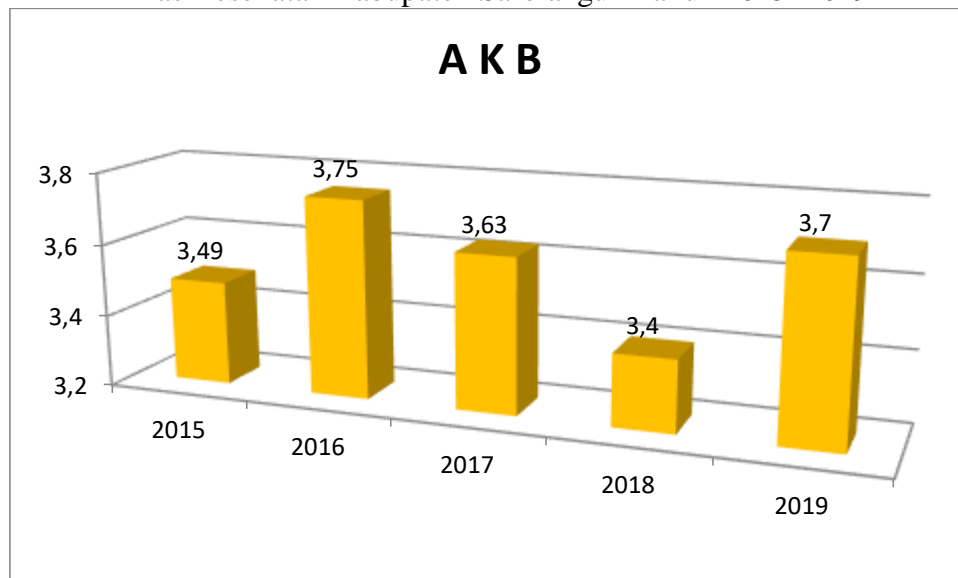
Capaian kinerja angka kematian bayi pada tahun 2019 adalah sebesar 88.57% dengan capaian kinerja nyata sebesar 3.7 per 1000 Kelahiran Hidup belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 3.5 per 1000 Kelahiran Hidup. Ukuran keberhasilan dari indikator ini bila realisasinya ada dibawah target, artinya semakin kecil angka realisasinya maka kinerjanya semakin baik.

Faktor penghambat belum tercapainya target ini adalah karena:

1. NICU di fasilitas kesehatan rujukan Kabupaten Sarolangun belum ada sampai dengan saat ini.
2. Belum semua tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan terlatih penanganan komplikasi pada neonatus dikarenakan tingginya rotasi pegawai di fasilitas kesehatan.
3. Tidak semua sasaran ibu hamil KEK termonitor oleh tenaga kesehatan dengan baik dikarenakan domisili yang berpindah-pindah karena faktor pekerjaan ibu sebagai petani dan pekerja kebun.



**Grafik 2**  
**Perkembangan Angka Kematian Bayi**  
**Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun Tahun 2015- 2019**



Adapun penyebab kematian bayi di Kabupaten Sarolangun dapat dilihat seperti pada tabel dibawahn ini:

**Tabel 3.8.2**  
**Penyebab Kematian Bayi**  
**Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun**  
**Tahun 2019**

| No | Penyebab Kematian | Jumlah  | % |
|----|-------------------|---------|---|
| 1. | BBLR              | 8 kasus |   |
| 2. | Prematur          | 4 kasus |   |
| 3. | Aspiksia          | 3 kasus |   |
| 4. | Kelainan Paru     | 1 kasus |   |
| 5. | Lain-lain         | 6 kasus |   |
| 6. | Infeksi           | 1 kasus |   |



### **3.1.13. Prevelensi Balita Gizi Buruk**

Untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat, salah satu indikator yang digunakan untuk melihat penurunan jumlah penderita balita gizi buruk di Kabupaten Sarolangun. Balita gizi buruk adalah jumlah balita gizi buruk dalam periode tertentu. Cara perhitungan: persentase dari jumlah balita gizi buruk dibagi dengan jumlah balita seluruhnya x 100%.

Capaian kinerja Indikator Prevalensi Balita Gizi Buruk pada tahun 2019 adalah sebesar 150% dengan capaian kinerja nyata 0.04% sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 0.08%.

Faktor yang mendorong tercapainya target tersebut adalah sebagai berikut:

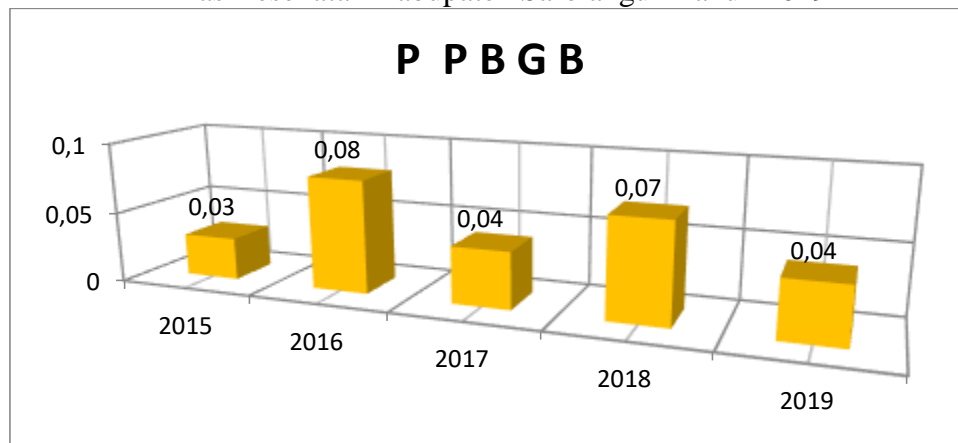
1. Surveilen gizi sudah berjalan dengan baik sehingga sasaran balita gizi buruk sudah dapat terjaring secara optimal dan sistem kewaspadaan dini sudah berjalan dengan baik.
2. Balita gizi buruk tidak seluruhnya disebabkan oleh kurangnya asupan makanan tetapi sebagai akibat menderita penyakit infeksi.
3. Meningkatnya sosialisasi pola asuh anak yang dilaksanakan oleh seluruh puskesmas di setiap wilayah kerjanya.
4. Seluruh kasus balita gizi buruk yang dilaporkan telah mendapatkan tatalaksana sesuai prosedur baik di tingkat puskesmas dan tingkat rujukan.
5. Pelaksanaan kelas ibu dan balita sudah menjadi kegiatan rutin di seluruh wilayah kerja puskesmas sehingga mendorong kesadaran masyarakat akan kesehatan ibu dan balitanya.

Perkembangan cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan dapat dilihat pada grafik dibawah ini:





Grafik 3  
Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Buruk  
Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun Tahun 2019



Jika dibandingkan dengan tahun 2018 prevalensi balita gizi buruk mengalami penurunan dari 0.07% menjadi 0.04% pada tahun 2019.

#### **3.1.14. *Persentase Puskesmas Terakreditasi***

Agar Puskesmas dapat menjalankan fungsinya secara optimal diperlukan adanya pengelolaan organisasi puskesmas secara baik yang meliputi kinerja pelayanan, proses pelayanan, serta sumber daya yang digunakan. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka upaya peningkatan mutu, manajemen risiko dan keselamatan pasien di puskesmas serta menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Untuk menjamin bahwa perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen risiko dilaksanakan secara berkesinambungan di Puskemas, diperlukan adanya penilaian oleh pihak eksternal dengan menggunakan standar yang ditetapkan, yaitu melalui mekanisme akreditasi. Tujuan utama akreditasi puskesmas adalah untuk pembinaan peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu, sistem penyelenggaraan pelayanan



serta program dan penerapan manajemen risiko. Tentu saja akreditasi ini bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat akreditasi.

Capaian kinerja akreditasi puskesmas pada tahun 2019 adalah 125% dengan capaian kinerja nyata 100% sudah melampaui target yang ditetapkan.

Adapun faktor yang mendorong tercapainya target ini adalah:

1. Tingginya minat puskesmas agar puskesmasnya segera mendapatkan pengakuan akreditasi puskesmas.
2. Tersedianya pembiayaan pelaksanaan akreditasi puskesmas yang bersumber dari dana DAK non fisik.

Status akreditasi seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Sarolangun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.8.3**  
**Status Akreditasi Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun sampai dengan tahun 2019**

| No. | Nama Puskesmas              | Status Akreditasi |
|-----|-----------------------------|-------------------|
| 1.  | Puskesmas Pauh              | Madya             |
| 2.  | Puskesmas Sarolangun        | Dasar             |
| 3.  | Puskesmas Singkut           | Madya             |
| 4.  | Puskesmas Mandiingin        | Dasar             |
| 5.  | Puskesmas Pematang Kabau    | Madya             |
| 6.  | Puskesmas Pulau Pandan      | Madya             |
| 7.  | Puskesmas Limbur Tembesi    | Dasar             |
| 8.  | Puskesmas Batang Asai       | Madya             |
| 9.  | Puskesmas Singkut V         | Dasar             |
| 10. | Puskesmas Butang Baru       | Madya             |
| 11. | Puskesmas Cermin Nan Gedang | Dasar             |
| 12. | Puskesmas Air Hitam         | Madya             |
| 13. | Puskesmas Sungai Baung      | Madya             |
| 14. | Puskesmas Pelawan           | Madya             |
| 15. | Puskesmas Mersip            | Madya             |



### 3.1.15. *Contraceptive Prevalence Rate*

Indikator Contraceptive prevalence Rate (CPR) adalah Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif (PA/PUS) dari target tahun 2019 sebesar **69 %** dapat terealisasi sebesar **72.88 %**, dan pada tahun 2018 terealisasi sebesar **72,72%**, artinya ada peningkatan capaian realisasi di tahun 2019 sebesar **0,9 %**. Ketercapaian melebihi dari target yaitu adanya partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi dan berdasarkan jumlah pasangan usia subur sebanyak **52.571** orang terdapat jumlah peserta KB Aktif sebanyak **38.315** orang atau sebesar **72.88 %**.

Faktor pendorong tercapainya target adalah Partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi, selain pelayanan di KKB dan RSD dan KKB Swasta, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun (DPPKB) Juga mengadakan Pelayanan KB Keliling dan Pelayanan KB Daerah tertentu /Glasitas serta pelayanan dengan dinas instansi terkait seperti, IBI, TNI dan unsur masyarakat lainnya.

Contraceptive prevalence Rate (CPR) merupakan ukuran kependudukan yang berkaitan dengan penggunaan kontrasepsi dan CPR dapat membantu penurunan tingkat kemiskinan dalam jangka panjang.

**Tabel. 3.8.4. Formulasi IKU**

| NO       | Indikator Kinerja                   | Formulasi                                      | Capaian                  |
|----------|-------------------------------------|--|--------------------------|
| <b>1</b> | Contraceptive prevalence Rate (CPR) | $\frac{38.315}{52.571} \times 100\% = 72.88\%$ | Tercapai melebihi target |

Secara umum kegiatan sudah berjalan sebagaimana rencana karena tiap bidang sudah ada program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok



masing – masing. Tetapi ada beberapa masalah yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan, diantaranya adalah

**Penyebab Penurunan Kinerja :**

- Belum optimalnya anggaran dalam rangka memenuhi sarana dan prasarana untuk mendukung program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Sarolangun;
- Belum memadainya sumber daya manusia untuk menunjang kelancaran aktifitas kerja pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Sarolangun;
- Masih kurang dukungan dari masyarakat (stakeholder) seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam pelaksanaan program – program pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Sarolangun;
- Kurangnya respon masyarakat terhadap program – program pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Sarolangun;

**Alternative Solution :**

- Agar anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Sarolangun dapat dipenuhi sesuai dengan permintaan;
- Perlunya penambahan pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Sarolangun untuk menunjang kelancaran aktifitas kerja;
- Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat (stakeholder)
- Meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehat dan sejahtera melalui program keluarga berencana dengan pelayanan KB gratis bagi masyarakat Pra sejahtera dan sejahtera 1 serta melaksanakan isu grand strategi yaitu : pendewasaan usia





perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

- Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan program – program pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Sarolangun dan meningkatkan kualitas hidup perempuan dengan pelibatan peran perempuan yang akan memberi pengaruh tertentu pada perempuan dengan menjalankan beraneka ragam tugas.

Realisasi dana dan Program yang mendukung untuk mencapai sasaran

**Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat, indikatornya adalah :**

- 1. Angka Harapan Hidup**
- 2. Angka Kematian Bayi (AKB)**
- 3. Angka Kematian Ibu (IBU)**
- 4. Prevalence Balita Gizi Buruk**
- 5. Contraceptive Prevalence Rate**
- 6. Persentase Puskesmas Terakreditasi**
  - 1. *Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan***
  - 2. *Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular***
  - 3. *Program Obat dan Pembekalan Kesehatan***
  - 4. *Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia***
  - 5. *Program Pelayanan Kesehatan Rujukan***
  - 6. *Program Pengembangan Obat Asli Indonesia***
  - 7. *Program Penanggulangan Penyakit Menular dan Keswa***
  - 8. *Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat***
  - 9. *Program Bantuan Operasional Kesehatan***
  - 10. *Program Pengembangan Lingkungan Sehat***
  - 11. *Program Pembinaan Kesehatan Bayi, Anak dan Remaja***
  - 12. *Program Pembinaan Kesehatan Ibu dan Reproduksi***
  - 13. *Program Jaminan Persalinan***
  - 14. *Program Perbaikan Gizi***
  - 15. *Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak***



#### **16. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.**

dengan anggaran Rp. 27.604.453.201 dan terealisasi sebesar Rp 19.945.812.876 atau 72,26%. Realisasi keuangan sebesar 72,26% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 117,068% maka terjadi efisiensi pengguna sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

1. **Program Keluarga Berencana** dengan anggaran Rp. 4.423.792.000 dan terealisasi sebesar Rp. 3.848.811.500 atau 87,00%. Realisasi keuangan sebesar 87,00% dibandingkan dengan capain kinerja sasaran sebesar 105% maka terjadi efisiensi pengguna sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

**TABEL 3.9**  
**PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 7**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2019**

| NO | SASARAN  | INDIKATOR KINERJA                  | SATUAN | TAHUN 2019 |            |               | TAHUN 2018 |            |        |
|----|--|------------------------------------|--------|------------|------------|---------------|------------|------------|--------|
|    |  |                                    |        | TAR GET    | REALI SASI | CAPAIAN ( % ) | TAR GET    | REALI SASI | %      |
| 7. | Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Sesuai Kompetensi | Tingkat Pengangguran Terbuka       | %      | 4,49       | 4,18       | 93,10         | 4,51       | 2,25       | 150,11 |
|    |  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | %      | 70,94      | 67,28      | 98,84         | 70,72      | 70,08      | 99,1   |

(Sumber data DISNAKERTRAN, BPS Kab. Sarolangun)

Dari table diatas dapat kita lihat pada tahun 2018 untuk tingkat pengangguran terbuka terealisasi 2,25 % dengan capaian 150,11 % dan pada tahun 2019 terealisasi 4,18 % dengan capaian 93,10 %. Artinya jika dibandingkan dengan tahun 2018 ada peningkatan pengangguran terbuka sebesar 1,85 % di tahun 2019.



### **3.1.16. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan Rasio jumlah pengangguran terbuka dengan jumlah angkatan kerja, didalam IKU target TPT tahun 2019 adalah sebesar 4.49% dan realisasinya adalah sebesar 4.18% dengan capaian kinerja sebesar 93,10 %. Berarti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kabupaten Sarolangun cukup rendah atau kecil jika dibandingkan dari yang ditargetkan sehingga tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami penurunan. Menurunnya TPT tersebut sebagai dampak dari adanya peningkatan kegiatan-kegiatan ekonomi produktif yang bersifat padat karya sehingga banyak menyerap tenaga kerja.

Secara konseptual pengangguran terbuka adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Turunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) berarti banyak angkatan kerja yang semula menganggur sekarang terserap dalam mengisi kesempatan kerja yang tersedia diberbagai lapangan kerja, baik pada sektor-sektor formal seperti di perusahaan atau lembaga-lembaga berbadan hukum lainnya maupun pada sektor-sektor informal seperti lapangan usaha mandiri atau berwirausaha.

Keberhasilan penurunan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) disebabkan adanya Program peningkatan Kualitas dan Produktivitas tenaga kerja dengan pagu sebesar Rp.206.000.000, untuk mensukseskan program tersebut dilakukan kegiatan-kegiatan pelatihan keterampilan dimana melalui pelatihan-pelatihan yang diikuti memberikan dampak positif diantaranya :



- 1) Peserta pelatihan memiliki bekal keterampilan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat secara umum.
- 2) Membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari apabila keterampilan tersebut dipergunakan untuk membuka usaha sesuai bidang keterampilan yang diikuti.
- 3) Membantu menjawab permasalahan di tempat kerja sesuai keterampilan yang dimiliki. Setelah dilakukan monitoring siswa pasca pelatihan tahun 2019 dapat diketahui:
  - 1) 152 Orang Siswa alumni UPTD BLK termonitor
  - 2) 21 Orang Bekerja, 17 Orang Buka Usaha, dan 50 Orang Belum Bekerja. 64 Orang yang belum bekerja mempunyai aktifitas beragam, yaitu : Kuliah, Ibu rumah tangga dan Pengangguran terbuka

Faktor-faktor penghambat terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka adalah rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja yaitu SLTA kebawah, angkatan kerja yang sudah menamatkan pendidikan tertentu tapi belum mempunyai pengalaman kerja, banyaknya penduduk usia kerja yang masuk menjadi Angkatan kerja karena sudah menamatkan pendidikan atau tidak melanjutkan pendidikan lagi, atau karena adanya PHK sehingga lowongan kerja yang tersedia tidak dapat diisi dan menjadi penganggur, lowongan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja yang bersangkutan. Solusi untuk tahun depan maka diperlukan kebijakan dibidang ketenagakerjaan yaitu mempersiapkan tenaga kerja yang akan memasuki pasar kerja, peningkatan investasi untuk membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, kebijakan





penempatan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri, pemagangan di dalam negeri (di perusahaan) dan pemagangan di luar negeri, peningkatan pelatihan di BLK dan pelatihan kewirausahaan dan penciptaan wirausaha baru melalui pemberdayaan tenaga kerja mandiri.

### **3.1.17. *Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja***

Dari table diatas dapat kita lihat pada tahun 2018 untuk tingkat partisipasi angkatan kerja terealisasi 70,08 % dengan capaian 99,1 % dan pada tahun 2019 terealisasi 67,28 % dengan capaian 98,84 %. Artinya jika dibandingkan dengan tahun 2018 ada penurunan partisipasi angkatan kerja sebesar 0,94 % di tahun 2019. TPAK merupakan rasio jumlah Angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja yaitu penduduk berumur 15 tahun keatas. Target TPAK tahun 2019 adalah 70.94% sedangkan Realisasinya mencapai 67,28 % dengan tingkat capaian 98,84 %, berarti terdapat penurunan partisipasi angkatan kerja dan kurang dari yang ditargetkan. Menurunnya TPAK tersebut salah satu kemungkinannya disebabkan oleh tingginya penduduk usia kerja untuk memasuki dunia kerja dan berpartisipasi aktif dalam proses produksi barang dan jasa dan secara langsung dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan arena tingginya minat masyarakat untuk bekerja atau mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan gambaran jumlah penduduk yang bersedia secara aktif melakukan kegiatan ekonomi terhadap total penduduk usia kerja. Sejalan dengan diimplementasikannya program pendidikan 9 tahun serta semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang lebih tinggi, maka kualitas angkatan kerja kabupaten Sarolangun secara umum akan terus meningkat. Program pendidikan akan memberikan dampak positif



terhadap peningkatan kualitas angkatan kerja yang tercermin dari semakin meningkatnya jumlah angkatan kerja yang berpendidikan SMP keatas dan menurunnya jumlah angkatan kerja berpendidikan SD.

Keberhasilan Peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) disebabkan adanya Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan pagu sebesar Rp.211.200.000, untuk mensukseskan program tersebut dilakukan kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak positif diantaranya :

1) Kegiatan Pelayanan Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja

dimana kegiatan ini dapat membantu masyarakat pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga dapat menanggulangi pengangguran. Pada tahun 2019 pembuatan kartu pencari kerja sebanyak 1095 orang, dan penempatan sebanyak 431 orang dan jumlah lowongan pekerjaan sebanyak 620 orang.

2) Kegiatan Penyuluhan Penanggulangan Penyaluran TKI secara Ilegal

Kegiatan ini dapat mengurangi TKI yang berangkat ke Luar Negeri secara illegal/Non Prosedural, pada tahun 2019 dilakukan penyuluhan di Desa Bukit Talang Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun yang diikuti oleh peserta sebanyak 30 orang.

3) Kegiatan Monitoring Tenaga Kerja di perusahaan dalam rangka pengurusan perpanjangan IMTA

Kegiatan ini berupa pelayanan perpanjangan IMTA/ Notifikasi bagi perusahaan yang mempekerjakan TKA, dari monitoring 25 perusahaan terdapat 6 perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan jumlah Tenaga kerja asing sebanyak 12 Orang.



#### 4) Penyusunan pengolahan informasi pasar kerja

Dari kegiatan ini tersusunlah laporan informasi pasar kerja (IPK) setiap bulan, data-data pencaker, lowongan dan penempatan dapat dipakai sebagai bahan dalam pembuatan laporan kinerja pada Dinas Nakertrans.

#### 5) Penciptaan Wirausaha Muda melalui pemberdayaan tenaga kerja mandiri dan pendampingan

Kegiatan ini dikhususkan bagi masyarakat yang mempunyai wirausaha mandiri atau yang berminat untuk berwirausaha, Peserta pelatihan berasal dari kelurahan Aur Gading dengan nama kelompok Usaha pelatihan berupa pembekalan dan pengetahuan mengenai kewirausahaan, dengan demikian akan terciptanya kesempatan kerja dan lapangan usaha mandiri bagi peserta pelatihan sebanyak 20 orang.

#### 6) Pelatihan Pemagangan Ke Negara Jepang

Kegiatan ini berupa pelatihan untuk persiapan menghadapi seleksi pemagangan ke Negara Jepang, Peserta pelatihan sebanyak 30 Orang.

Dalam analisa pola perkembangan TPAK ditelaah dengan mengamati perkembangan menurut susunan umur dan jenis kelamin. Perkembangan TPAK untuk setiap golongan umur dan jenis kelamin mempunyai pola yang beragam, secara teoritis pada umur muda 15-24 tahun perkembangan TPAK pada umumnya menurun, karena TPAK pada umur muda tersebut digunakan untuk bersekolah , demikian juga dengan TPAK umur tua 60 tahun keatas maka partisipasi mereka dalam angkatan kerja semakin kecil atau menurun karena sudah tidak produktif lagi. Pengaruh umur dan kegiatan mereka kebanyakan adalah untuk menjaga kesehatan karena telah memasuki masa pensiun , sedangkan penduduk usia



potensi adalah 25-60 tahun TPAK mereka umumnya akan tetap tinggi sesuai dengan peran mereka dalam kehidupan rumah tangganya, TPAK pada umur produktif ini aktif berperan dalam ekonomi karena ada dorongan semangat untuk ingin cepat bekerja atau memberi nafkah untuk keluarga. TPAK berdasarkan jenis kelamin juga mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja. TPAK laki-laki lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan karena peran tenaga kerja laki-laki pada umumnya lebih tinggi yaitu sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab mencari nafkah dalam menghidupi keluarganya. Sedangkan TPAK tenaga kerja perempuan lebih rendah karena perempuan lebih banyak berperan dalam mengurus rumah tangga, sehingga sebagian besar dari perempuan dikategorikan tidak masuk Angkatan kerja tetapi hanya masuk pada penduduk usia kerja, tetapi dengan semakin tingginya tingkat pendidikan perempuan maka peran perempuan dalam mencari nafkah dalam keluarga semakin meningkat.

Solusi untuk tahun kedepannya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun memiliki potensi untuk membangun daerahnya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, berbagai pembangunan dilakukan yang mencakup sektor pertanian, industry, perdagangan, jasa, pendidikan, perkebunan, pertambangan dan sektor-sektor lainnya. Melalui kegiatan pembangunan tersebut diharapkan dapat memberi peluang bagi para pencari kerja di daerahnya serta dapat membuka peluang kesempatan kerja.

Evaluasi Kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penerapan Indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja. Kedua





Indikator tersebut sebagai dasar menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berpedoman pada surat Peraturan Menteri Pendadayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Pengukuran kinerja harus dijamin dengan beberapa formulir pengukuran sebagai berikut:

1. Kinerja pada tingkat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang diperoleh dari perencanaan strategis sebagai tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Kinerja pada tingkat Pengukuran Kinerja (PK) dengan penetapan indikator kinerja untuk kegiatan didasarkan pada kelompok berikut :
  - (1.) Indikator masukan (Input indikator) mengukur jumlah sumber daya seperti dana, SDM, Peralatan, Material dan masukan lain yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu dengan meninjau distribusi sumber daya suatu unit kerja dapat menganalisis apakah sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Indikator ini juga memperlihatkan faktor-faktor yang menunjang seperti karakteristik dari target pengukuran.
  - (2.) Indikator keluaran (output indikator) untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, unit kerja dapat menganalisa sejauh mana kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Indikator keluaran hanya dapat menjadi landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila indikator tersebut dihubungkan



dengan baik dan terukur dengan sasaran – sasaran yang dihubungkan dengan baik dan terukur dengan sasaran – sasaran yang telah ditetapkan.

- (3.) Indikator hasil (outcome indikator ) menggambarkan hasil nyata dari suatu kegiatan. Setiap unit kerja perlu mengkaji berbagai pendekatan untuk mengukur hasil dari suatu kegiatan.

Realisasi dana dan Program yang mendukung untuk mencapai sasaran **Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Sesuai Kompetensinya, indikatornya adalah :**

- 1. Tingkat Pengangguran Terbuka**
- 2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

1. ***Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja*** dengan anggaran Rp. 206.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 206.000.000 atau 100%. Realisasi keuangan sebesar 100% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 93,10% maka tidak terjadi efesiensi pengguna sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.
2. ***Program Peningkatan Kesempatan Kerja*** dengan anggaran Rp. 211.200.000 dan terealisasi sebesar Rp 210.867.000 atau 99,84%. Realisasi keuangan sebesar 99,84% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 98,84% maka tidak terjadi efesiensi pengguna sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



**TABEL 3.10**  
**PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 8**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2019**

| NO | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA               | SATUAN | TAHUN 2019 |           |             | TAHUN 2018 |           |      |
|----|---|---------------------------------|--------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|------|
|    |   |                                 |        | TARGET     | REALISASI | CAPAIAN (%) | TARGET     | REALISASI | %    |
| 8. | Meningaktanya Pengamalan Nilai-nilai Agama dan Pengembangan Budaya Lokal Dalam Kehidupan Masyarakat | Persentase Buta Aksara Al-Quran | %      | 13         | 16,66     | 128,15      | 15         | 14,28     | 95,2 |

( Sumber data Bina Kesra Kab. Sarolangun)

### 3.1.18. Persentase Buta Aksara Al-Quran

Dari table diatas dapat kita lihat dimana target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Sarolangun tahun 2017-2022, sebesar 15% dan realisasi sebesar 14,28% dengan capain 95,2% dimana untuk setiap tahunnya untuk 10 kecamatan Kabupaten Sarolangun telah ditargetkan sebanyak 7000 anak untuk 5 tahun. Untuk tahun 2018 dan pada tahun 2019 terealisasi 16,66 % dengan capaian 128,15 % pada tahun ini yg lulus dalam khatam Al-quran sebanyak 1000 anak. Target dari bina kesra setiap tahunnya 1000 anak yang akan dikhatam al-quran. Artinya kegiatan dalam mengurangi buta aksara Al-quran berjalan dengan baik. Dimana kegiatan ini selama tahun 2017 sampai 2020 baru terealisasi 2000 anak hatam artinya tersisa 5000 anak lagi yang akan dihatam, dimana rumus perhitungan diatas dapat kita lihat sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah anak yang khatam}}{\text{Jumlah anak yang belum di khatam}} \times 100$$

$$\frac{1000}{6000} \times 100 = 16,66 \%$$



Realisasi dana dan Program yang mendukung untuk mencapai sasaran **Meningkatnya Pengamalan Nilai-Nilai Agama dan Pengembangan Budaya Lokal Dalam Kehidupan Masyarakat**, indikatornya adalah :

**1. Persentase Buta Aksara Al-Quran**

**1. *Program Kegiatan Pembinaan Guru Seni Baca Al-Qur'an dan Pembinaan***

***Anak Khatam Al-Qura'an*** dengan anggaran Rp. 1.492.484.000 dan terealisasi sebesar Rp 1.469.889.295 atau 98,49%. Realisasi keuangan sebesar 98,49% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 128,15% maka terjadi efisiensi pengguna sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

**TABEL 3.11**  
**PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 9**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2019**

| NO | SASARAN                               | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN | TAHUN 2019 |           |             | TAHUN 2018 |           |        |
|----|---------------------------------------|---------------------|--------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|--------|
|    |                                       |                     |        | TARGET     | REALISASI | CAPAIAN (%) | TARGET     | REALISASI | %      |
| 9. | Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi | Pertumbuhan Ekonomi | %      | 4,92       | 4,72      | 95,93       | 4,57       | 4,69      | 102,62 |

(Sumber data BPS Kab. Sarolangun)

**3.1.19. *Pertumbuhan Ekonomi***

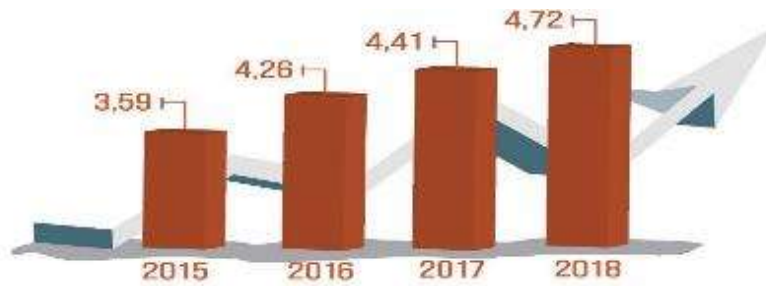
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Dari tabel sasaran Sembilan dapat kita lihat bahwasannya dari target yang telah ditetapkan sebesar 4,57% dengan realisasi sebesar 4,69 atau





dengan capaian 102,62 persen pada tahun 2018, untuk tahun 2019 ada sedikit peningkatan dengan realisasi 4,72 % dengan capaian 95,93 % ini artinya pertumbuhan ekonomi kabupaten sarolangun mengalami peningkatan walaupun belum signifikan,

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 - 2018

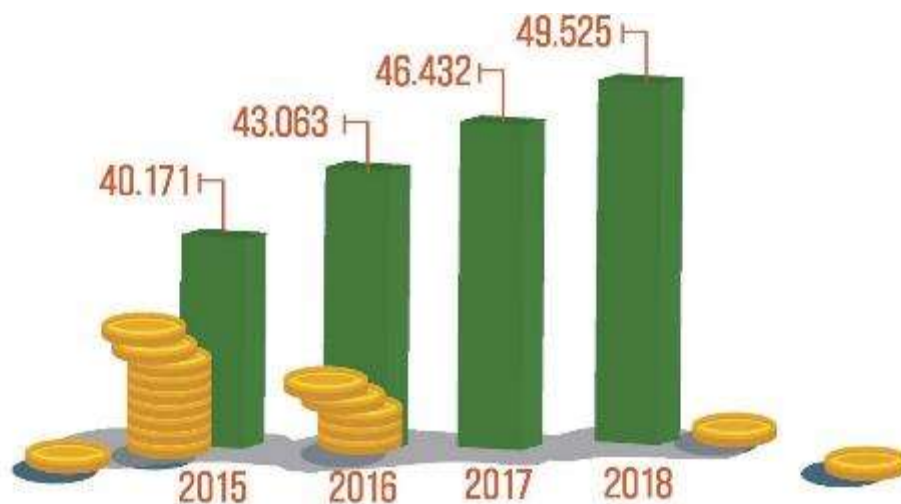


Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada Gambar 13 menunjukkan perkembangan laju pertumbuhan PDRB atau sering disebut pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sarolangun dalam kurun waktu 2015 hingga 2018. Berdasarkan gambar di atas menggambarkan bahwa terjadinya peningkatan dan perbaikan ekonomi dari tahun ke tahun yang ditunjukkan dengan makin meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sarolangun. Tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun sebesar 3,59 persen, yang kemudian meningkat menjadi 4,26 persen di tahun 2016. Tidak hanya berhenti di tahun 2016 saja, di tahun 2017 pemerintah daerah dengan berbagai kebijakan di bidang perekonomian juga berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi 4,41 persen. Selanjutnya tahun 2018 kembali meningkat 4,72 persen. Hal ini berarti pemerintah daerah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sarolangun



#### Pendapatan Perkapita Kabupaten Sarolangun Tahun 2015 - 2018



Selain indikator pertumbuhan ekonomi, indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Nilai PDRB perkapita Kabupaten Sarolangun periode 2015 hingga 2018 menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun seperti yang ditunjukkan oleh gambar di atas. PDRB perkapita Kabupaten Sarolangun yang tahun 2015 tercatat 40.171 ribu rupiah meningkat menjadi 49.525 ribu rupiah di tahun 2018.

Realisasi dana dan Program yang mendukung untuk mencapai sasaran

**Meningkatnya Laju Pertumbuhan ekonomi, indikatornya adalah :**



## 1. Pertumbuhan ekonomi

1. **Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi** dengan anggaran Rp. 245.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 242.968.466 atau 99,17%. Realisasi keuangan sebesar 98,49% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 95,93% maka tidak terjadi efesiensi pengguna sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

**TABEL 3.12**  
**PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 10**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2019**

| NO  | SASARAN                              | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TAHUN 2019 |           |             | TAHUN 2018 |           |        |
|-----|--------------------------------------|-------------------|--------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|--------|
|     |                                      |                   |        | TARGET     | REALISASI | CAPAIAN (%) | TARGET     | REALISASI | %      |
| 10. | Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah | Indeks Gini       | %      | 0,330      | 0,29      | 87,88       | 0,336      | 0,29      | 115,86 |

(Sumber data DPMD DAN BPS Kab. Sarolangun)

### 3.1.20. Indeks Gini

Dalam upaya mencapai Sasaran strategis Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah pada Tahun 2018 memiliki 1 Indikator kinerja yang harus dicapai, adapun indikator Kinerjanya adalah sebagai berikut :

Pesentase Indeks GINI Rasio untuk tahun 2018 terealisasi 0,29 % dengan capaian sebesar 115,86 %, pada tahun 2019 terealisasi 0,29 % dengan capaian sebesar 87,88 %. rata-rata pendapatan dan pengeluaran dari 10 Kecamatan di Kab. Sarolangun

Adapun hambatan yang terjadi tentang kesenjangan antar wilayah dikabupaten sarolangun ini terjadi karena belum semua desa dapat terpenuhi dalam Pembangunan wilayah yang menyangkut Pembangunan Infrastruktur, sarana dan prasarana dan transportasi, ini dikarenakan keterbatasan anggaran



APBD, untuk itu kedepan Kabupaten Sarolangun akan segera menyelesaikan permasalahan ini secara bertahap.

Realisasi dana dan Program yang mendukung untuk mencapai sasaran

**Menurunya Kesenjangan Antar Wilayah, indikatornya adalah :**

### 1. Indeks Gini

1. **Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan** dengan anggaran

Rp. 200.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 198.401.600 atau 99,20%.

Realisasi keuangan sebesar 99,20% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 87,88 % maka tidak terjadi efesiensi pengguna sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

**TABEL 3.13**  
**PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 11**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2019**

| NO  | SASARAN                    | INDIKATOR KINERJA          | SATUAN | TAHUN 2019 |           |             | TAHUN 2018 |           |        |
|-----|----------------------------|----------------------------|--------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|--------|
|     |                            |                            |        | TARGET     | REALISASI | CAPAIAN (%) | TARGET     | REALISASI | %      |
| 11. | Menurunya Angka Kemiskinan | Persentase Penduduk Miskin | %      | 8,83       | 8,45      | 95,70       | 9,08       | 8,87      | 102,31 |

(sumber data BPS Kab. Sarolangun)

#### 3.1.21. **Persentase Penduduk Miskin**

Dari table diatas data masi merupakan data sementara, dapat kita lihat dimana target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD untuk persentase penduduk miskin sebesar 9,08 persen. Pada posisi tahun 2018 dilihat dari data ternyata tingkat persentase penduduk miskin menurun menjadi 8,87%. Untuk tahun 2019 persentase penduduk miskin terealisasi sebesar 8,45 % dengan capaian sebesar 95,70 %. Dari capaian tahun 2018 dan 2019 dilihat dari penetapan dalam dokumen RPJMD, angka kemiskinan mengalami penurun selama 2 tahun





ini , artinya Kabupaten Sarolangun telah sukses dalam menangani angka kemiskinan walaupun angka yang didapat tidak terlalu signifikan, dimana factor – factor yang membuat angka kemiskinan Dikabupaten Sarolangun menurun. Ini tidak lepas dari Program –program Bapak Bupati yang telah dilaksanakan. dimana pembangunan infrastruktur yang semakin baik di daerah desa-desa terpencil. Sehingga aktifitas masyarakat mengalami peningkatan artinya pertumbuhan ekonomi pun meningkat. Dan pastinya akan meningkatkan taraf pendapatan masyarakat. Kemudian dilihat dari program PMKS yang ada Dikabupaten Sarolangun juga merupakan salah satu pengetasan dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang ada Kabupaten Sarolangun.

Realisasi dana dan Program yang mendukung untuk mencapai sasaran

**Menurunnya Angka Kemiskinan, indikatornya adalah :**

**1. Persentase Penduduk Miskin**

1. *Program Perlindungan dan Jaminan Sosial*
  2. *Program Rehabilitasi Sosial*
  3. *Program Pemberdayaan Sosial*
  4. *Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana*
  5. *Program Penanganan dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil*
  6. *Program Penanganan Pakir Miskin*
1. dengan anggaran Rp. 1.759.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.470.232.573 atau 83,56%. Realisasi keuangan sebesar 83,56% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 95,70% maka terjadi efesiensi pengguna sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



**TABEL 3.14**  
**PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 12**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2019**

| NO  | SASARAN                                      | INDIKATOR KINERJA           | SATUAN | TAHUN 2019 |           |             | TAHUN 2018 |           |       |
|-----|--|-----------------------------|--------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------|
|     |  |                             |        | TARGET     | REALISASI | CAPAIAN (%) | TARGET     | REALISASI | %     |
| 12. | Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Daesa | Indeks Desa Membangun (IDM) | %      | 53,69      | 55,03     | 102,49      | 40,27      | 33,55     | 83,31 |

(sumber data DPMD Kab. Sarolangun)

### 3.1.22. Indeks Desa Membangun(IDM)

Dalam upaya mencapai Sasaran strategis Meningkatkan kapasitas dan Kemandirian Desa pada Tahun 2018 memiliki 1 Indikator kinerja yang harus dicapai, adapun indikator Kinerjanya adalah sebagai berikut :

Pesentase Indeks Desa Membangun (IDM) untuk tahun 2018 yang ditargetkan sebesar 40,27 % realisasi 33,55 % dengan capaian 83,31. Untuk tahun 2019 mengalami peningkatan indikator IDM dimana terealisasi 55,03 % dengan capaian sebesar 102,49 %, peningkatan ini cukup signifikan. Ini dikarenakan adanya 149 Desa yang telah kategorikan desa maju dan berkembang dari 149 desa dengan formulasi Jumlah desa Maju dan berkembang dibagi jumlah seluruh desa di Kab. Sarolangun

Didalam hal ini masi terdapat kendala dalam meningkatkan Indeks Desa Membangun( IDM ) dimana masi relative terbatasnya kemampuan Pemerintah Desa dalam mengefektifkan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam rangka pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan Masyarakat.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Sarolangun akan menerapkan strategi dan solusi dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam masyarkat dalam



meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu Pembangunan fisik, seperti peningkatan kualitas permukiman, pembangunan infrastruktur dan fasilitas desa dan non fisik seperti pelatihan ekonomi masyarakat dan pengembangan zona ekonomi khusus, aktivasi BUMdes sebagai sarana prasarana produk desa serta peningkatan fungsi kelembagaan desa.

Realisasi dana dan Program yang mendukung untuk mencapai sasaran

**Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Desa, indikatornya adalah :**

### 1. Indeks Desa Membangun (IDM)

#### 1. *Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa*

dengan anggaran Rp. 545.134.500 dan terealisasi sebesar Rp 500.660.450 atau 91,84%. Realisasi keuangan sebesar 91,84% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 102,49% maka terjadi efisiensi pengguna sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

**TABEL 3.15**

### **PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 13 PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2019**

| NO  | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA     | SATUAN | TAHUN 2019 |           |             | TAHUN 2018 |           |       |
|-----|---|-----------------------|--------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------|
|     |   |                       |        | TARGET     | REALISASI | CAPAIAN (%) | TARGET     | REALISASI | %     |
| 13. | Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Desa/Kelurahan | Pengeluaran Perkapita | %      | 795,15     | 637       | 80,11       | 767,52     | 961,27    | 125,2 |

(Sumber data DPMD, BPS Kab. Sarolangun)

#### 3.1.23. *Pengeluaran Perkapita*

Dalam upaya mencapai Sasaran strategis Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Desa/Kelurahan pada Tahun 2018 dan 2019 memiliki 1 Indikator kinerja yang harus dicapai, adapun indikator Kinerjanya adalah sebagai berikut :

Pengeluaran Perkapita untuk tahun 2018 yang ditargetkan sebesar Rp.767,52 dengan realisasi Rp. 961,27 rata-rata pengeluaran Rumah Tangga dari



10 Kecamatan di Kab. Sarolangun, dan pada tahun 2019 pengeluaran perkapita ditargetkan sebesar Rp. 795,15 dengan realisasi Rp. 637 rata –rata pengeluaran Rumah Tangga dari 10 Kecamatan di Kab. Sarolangun.

Permasalahn yang dihadapi Kabupaten Sarolangun dimana belum maksimalnya pendayagunaan potensi sumberdaya local Desa dan Teknologi tepat guna, kurang berkembangnya usaha ekonomi keluarga dan masyarakat, yang mengakibatkan rendahnya kondisi kehidupan masyarakat.

Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun yaitu meningkatkan pemberdayaan kelompok usaha ekonomi keluarga dan masyarakat. Agar kedepannya pendapatan masyarakat Kabupaten Sarolangun dapat meningkat lebih baik lagi.

Realisasi dana dan Program yang mendukung untuk mencapai sasaran **Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Desa dan Kelurahan, indikatornya adalah :**

#### **1. Pengeluaran Perkapita**

1. ***Program Evaluasi dan Pelaporan Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan, Alokasi Dana Desa*** dengan anggaran Rp. 1.035.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 826.065.650 atau 79,81%. Realisasi keuangan sebesar 79,81% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 80,11% maka terjadi efesiensi pengguna sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.





**TABEL 3.16**  
**PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 14**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2019**

| NO  | SASARAN  | INDIKATOR KINERJA   | SATUAN | TAHUN 2019 |            |               | TAHUN 2018 |            |       |
|-----|--|---|--------|------------|------------|---------------|------------|------------|-------|
|     |  |   |        | TAR GET    | REALI SASI | CAPAIAN ( % ) | TAR GET    | REALI SASI | %     |
| 14. | Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Beragam Berbasis Sumber Daya Lokal | Persentase Tercukupinya Pangan Pada Tingkat Rumah Tangga Dalam Jumlah, Mutu, Ragam, Keamanan Serta Keterjangkauan Harga | %      | 69         | 83,8       | 121,45        | 66         | 82,3       | 124,7 |

(Sumber data Dinas KP Kab. Sarolangun)

#### **3.1.24. Persentase Tercukupinya Pangan Pada Tingkat Rumah Tangga Dalam Jumlah, Mutu, Ragam, Keamanan Serta Keterjangkauan Harga**

Berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan tahun 2017-2022 target kinerja adalah sebesar 66 % pada tahun 2018, dari target tersebut dan mengacu pada hasil pengeluaran PPH tahun 2018 telah tercapai hasilnya sebesar 82,3% artinya capaian kinerja pada tahun 2018 telah melebihi target dengan capaian kinerja sebesar 124,7 %.

Sedangkan untuk tahun 2019 target kinerja ditetapkan sebesar 69% dan berdasarkan hasil pengukuran PPH pada tahun 2019 telah tercapai 83,8% hal ini telah melebihi target sebesar 121,45%. Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan adalah Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumberdaya lokal. Sasaran ini sesuai dengan misi ketiga kepala daerah yaitu meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat berbasis potensi lokal. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan yaitu Tercukupinya pangan pada tingkat rumah tangga dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan serta keterjangkauan harga.



Satuan yang dipergunakan untuk pengukuran IKU tersebut adalah Skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energy dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energy dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Target yang ditetapkan pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017-2022 adalah sebesar 69% pada tahun 2019. Dari target tersebut berdasarkan hasil pengukuran PPH pada

tahun 2019 telah tercapai hasil 83,8%. Hal ini berarti realisasi capaian kinerja pada tahun 2019 telah melebihi target dan persentase capaiannya sebesar 121,45%.

➤ Analisis berdasarkan faktor-faktor penyebab keberhasilannya

Tujuan dari Pola Pangan Harapan (PPH) adalah untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk, yang mempertimbangkan keseimbangan gizi (nutritional balance) berdasarkan: cita rasa (palatability), daya cerna (digestability), daya terima masyarakat (acceptability), kuantitas dan kemampuan daya beli.

Faktor-faktor penyebab tingginya skor PPH yaitu beragamnya konsumsi pangan sehingga tidak bergantung pada pangan pokok utama yaitu beras.

➤ Analisis berdasarkan factor- factor penghambatnya



Kurang beragam dan seimbang konsumsi pangan dimana komposisi padi-padian, umbi-umbian pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah tidak berimbang.

➤ Solusi Untuk Tahun Kedepannya

Dengan memperhatikan hasil capaian skor Pola Pangan Harapan maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan capaian target indikator kinerja utama melalui berbagai kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan yang dapat mendukung peningkatan skor pola pangan harapan.

Adapun Formulasi yang digunakan untuk menghitung Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Yaitu :

Skor PPH = Skor PPH kelompok padi-padian + umbi-umbian + pangan hewani + minyak dan lemak + buah/ biji berminyak + kacang-kacangan + gula + sayur dan buah + skor PPH kelompok lain-lain.

Skor Pola Pangan harapan (PPH) diperoleh melalui Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Lampiran penghitungan Skor PPH dapat dilihat pada table 5. berikut :



**DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN SAROLANGUN  
KOMPLEKS PERKANTORAN GUNUNG KEMBANG SAROLANGUN**

**SKOR POLA PANGAN HARAPAN KONSUMSI PANGAN PENDUDUK  
BERDASARKAN DATA SURVEY SOSIAL EKONOMI NASIONAL**

**TOTAL WILAYAH**

| No | Kelompok Pangan     | Berat Pangan Gram/Kapita /Hari | Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) |       |         |       |             |          |           |          |
|----|---------------------|--------------------------------|--|-------|---------|-------|-------------|----------|-----------|----------|
|    |                     |                                | Kkal/Kapita                                | %     | % AKE*) | Bobot | Skor Aktual | Skor AKE | Skor Maks | Skor PPH |
| 1  | Padi-padian         | 331.6                          | 1,318.3                                    | 58.9  | 65.9    | 0.5   | 29.4        | 33.0     | 25.0      | 25.0     |
| 2  | Umbi-umbian         | 45.8                           | 49.2                                       | 2.2   | 2.5     | 0.5   | 1.1         | 1.2      | 2.5       | 1.2      |
| 3  | Pangan Hewani       | 114.9                          | 204.2                                      | 9.1   | 10.2    | 2.0   | 18.2        | 20.4     | 24.0      | 20.4     |
| 4  | Minyak dan Lemak    | 39.3                           | 354.3                                      | 15.8  | 17.7    | 0.5   | 7.9         | 8.9      | 5.0       | 5.0      |
| 5  | Buah/Biji Berminyak | 10.0                           | 53.7                                       | 2.4   | 2.7     | 0.5   | 1.2         | 1.3      | 1.0       | 1.0      |
| 6  | Kacang-kacangan     | 15.8                           | 39.0                                       | 1.7   | 2.0     | 2.0   | 3.5         | 3.9      | 10.0      | 3.9      |
| 7  | Gula                | 30.9                           | 112.7                                      | 5.0   | 5.6     | 0.5   | 2.5         | 2.8      | 2.5       | 2.5      |
| 8  | Sayur dan Buah      | 188.4                          | 93.1                                       | 4.2   | 4.7     | 5.0   | 20.8        | 23.3     | 30.0      | 23.3     |
| 9  | Lain-lain           | 30.4                           | 15.6                                       | 0.7   | 0.8     | -     | -           | -        | -         | -        |
|    |                     |                                |  |       |         |       |             |          |           |          |
|    | Total               |                                | 2,240.2                                    | 100.0 | 112.0   |       | 84.6        | 94.8     | 100.0     | 82.3     |





**DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN  
SAROLANGUN**

**POLA KONSUMSI PANGAN PENDUDUK**

**KABUPATEN SAROLANGUN**

**BERDASARKAN DATA SURVEY SOSIAL EKONOMI NASIONAL**

**KOMPLEKS PERKANTORAN GUNUNG KEMBANG SAROLANGUN**

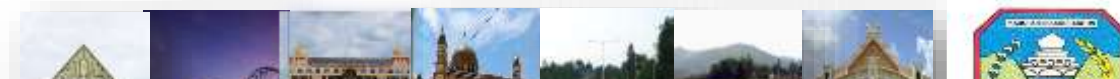
| Kelompok/Jenis Pangan | Wilayah Kota        |                      |                  |                       | Wilayah Desa        |                      |                  |                       | Total Wilayah       |                      |                  |                       |
|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|------------------|-----------------------|
|                       | Kandungan Gizi      |                      | Berat Pangan     |                       | Kandungan Gizi      |                      | Berat Pangan     |                       | Kandungan Gizi      |                      | Berat Pangan     |                       |
|                       | Energi<br>Kkal/Hari | Protein<br>Gram/Hari | Gram<br>Per Hari | Kilogram<br>Per Tahun | Energi<br>Kkal/Hari | Protein<br>Gram/Hari | Gram<br>Per Hari | Kilogram<br>Per Tahun | Energi<br>Kkal/Hari | Protein<br>Gram/Hari | Gram<br>Per Hari | Kilogram<br>Per Tahun |
| <b>1. Padi-Padian</b> |                     |                      |                  |                       |                     |                      |                  |                       |                     |                      |                  |                       |
| Beras                 | -                   | -                    | -                | -                     | -                   | -                    | -                | -                     | 1,073.0             | 25.0                 | 297.1            | 108.4                 |
| Jagung                | -                   | -                    | -                | -                     | -                   | -                    | -                | -                     | 1.3                 | 0.0                  | 1.2              | 0.4                   |
| Terigu                | -                   | -                    | -                | -                     | -                   | -                    | -                | -                     | 244.1               | 5.2                  | 33.3             | 12.2                  |
| Subtotal Padi-padian  | -                   | -                    | -                | -                     | -                   | -                    | -                | -                     | 1,318.3             | 30.2                 | 331.6            | 121.0                 |
| <b>2. Umbi-umbian</b> |                     |                      |                  |                       |                     |                      |                  |                       |                     |                      |                  |                       |
| Singkong              | -                   | -                    | -                | -                     | -                   | -                    | -                | -                     | 36.2                | 0.3                  | 29.0             | 10.6                  |
| Ubi Jalar             | -                   | -                    | -                | -                     | -                   | -                    | -                | -                     | 5.7                 | 0.1                  | 4.5              | 1.7                   |
| Sagu                  | -                   | -                    | -                | -                     | -                   | -                    | -                | -                     | 5.8                 | 0.2                  | 11.1             | 4.1                   |
| Kentang               | -                   | -                    | -                | -                     | -                   | -                    | -                | -                     | 0.3                 | 0.0                  | 0.1              | 0.0                   |
| Umbi Lainnya          | -                   | -                    | -                | -                     | -                   | -                    | -                | -                     | 1.2                 | 0.0                  | 1.1              | 0.4                   |
| Subtotal Umbi-umbian  | -                   | -                    | -                | -                     | -                   | -                    | -                | -                     | 49.2                | 0.5                  | 45.8             | 16.7                  |



|                               |   |   |   |   |   |   |   |   |       |      |       |      |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|------|-------|------|
| <b>3. Pangan Hewani</b>       |   |   |   |   |   |   |   |   |       |      |       |      |
| Daging Ruminansia             | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.8   | 0.5  | 1.8   | 0.7  |
| Daging Unggas                 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77.3  | 4.8  | 25.5  | 9.3  |
| Telur                         | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.3  | 2.1  | 19.2  | 7.0  |
| Susu                          | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.0  | 1.1  | 6.3   | 2.3  |
| Ikan                          | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.8  | 9.0  | 62.0  | 22.6 |
| Subtotal Pangan Hewani        | - | - | - | - | - | - | - | - | 204.2 | 17.6 | 114.9 | 41.9 |
| <b>4. Minyak dan Lemak</b>    |   |   |   |   |   |   |   |   |       |      |       |      |
| Minyak Kelapa                 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.1  | 0.0  | 1.4   | 0.5  |
| Minyak Lainnya                | - | - | - | - | - | - | - | - | 342.2 | -    | 37.9  | 13.8 |
| Margarin                      | - | - | - | - | - | - | - | - | -     | -    | -     | -    |
| Subtotal Minyak dan Lemak     | - | - | - | - | - | - | - | - | 354.3 | 0.0  | 39.3  | 14.4 |
| <b>5. Buah/Biji Berminyak</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |       |      |       |      |
| Kelapa                        | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.7  | 0.5  | 9.5   | 3.5  |
| Kemiri                        | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0   | 0.1  | 0.5   | 0.2  |
| Subtotal Buah/Biji Berminyak  | - | - | - | - | - | - | - | - | 53.7  | 0.6  | 10.0  | 3.6  |
| <b>6. Kacang-kacangan</b>     |   |   |   |   |   |   |   |   |       |      |       |      |
| Kacang Kedelai                | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.9  | 3.9  | 15.6  | 5.7  |
| Kacang Tanah                  | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1   | 0.1  | 0.3   | 0.1  |
| Kacang Hijau                  | - | - | - | - | - | - | - | - | -     | -    | -     | -    |
| Kacang lain                   | - | - | - | - | - | - | - | - | -     | -    | -     | -    |
| Subtotal Kacang-kacangan      | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.0  | 4.0  | 15.8  | 5.8  |



|                          |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |       |      |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|-----|-------|------|
| <b>7. Gula</b>           |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |       |      |
| Gula Pasir               | - | - | - | - | - | - | - | - | 110.2 | -   | 30.3  | 11.1 |
| Gula Merah               | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5   | 0.0 | 0.7   | 0.2  |
| Subtotal Gula            | - | - | - | - | - | - | - | - | 112.7 | 0.0 | 30.9  | 11.3 |
| <b>8. Sayur dan Buah</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |       |      |
| Sayur                    | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.0  | 3.2 | 130.1 | 47.5 |
| Buah                     | - | - | - | - | - | - | - | - | 41.1  | 0.4 | 58.3  | 21.3 |
| Subtotal Sayur dan Buah  | - | - | - | - | - | - | - | - | 93.1  | 3.5 | 188.4 | 68.8 |
| <b>9. Lain-lain</b>      |   |   |   |   |   |   |   |   |       |     |       |      |
| Minuman                  | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.6  | 0.7 | 21.0  | 7.7  |
| Bumbu                    | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0   | 0.1 | 9.4   | 3.4  |
| Subtotal Lain-lain       | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.6  | 0.8 | 30.4  | 11.1 |



KABUPA  
KOMPLI

SURVEY SOSIAL EKONOMI NASIONAL

DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN  
SAROLANGUN

SASARAN POLA PANGAN HARAPAN KONSUMSI PANGAN  
PENDUDUK

TOTAL  
WILAYAH

| No | Kelompok Pangan     | Konsumsi Energi Per Hari |       |         | Konsumsi Protein Per Hari |       |          |
|----|---------------------|--------------------------|-------|---------|---------------------------|-------|----------|
|    |                     | Kkal/Kapita              | %     | % AKE*) | Gram/Kapita               | %     | % AKP**) |
| 1  | Padi-padian         | 1,318.3                  | 58.9  | 65.9    | 30.2                      | 58.9  | 58.2     |
| 2  | Umbi-umbian         | 49.2                     | 2.2   | 2.5     | 0.5                       | 2.2   | 1.0      |
| 3  | Pangan Hewani       | 204.2                    | 9.1   | 10.2    | 17.6                      | 9.1   | 33.8     |
| 4  | Minyak dan Lemak    | 354.3                    | 15.8  | 17.7    | 0.0                       | 15.8  | 0.0      |
| 5  | Buah/Biji Berminyak | 53.7                     | 2.4   | 2.7     | 0.6                       | 2.4   | 1.1      |
| 6  | Kacang-kacangan     | 39.0                     | 1.7   | 2.0     | 4.0                       | 1.7   | 7.6      |
| 7  | Gula                | 112.7                    | 5.0   | 5.6     | 0.0                       | 5.0   | 0.0      |
| 8  | Sayur dan Buah      | 93.1                     | 4.2   | 4.7     | 3.5                       | 4.2   | 6.8      |
| 9  | Lain-lain           | 15.6                     | 0.7   | 0.8     | 0.8                       | 0.7   | 1.5      |
|    |                     |                          |       |         |                           |       |          |
|    | <b>Total</b>        | 2,240.17                 | 100.0 | 112.0   | 57.24                     | 100.0 | 110.1    |



**DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN  
SAROLANGUN**

**SASARAN POLA PANGAN HARAPAN KONSUMSI PANGAN  
PENDUDUK**

**KABUPATEN SAROLANGUN**

**BERDASARKAN DATA SURVEY SOSIAL EKONOMI  
NASIONAL**

**KOMPLEKS PERKANTORAN GUNUNG KEMBANG SAROLANGUN**

| No | Kelompok Pangan     | Skor Pola Pangan Harapan |      |      |      |      |      |
|----|---------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|
|    |                     | 2017                     | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1  | Padi-padian         | 25.0                     | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 2  | Umbi-umbian         | 1.2                      | 1.4  | 1.5  | 1.7  | 1.9  | 2.0  |
| 3  | Pangan Hewani       | 20.4                     | 20.9 | 21.3 | 21.8 | 22.2 | 22.7 |
| 4  | Minyak dan Lemak    | 5.0                      | 5.0  | 5.0  | 5.0  | 5.0  | 5.0  |
| 5  | Buah/Biji Berminyak | 1.0                      | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  |
| 6  | Kacang-kacangan     | 3.9                      | 4.7  | 5.4  | 6.2  | 7.0  | 7.7  |
| 7  | Gula                | 2.5                      | 2.5  | 2.5  | 2.5  | 2.5  | 2.5  |
| 8  | Sayur dan Buah      | 23.3                     | 24.1 | 25.0 | 25.8 | 26.6 | 27.5 |
| 9  | Lain-lain           | -                        | -    | -    | -    | -    | -    |
|    | Total               | 82.3                     | 84.5 | 86.7 | 89.0 | 91.2 | 93.4 |



| No | Kelompok Pangan     | Tingkat Kecukupan Konsumsi Energi (%) |       |       |       |       |       |
|----|---------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                     | 2017                                  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| 1  | Padi-padian         | 65.9                                  | 63.9  | 61.9  | 59.9  | 58.0  | 56.0  |
| 2  | Umbi-umbian         | 2.5                                   | 2.9   | 3.3   | 3.8   | 4.2   | 4.7   |
| 3  | Pangan Hewani       | 10.2                                  | 10.4  | 10.7  | 10.9  | 11.1  | 11.3  |
| 4  | Minyak dan Lemak    | 17.7                                  | 16.7  | 15.8  | 14.8  | 13.9  | 12.9  |
| 5  | Buah/Biji Berminyak | 2.7                                   | 2.7   | 2.8   | 2.8   | 2.8   | 2.9   |
| 6  | Kacang-kacangan     | 2.0                                   | 2.3   | 2.7   | 3.1   | 3.5   | 3.9   |
| 7  | Gula                | 5.6                                   | 5.6   | 5.5   | 5.4   | 5.3   | 5.2   |
| 8  | Sayur dan Buah      | 4.7                                   | 4.8   | 5.0   | 5.2   | 5.3   | 5.5   |
| 9  | Lain-lain           | 0.8                                   | 1.1   | 1.3   | 1.6   | 1.9   | 2.2   |
|    |                     |                                       |       |       |       |       |       |
|    | Total               | 112.0                                 | 110.5 | 109.0 | 107.5 | 106.0 | 104.5 |



| No | Kelompok Pangan     | Rata-Rata Konsumsi Energi (Kkal/Kapita/Hari) |         |         |         |         |         |
|----|---------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
|    |                     | 2017   | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
| 1  | Padi-padian         | 1,318.3                                      | 1,278.6 | 1,238.8 | 1,199.0 | 1,159.2 | 1,119.4 |
| 2  | Umbi-umbian         | 49.2   | 58.1    | 66.9    | 75.8    | 84.6    | 93.5    |
| 3  | Pangan Hewani       | 204.2  | 208.7   | 213.2   | 217.6   | 222.1   | 226.6   |
| 4  | Minyak dan Lemak    | 354.3  | 335.0   | 315.7   | 296.4   | 277.1   | 257.9   |
| 5  | Buah/Biji Berminyak | 53.7   | 54.5    | 55.3    | 56.1    | 56.9    | 57.6    |
| 6  | Kacang-kacangan     | 39.0   | 46.6    | 54.3    | 61.9    | 69.5    | 77.1    |
| 7  | Gula                | 112.7  | 111.1   | 109.5   | 107.9   | 106.3   | 104.8   |
| 8  | Sayur dan Buah      | 93.1   | 96.5    | 99.8    | 103.2   | 106.6   | 109.9   |
| 9  | Lain-lain           | 15.6   | 21.1    | 26.7    | 32.2    | 37.8    | 43.3    |
|    | Total               | 2,240.2                                      | 2,210.2 | 2,180.1 | 2,150.1 | 2,120.1 | 2,090.1 |



| No | Kelompok Pangan     | Rata-Rata Konsumsi Pangan (Gram/Kapita/Hari) |       |       |       |       |       |
|----|---------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                     | 2017   | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| 1  | Padi-padian         | 331.6  | 329.6 | 327.6 | 325.6 | 323.7 | 321.7 |
| 2  | Umbi-umbian         | 45.8   | 51.3  | 56.8  | 62.3  | 67.8  | 73.3  |
| 3  | Pangan Hewani       | 114.9  | 119.5 | 124.2 | 128.8 | 133.5 | 138.1 |
| 4  | Minyak dan Lemak    | 39.3   | 38.2  | 37.1  | 35.9  | 34.8  | 33.7  |
| 5  | Buah/Biji Berminyak | 10.0   | 10.0  | 10.0  | 10.0  | 10.0  | 10.0  |
| 6  | Kacang-kacangan     | 15.8   | 18.3  | 20.8  | 23.2  | 25.7  | 28.2  |
| 7  | Gula                | 30.9   | 31.3  | 31.7  | 32.1  | 32.5  | 32.8  |
| 8  | Sayur dan Buah      | 188.4  | 194.8 | 201.1 | 207.5 | 213.8 | 220.2 |
| 9  | Lain-lain           | 30.4   | 41.6  | 52.9  | 64.2  | 75.5  | 86.8  |





| No | Kelompok Pangan     | Rata-Rata Konsumsi Pangan (Kg/Kapita/Tahun) |       |       |       |       |       |
|----|---------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                     | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| 1  | Padi-padian         | 121.0                                       | 120.3 | 119.6 | 118.9 | 118.1 | 117.4 |
| 2  | Umbi-umbian         | 16.7  | 18.7  | 20.7  | 22.7  | 24.7  | 26.7  |
| 3  | Pangan Hewani       | 41.9  | 43.6  | 45.3  | 47.0  | 48.7  | 50.4  |
| 4  | Minyak dan Lemak    | 14.4  | 13.9  | 13.5  | 13.1  | 12.7  | 12.3  |
| 5  | Buah/Biji Berminyak | 3.6   | 3.6   | 3.6   | 3.7   | 3.7   | 3.7   |
| 6  | Kacang-kacangan     | 5.8   | 6.7   | 7.6   | 8.5   | 9.4   | 10.3  |
| 7  | Gula                | 11.3  | 11.4  | 11.6  | 11.7  | 11.8  | 12.0  |
| 8  | Sayur dan Buah      | 68.8  | 71.1  | 73.4  | 75.7  | 78.0  | 80.4  |
| 9  | Lain-lain           | 11.1  | 15.2  | 19.3  | 23.4  | 27.6  | 31.7  |



**SASARAN POLA PANGAN  
HARAPAN KONSUMSI PANGAN  
PENDUDUK**

**BERDASARKAN DATA SURVEY  
SOSIAL EKONOMI NASIONAL**

**KABUPATEN SAROLANGUN**

**KOMPLEKS PERKANTORAN GUNUNG KEMBANG SAROLANGUN**

| No | Kelompok Pangan     | Skor Pola Pangan Harapan |      |      |      |      |      |
|----|---------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|
|    |                     | 2017                     | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1  | Padi-padian         | 25.0                     | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| 2  | Umbi-umbian         | 1.2                      | 1.4  | 1.5  | 1.7  | 1.9  | 2.0  |
| 3  | Pangan Hewani       | 20.4                     | 20.9 | 21.3 | 21.8 | 22.2 | 22.7 |
| 4  | Minyak dan Lemak    | 5.0                      | 5.0  | 5.0  | 5.0  | 5.0  | 5.0  |
| 5  | Buah/Biji Berminyak | 1.0                      | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  |
| 6  | Kacang-kacangan     | 3.9                      | 4.7  | 5.4  | 6.2  | 7.0  | 7.7  |
| 7  | Gula                | 2.5                      | 2.5  | 2.5  | 2.5  | 2.5  | 2.5  |
| 8  | Sayur dan Buah      | 23.3                     | 24.1 | 25.0 | 25.8 | 26.6 | 27.5 |
| 9  | Lain-lain           | -                        | -    | -    | -    | -    | -    |
|    | Total               | 82.3                     | 84.5 | 86.7 | 89.0 | 91.2 | 93.4 |



| No | Kelompok Pangan     | Tingkat Kecukupan Konsumsi Energi (%) |       |       |       |       |       |
|----|---------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                     | 2017                                  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| 1  | Padi-padian         | 65.9                                  | 63.9  | 61.9  | 59.9  | 58.0  | 56.0  |
| 2  | Umbi-umbian         | 2.5                                   | 2.9   | 3.3   | 3.8   | 4.2   | 4.7   |
| 3  | Pangan Hewani       | 10.2                                  | 10.4  | 10.7  | 10.9  | 11.1  | 11.3  |
| 4  | Minyak dan Lemak    | 17.7                                  | 16.7  | 15.8  | 14.8  | 13.9  | 12.9  |
| 5  | Buah/Biji Berminyak | 2.7                                   | 2.7   | 2.8   | 2.8   | 2.8   | 2.9   |
| 6  | Kacang-kacangan     | 2.0                                   | 2.3   | 2.7   | 3.1   | 3.5   | 3.9   |
| 7  | Gula                | 5.6                                   | 5.6   | 5.5   | 5.4   | 5.3   | 5.2   |
| 8  | Sayur dan Buah      | 4.7                                   | 4.8   | 5.0   | 5.2   | 5.3   | 5.5   |
| 9  | Lain-lain           | 0.8                                   | 1.1   | 1.3   | 1.6   | 1.9   | 2.2   |
|    | Total               | 112.0                                 | 110.5 | 109.0 | 107.5 | 106.0 | 104.5 |



| No | Kelompok Pangan     | Rata-Rata Konsumsi Energi (Kkal/Kapita/Hari) |         |         |         |         |         |
|----|---------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|
|    |                     | 2017   | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
| 1  | Padi-padian         | 1,318.3                                      | 1,278.6 | 1,238.8 | 1,199.0 | 1,159.2 | 1,119.4 |
| 2  | Umbi-umbian         | 49.2   | 58.1    | 66.9    | 75.8    | 84.6    | 93.5    |
| 3  | Pangan Hewani       | 204.2  | 208.7   | 213.2   | 217.6   | 222.1   | 226.6   |
| 4  | Minyak dan Lemak    | 354.3  | 335.0   | 315.7   | 296.4   | 277.1   | 257.9   |
| 5  | Buah/Biji Berminyak | 53.7   | 54.5    | 55.3    | 56.1    | 56.9    | 57.6    |
| 6  | Kacang-kacangan     | 39.0   | 46.6    | 54.3    | 61.9    | 69.5    | 77.1    |
| 7  | Gula                | 112.7  | 111.1   | 109.5   | 107.9   | 106.3   | 104.8   |
| 8  | Sayur dan Buah      | 93.1   | 96.5    | 99.8    | 103.2   | 106.6   | 109.9   |
| 9  | Lain-lain           | 15.6   | 21.1    | 26.7    | 32.2    | 37.8    | 43.3    |
|    | Total               | 2,240.2                                      | 2,210.2 | 2,180.1 | 2,150.1 | 2,120.1 | 2,090.1 |





| No | Kelompok Pangan     | Rata-Rata Konsumsi Pangan (Gram/Kapita/Hari) |       |       |       |       |       |
|----|---------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                     | 2017   | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| 1  | Padi-padian         | 331.6  | 329.6 | 327.6 | 325.6 | 323.7 | 321.7 |
| 2  | Umbi-umbian         | 45.8   | 51.3  | 56.8  | 62.3  | 67.8  | 73.3  |
| 3  | Pangan Hewani       | 114.9  | 119.5 | 124.2 | 128.8 | 133.5 | 138.1 |
| 4  | Minyak dan Lemak    | 39.3   | 38.2  | 37.1  | 35.9  | 34.8  | 33.7  |
| 5  | Buah/Biji Berminyak | 10.0   | 10.0  | 10.0  | 10.0  | 10.0  | 10.0  |
| 6  | Kacang-kacangan     | 15.8   | 18.3  | 20.8  | 23.2  | 25.7  | 28.2  |
| 7  | Gula                | 30.9   | 31.3  | 31.7  | 32.1  | 32.5  | 32.8  |
| 8  | Sayur dan Buah      | 188.4  | 194.8 | 201.1 | 207.5 | 213.8 | 220.2 |
| 9  | Lain-lain           | 30.4   | 41.6  | 52.9  | 64.2  | 75.5  | 86.8  |



| No | Kelompok Pangan     | Rata-Rata Konsumsi Pangan (Kg/Kapita/Tahun) |       |       |       |       |       |
|----|---------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |                     | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| 1  | Padi-padian         | 121.0                                       | 120.3 | 119.6 | 118.9 | 118.1 | 117.4 |
| 2  | Umbi-umbian         | 16.7  | 18.7  | 20.7  | 22.7  | 24.7  | 26.7  |
| 3  | Pangan Hewani       | 41.9  | 43.6  | 45.3  | 47.0  | 48.7  | 50.4  |
| 4  | Minyak dan Lemak    | 14.4  | 13.9  | 13.5  | 13.1  | 12.7  | 12.3  |
| 5  | Buah/Biji Berminyak | 3.6   | 3.6   | 3.6   | 3.7   | 3.7   | 3.7   |
| 6  | Kacang-kacangan     | 5.8   | 6.7   | 7.6   | 8.5   | 9.4   | 10.3  |
| 7  | Gula                | 11.3  | 11.4  | 11.6  | 11.7  | 11.8  | 12.0  |
| 8  | Sayur dan Buah      | 68.8  | 71.1  | 73.4  | 75.7  | 78.0  | 80.4  |
| 9  | Lain-lain           | 11.1  | 15.2  | 19.3  | 23.4  | 27.6  | 31.7  |





Realisasi dana dan Program yang mendukung untuk mencapai sasaran **Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Beragam Berbasis Sumberdaya Lokal**, indikatornya adalah :

**1. Tercukupnya Pangan pada Tingkat Rumah Tangga dalam Jumlah, Mutu, Ragam, keamanan, Serta Keterjangkauan Harga**

1. ***Program Peningkatan Ketahanan Pangan*** dengan anggaran Rp. 855.500.000 dan terealisasi sebesar Rp 844.272.600 atau 98,69%. Realisasi keuangan sebesar 98,69% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 121,45% maka terjadi efisiensi pengguna sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

**TABEL 3.17**  
**PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 15**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2019**

| NO  | SASARAN                                  | INDIKATOR KINERJA             | SATUAN    | TAHUN 2019 |           |             | TAHUN 2018 |           |     |
|-----|--|-------------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-----|
|     |  |                               |           | TARGET     | REALISASI | CAPAIAN (%) | TARGET     | REALISASI | %   |
| 15. | Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan | Tingkat Pencemaran Lingkungan | Peringkat | Sedang     | Ringan    | 200         | Sedang     | Ringan    | 200 |

( Sumber data DLH Kab. Sarolangun )

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun tahun 2019 disajikan sebagai berikut:

Untuk Sasaran Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan terdapat satu indikator yaitu:

**3.1.25. *Tingkat Pencemaran Lingkungan***

Dari target yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun dari Indikator Kinerja Utama Tingkat Pencemaran Lingkungan capaiannya melebihi dari target yang telah ditetapkan.



Untuk tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun menetapkan target Tingkat Pencemaran Lingkungan pada skala sedang dapat dilihat pada table pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tingkat Pencemaran Lingkungan yang diukur adalah pencemaran air, dimana status mutu air dihitung berdasarkan Permen LHK Nomor P.78/Menlhk/Setjen/SET.1/2016 dengan mengklasifikasikan mutu air dalam 4 kelas:

1. Memenuhi baku mutu atau kondisi baik pada rentang 0-1
2. Tercemar ringan jika pada rentang 1-5
3. Tercemar sedang jika pada rentang 5-10
4. Tercemar berat jika pada rentang >10

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi pada tahun 2018 dan 2019 sama yaitu sebesar 200%, dari target yang ditetapkan pada peringkat sedang terealisasi pada peringkat ringan sehingga tingkat capaian kinerja yang dihasilkan dua kali lipat.

Hal ini dikarenakan pengawasan terhadap sumber pencemaran dilakukan secara berkala dan optimal sehingga tingkat pencemaran dapat ditekan. Serta diharapkan kedepan pelaku dunia usaha dan masyarakat lebih peka dan peduli lagi terhadap lingkungan agar tingkat pencemaran dapat terus dikurangi.

Realisasi dana dan Program yang mendukung untuk mencapai sasaran

**Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan , indikatornya adalah :**

#### **1. Tingkat Pencemaran Lingkungan**

1. ***Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan*** dengan anggaran Rp. 1.023.423.000 dan terealisasi sebesar Rp 824.717.100 atau 80,58%. Realisasi keuangan sebesar 80,58% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran





sebesar 100% maka terjadi efisiensi pengguna sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

**TABEL 3.18**  
**PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 16**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2019**

| NO  | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA                                    | SATUAN  | TAHUN 2019 |           |             | TAHUN 2018 |           |     |
|-----|---|--|---------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-----|
|     |   |  |         | TARGET     | REALISASI | CAPAIAN (%) | TARGET     | REALISASI | %   |
| 16. | Mempertahankan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Terhadap Perubahan Iklim | Tersedianya Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Dokumen | Ada        | Ada       | 100         | Tidak      | Ada       | 200 |

( Sumber data DLH Kab. Sarolangun)

### 3.1.26. Tersedianya Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Untuk indikator tersedianya dokumen indeks kualitas lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun pada tahun awal RPJMD tidak menetapkan target, namun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun mampu untuk menyusun dokumen indeks kualitas lingkungan hidup. Sehingga indikator tersedianya dokumen indeks kualitas lingkungan hidup tercapai atau sebesar 100%. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di hitung dengan Formulasi sebagai berikut :  $IKLH = (IKA \times 30\%) + (IKU \times 30\%) + (IKTL \times 40\%)$ , dimana ketiga komponen IKLH tersebut adalah merupakan IKU DLH dengan target yang berbeda setiap tahunnya. Berdasarkan perhitungan dengan formulasi tersebut, diperoleh angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup seperti table berikut :



**Tabel 3.18.1**

Target dan Realisasi Capaian Indikator  
Tersedianya Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

| No | Indikator Kinerja Utama          | Tahun 2019 |           |           |
|----|----------------------------------|------------|-----------|-----------|
|    |                                  | Target     | Realisasi | Capaian % |
| 1  | 2                                | 3          | 4         | 5         |
| 1  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 63         | 62        | 98,41%    |

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun pada angka 62 dimana perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berdasarkan rumusan:

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup:  $(IKA30\%)+(IKU30\%)+(ITH40\%)$

Ket: - IKA (Indeks Kualitas Air)

- IKU (Indeks Kualitas Udara)

- ITH (Indeks Tutupan Lahan)

Hasil perhitungan dari tiga indeks di atas maka didapat hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup  $15+27+20=62$

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2019 di angka 62, angka tersebut tidak sesuai dengan target tahun 2019 yaitu 63. Hal ini di pengaruhi oleh penurunan Indeks Kualitas Udara, akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Sarolangun antara bulan September sampai dengan November tahun 2019.

Realisasi dana dan Program yang mendukung untuk mencapai sasaran  
**Mempertahankan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Terhadap Perubahan Iklim , indikatornya adalah :**

**1. Tersedianya Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**



1. **Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH**

dengan anggaran Rp. 614.695.000 dan terealisasi sebesar Rp 526.878.100 atau 85,71%. Realisasi keuangan sebesar 85,71% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100% maka terjadi efesiensi pengguna sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

**SASARAN 17 TABEL 3.19**  
**PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 17**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2019**

| NO  | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA                   | SATUAN    | TAHUN 2019 |            |               | TAHUN 2018 |            |     |
|-----|---|-------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------|------------|------------|-----|
|     |   |                                     |           | TARGET     | REALI SASI | CAPAIAN ( % ) | TARGET     | REALI SASI | %   |
| 17. | Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Pemerintahan yang Baik | Predikat Sakip                      | Peringkat | B          | B          | 100           | CC         | B          | 200 |
|     |   | Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan | Peringkat | WTP        | WTP        | 100           | WTP        | WTP        | 100 |

( Sumber data Bagian Organisasi dan Inspektorat Kab. Sarolangun )

**3.1.27. Predikat Sakip**

Untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 sudah mencapai pada nilai hasil LHE ( Laporan Hasil Evaluasi LAKIP dari Kementrian PAN dan RB Republik Indonesia, untuk tahun 2019 Kabupaten Sarolangun kembali meraih predikat “ **B** “ ( **Baik** ) dengan skor 61,11, dimana pada tahun 2018 sudah meraih predikat “ **B** “ ( **Baik** ) dengan bobot nilai 60,61 dimana pada tahun 2017 nilai LAKIP Kabupaten Sarolangun adalah “ **B** ” ( **Baik** ) dengan skor 60,02. Pada tahun 2019 hanya mengalami peningkatan skor yang belum signifikan. Untuk itu Pemerintahan Kabupaten Sarolangun terus berusaha untuk memperbaiki SAKIP agar bisa meraih predikat “ **BB** ” untuk tahun kedepannya. Dengan melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari SDMnya dan sinkronisasi perencanaan yang lebih baik lagi.



### **3.1.28. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**

Dapat kita lihat dari table diatas bahwasnnya pada tahun 2019 dan 2018 indikator Opini BPK Terhadap laporan keuangan mendapatkan realisasi yang sama atau tetap, Opini BPK mendapatkan wajar tanpa pengecualian ( WTP ) berkat semakin tertibnya pengelolaan keuangan dan asset serta pemantauan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh SKPD, beberapa uapaya telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sarolangun untuk meningkatkan tertib pengelolaan keuangan dan menyelesaikan asset-asset daerah yang bermasalah diantaranya :

1. Dalam melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara parallel bersamaan penyusunan LKPD.
2. Melakukan pendampingan terhadap tim asset daerah untuk melakukan penelusuran asset daerah sesuai dengan dokumen kepemilikan asset daerah.
3. Melakukan pemantauan penyelesaian tindak lanjut realisasi temuan BPK

Pencapaian Indikator ini dilaksanakan dengan program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH,"*Program Pengintesifan Sistem Pedoman Hasil Pengawasan yang Efektif dan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan*" yaitu melalui Kegiatan Pemeriksaan Reguler berdasarkan PKPT, Pemeriksaan Khusus dan kasus pengaduan serta pelaksanaan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Realisasi dana dan Program yang mendukung untuk mencapai sasaran **Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Pemerintahan yang Baik,** indikatornya adalah :

1. Predikat Sakip





## 2. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

1. **Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur ( Penyusunan LAKIP Kabupaten)** dengan anggaran Rp. 250.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 249.720.737 atau 99,9%. Realisasi keuangan sebesar 99,9% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100% maka terjadi efisiensi pengguna sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

1. **Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian KDH**
2. **Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas**
3. **Program Pengintegrasian Sistem Pedoman Hasil Pengawasan yang Efektif** dengan anggaran Rp. 2.237.798.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.105.712.940 atau 94,10%. Realisasi keuangan sebesar 94,10% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100% maka terjadi efisiensi pengguna sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

### SASARAN 17 TABEL 3.20

#### PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 18 PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2019

| NO  | SASARAN  | INDIKATOR KINERJA  | SATUAN | TAHUN 2019 |           |             | TAHUN 2018 |           |       |
|-----|--|--|--------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------|
|     |  |  |        | TARGET     | REALISASI | CAPAIAN (%) | TARGET     | REALISASI | %     |
| 18. | Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas | Tingkat Keselarasan Antara Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Diatasnya | %      | 88,37      | 100       | 113,16      | 86,04      | 90,7      | 105,4 |

(Sumber data BAPPEDA Kab. Sarolangun)

#### 3.1.29. **Tingkat Keselarasan Antara Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Diatasnya.**

Pengukuran kinerja merupakan alat perbandingan antara target dan realisasi dengan memformulasikan Jumlah Renja SKPD yang sesuai dengan



dokumen perencanaan di atasnya dibagi seluruh dokumen Renja SKPD Tahun 2019 atau dengan persentase kesesuaian jumlah dokumen tersebut ditargetkan sebesar 88,37 % terealisasi sebesar 100 % atau 113,16 % dan Jumlah indikator sasaran yang mencapai atau melebihi target dibandingkan dengan seluruh indikator kinerja sasaran dalam RPJMD Tahun 2019 atau dengan persentase kesesuaian jumlah dokumen tersebut ditargetkan sebesar 73,68 % terealisasi sebesar 75 % atau 101,79 %.

Sasaran strategis pengukuran kinerja Bappeda Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 diharapkan dari target yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan baik. Adapun Sasaran strategis tersebut adalah dalam upaya mencapai sasaran strategis Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan, Indikator kinerja yang harus dicapai adalah Jumlah Renja SKPD yang sesuai dengan dokumen perencanaan di atasnya dibagi seluruh dokumen Renja SKPD tahun 2019 adalah sebesar 88,37 %, dan terealisasi sebesar 100 %. Pengukuran capaian kinerja dengan formulasi 42 Renja SKPD yang sesuai dengan dokumen perencanaan di atasnya dari 42 SKPD yang ditargetkan untuk jangka menengah.

Pengukuran Jumlah indikator sasaran yang mencapai atau melebihi target dibandingkan dengan seluruh indikator kinerja sasaran dalam RPJMD tahun 2019 adalah sebesar 73,68 % dan terealisasi sebesar 75 %, dari 27 indikator sasaran yang tercapai atau melebihi target dibandingkan dengan 36 indikator kinerja sasaran dalam RPJMD.



## 2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan dalam rangka melakukan proses perencanaan adalah Penggunaan Sistem Aplikasi E-Planning mulai Tingkat Musrembang Des/Kel, Kecamatan dan Musrembang RKPD Kabupaten, sangat membantu dalam rangka penyelarasan program kegiatan pada Renja SKPD terhadap rencana Strategis SKPD, RKPD dan RPJMD 2017-2022.

Penyebab keberhasilan dalam proses evaluasi adalah Melaksanakan Kegiatan paparan Kepala OPD Kepada Bupati atas laporan pelaksanaan program dan kegiatan terutama terkait dengan realisasi keuangan dan pencapaian kinerja, sehingga pengawasan Internal secara langsung dapat di monitor oleh Kepala Daerah.

Realisasi dana dan Program yang mendukung untuk mencapai sasaran **Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas, indikatornya adalah :**

### 1. Tingkat Keselarasan antara Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan di atasnya

1. **Program Perencanaan Pembangunan Daerah** dengan anggaran Rp. 2.610.304.000 dan terealisasi sebesar Rp. 2.543.493.004 atau 97,44% %. Realisasi keuangan sebesar 97,44% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 113,16% maka terjadi efesiensi pengguna sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



**SASARAN 17 TABEL 3.21**  
**PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 19**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2019**

| NO  | SASARAN   | INDIKATOR KINERJA             | SATUAN | TAHUN 2019 |           |             | TAHUN 2018 |           |    |
|-----|---|-------------------------------|--------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|----|
|     |   |                               |        | TARGET     | REALISASI | CAPAIAN (%) | TARGET     | REALISASI | %  |
| 19. | Meningkatnya Jaminan Kapasitas Hukum dan Perlindungan Hukum | Persentase Penyelesaian Perda | %      | 88         | 78        | 88,6        | 85         | 40        | 47 |

( Sumber data Bagian Hukum Kab. Sarolangun)

### 3.1.30. *Persentase Penyelesaian Perda.*

Pada sasaran meningkatnya jaminan kapasitas hukum dan perlindungan hukum, didalam dokumen RPJMD telah ditargetkan sebesar 85 persen, dan pada tahun 2018 terealisasi sebesar 40 atau dengan capaian sebesar 47, pada tahun 2019 terealisasi sebesar 78 % dengan capain sebesar 88,6 % persen dimana pada tahun 2019 bulan Oktober tanggal 8 dengan nomor 188,342/0652/Hk-HAM/2019 dengan hal, **penyampaian Raperda Propemperda Kab. Sarolangun tahun 2019**, yaitu sebanyak 9 Propemperda, dimana 9 Propemperda ini disusun berdasarkan program yang ada dalam pelaksanaan pemerintah daerah, usulan OPD sesuai dengan kebutuhan yang dimasukkan kedalam Propemperda Kab. Sarolangun.

Dari table diatas dan uraian proses penyampaian propemperda dapat kita simpulkan bahwasannya dari target yang ditentukan, dimana dari 9 dokumen Ranperda yang diusulkan hanya 2 Raperda yang ditunda oleh DPRD karena selama proses pembahasan belum disepakati tentang tarif pajak dan retribusi Dokumen yang disetujui adalah sebagai berikut :

1. Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Sarolangun Tahun 2018.





2. Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019.
3. Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.
4. Raperda Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.
5. Raperda Penambahan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Jambi.
6. Raperda Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Program Bantuan Percepatan Pembangunan Desa / Kelurahan.

Raperda Tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang.

Realisasi dana dan Program yang mendukung untuk mencapai sasaran **Meningkatnya Jaminan Kapasitas Hukum dan Perlindungan Hukum, indikatornya adalah :**

**1. Persentase Penyelesaian Perda**

2. **Program Penataan Peraturan Perundang-undangan** dengan anggaran Rp. 405.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 393.066.000 atau 97,05%. Realisasi keuangan sebesar 97,05% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 88,6% maka tidak terjadi efesiensi pengguna sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



**SASARAN 17 TABEL 3.22**  
**PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 20**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2019**

| NO  | SASARAN  | INDIKATOR KINERJA                                    | SATUAN | TAHUN 2019 |           |             | TAHUN 2018 |           |        |
|-----|--|--|--------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|--------|
|     |  |  |        | TARGET     | REALISASI | CAPAIAN (%) | TARGET     | REALISASI | %      |
| 20. | Meningkatkan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Daerah dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak | Indeks Pembangunan Gender (IPG)                      | %      | 67,07      | 90,70     | 135,2       | 66,67      | 90,44     | 135,65 |
|     |  | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)                     | %      | 61,23      | 57,37     | 93,696      | 60,83      | 80,4      | 132    |
|     |  | Indeks Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak | %      | 42,31      | 100       | 236,35      | 41,02      | 100       | 243,78 |

(Sumber data DP3A & BPS Kab. Sarolangun)

### 3.1.31. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Dapat kita lihat dari table diatas bahwasannya IPG Kabupaten Sarolangun pada tahun 2018 terealisasi sebesar 90,44 % dengan capaian 135,65 % untuk tahun 2019 terealisasi sebesar 90,70 % dengan capaian 135,2 % jika dilihat dari perbandingan target maka IPG ada sedikit penurunan di tahun 2019 walaupun tidak signifikan.

Realisasi dana dan Program yang mendukung untuk mencapai sasaran **Meningkatkan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Daerah dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak**, indikatornya adalah :

#### 1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

1. **Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan** dengan anggaran Rp. 127.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 127.000.000 atau 100%. Realisasi keuangan sebesar 100% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 134,6% maka terjadi efisiensi pengguna sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



### **3.1.32. *indeks Pemberdayaan Gender (IDG)***

Kesetaraan Gender bukan hanya merujuk pada persoalan persamaan Status dan kedudukan saja tetapi bisa bermakna pada persoalan persamaan peran, dalam hal ini seperti partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik maupun penyelenggaraan pemerintah, kehidupan ekonomi dan social khususnya kontribusi perempuan dalam pendapatan rumah tangga. Unsur-unsur persamaan peranan tersebut merupakan komponen yang tercakup dalam penghitungan Indek Pemberdayaan Gender (IDG). Jadi IDG merupakan ukuran indeks komposit yang dapat digunakan untuk mengkaji sejauh mana persamaan peranan perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta kontribusi dalam aspek ekonomi maupun sosial.

Realisasi dana dan Program yang mendukung untuk mencapai sasaran **Meningkatkan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Daerah dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak, indikatornya adalah :**

#### **1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**

##### **1. *Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan***

dengan anggaran Rp. 195.780.000 dan terealisasi sebesar Rp. 195.686.000 atau 99,95%. Realisasi keuangan sebesar 99,95% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 93,69% maka tidak terjadi efesiensi pengguna sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

### **3.1.33. *Indeks Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak***

Pada indikator Indeks Penanganan kasus kekerasan Perempuan dan Anak dapat kita analisisnya sebagai berikut:



- a. Cakupan Perempuan dan Korban Kekerasan, penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu sekitar 95%
- b. Adanya dukungan dan keinginan politisi yang kuat dari Kepala Daerah
- c. Tersedianya Peraturan Perundang-undangan sebagai landasan hukum
- d. Adanya Kelembagaan yang Tugasnya terkait dengan bidang kegiatan yang ditangani
- e. Terbukanya peluang untuk bermitra dengan pihak luar (swasta dan LSM)
- f. Adanya ketentuan yang mewajibkan Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan program/kegiatan yang berpihakan kepada masyarakat termasuk perempuan dan anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 telah menetapkan 40 Kegiatan dari 8 Program Sasaran Strategi sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2017-2022. Dengan rincian realisasi program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Di dalam program ini terdapat 11 ( sebelas ) kegiatan dimana dari sebelas kegiatan tersebut dapat dilaksanakan semua dengan tingkat realisasi 98,74%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Di dalam program ini terdapat 7 ( tujuh ) kegiatan dimana dari tujuh kegiatan tersebut dapat dilaksanakan semua dengan tingkat realisasi 82,04%.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Di dalam program ini terdapat 1 ( Satu ) kegiatan dimana dari satu kegiatan tersebut dapat dilaksanakan semua dengan tingkat realisasi 100%.





4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Di dalam program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dimana dari Satu kegiatan tersebut dapat dilaksanakan semua dengan tingkat realisasi 100%.

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Promosi Daerah

Di dalam program ini terdapat 2 ( Dua) kegiatan dimana dari enam kegiatan tersebut dapat dilaksanakan semua dengan tingkat realisasi 100 %

6. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Di dalam program ini terdapat 8 ( delapan ) kegiatan dimana dari delapan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan semua dengan tingkat realisasi 99,95 %.

7. Program Penguatan Kelembagaan Pengurustamaan Gender dan Anak

Di dalam program ini terdapat 7 ( tujuh ) kegiatan dimana dari tujuh kegiatan tersebut dapat dilaksanakan semua dengan tingkat realisasi 99,95 %.

8. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Di dalam program ini terdapat 3 ( tiga ) kegiatan dimana dari tiga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan semua dengan tingkat realisasi 100 %.

Raperda Tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang.

Realisasi dana dan Program yang mendukung untuk mencapai sasaran

**Meningkatkan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Daerah dan**

**Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak, indikatornya adalah :**

**2. Indeks Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak**



## 2. *Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak*

dengan anggaran Rp. 267.020.000 dan terealisasi sebesar Rp. 265.811.250 atau 99,55%. Realisasi keuangan sebesar 99,55% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 236,35% maka terjadi efesiensi pengguna sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

### **SASARAN 17 TABEL 3.23** **PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 21** **PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2019**

| NO  | SASARAN                                | INDIKATOR KINERJA                                    | SATUAN | TAHUN 2019 |            |               | TAHUN 2018 |            |        |
|-----|--|--|--------|------------|------------|---------------|------------|------------|--------|
|     |  |  |        | TAR GET    | REALI SASI | CAPAIAN ( % ) | TAR GET    | REALI SASI | %      |
| 21. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Perizinan    | Nilai  | 81,70      | 86,23      | 106           | 80,20      | 83,66      | 104,31 |
|     |  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan    | Nilai  | 77,30      | 77,89      | 100,76        | 75,80      | 77,84      | 102,69 |
|     |  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kependudukan | Nilai  | 78,00      | 76,63      | 98,24         | 76,50      | 76,542     | 100,05 |

(Sumber data DPMPTSP, DINKES, DIS DUKCAPIL )

#### 3.1.34. *Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan*

Pada Sasaran Kedua, kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat, dengan indikator persentase Survey Indeks Kepuasan Masyarakat yang meningkat, dilakukan dengan memberikan kertas Kusisioner kepada masyarakat yang akan mengurus izin. Jumlah izin yang diterbitkan pada tahun 2019 sebanyak 1.824 izin dan nilai hasil capaian IKM sebesar : 86, 23 % untuk tahun 2018 capaian yang terealisasi sebesar 83,36. Artinya dari tahun 2018 ke tahun 2019 ada peningkatan dalam Bidang Pelayanan.



Hal yang mendukung pencapaian pelayanan perizinan tersebut adalah adanya aplikasi OSS (Online Single Submission). Melalui aplikasi ini, pemohon perizinan SIUP dan TDP bisa langsung mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan berusaha tanpa harus memenuhi komitmen. Meskipun untuk perizinan yang lain masih dilakukan secara manual (sebagai syarat pemenuhan komitmen pada aplikasi OSS).

Realisasi dana dan Program yang mendukung untuk mencapai sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, indikatornya adalah :**

#### **1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Perizinan**

1. ***Program Optimalisasi Pemanfaatan TIK***
2. ***Program Standarisasi Pelayanan Publik***
3. ***Program Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah***
4. ***Program Khusus Pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis***

dengan anggaran Rp. 345.500.000 dan terealisasi sebesar Rp. 344.425.504 atau 99,7%. Realisasi keuangan sebesar 99,7% dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 106% maka terjadi efisiensi pengguna sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

#### **3.1.35. Indeks Kepuasan Dinas Kesehatan**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai indikator untuk melihat kualitas pelayanan publik yang merupakan tujuan akhir dari reformasi birokrasi. Untuk capaian indikator IKM tahun 2018 telah mencapai target dengan realisasi sebesar 77,84% dengan capaian sebesar 102,69 %, dan pada tahun 2019 terealisasi sebesar 77,89 % dengan capaian 100,76 %. Faktor yang mendorong tercapainya IKM adalah karena semua indikator yang dilakukan survey nilainya



adalah baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di puskesmas sudah baik.

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan dari segi ketercapaian indikator kinerja ini sudah melampaui target yang ditetapkan. Faktor yang mendorong tercapainya indikator ini karena dari 9 unsur indikator survei kepuasan masyarakat nilainya baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan di puskesmas kategori baik karena berada dalam nilai interval konversi IKM 76.61 - 88.30. untuk nilai masing-masing unsur dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.23.1**  
**Nilai Unsur dan Nilai Rata-rata IKM Unit Pelayanan Puskesmas**  
**Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun Tahun 2019**

| No                                | Unsur IKM                              | Nilai Unsur IKM | Nilai Rata-rata unsur IKM | Nilai Indeks Unit Pelayanan |
|-----------------------------------|--|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1.                                | Persyaratan                            | 1883            | 3.192                     | 0.351                       |
| 2.                                | Sistem, mekanisme dan prosedur         | 1786            | 3.027                     | 0.333                       |
| 3.                                | Waktu penyelesaian                     | 1753            | 2.971                     | 0.327                       |
| 4.                                | Biaya/Tarif                            | 2354            | 3.990                     | 0.439                       |
| 5.                                | Produk spesifikasi jenis pelayanan     | 1765            | 2.992                     | 0.329                       |
| 6.                                | Kompetensi pelaksana                   | 1872            | 3.173                     | 0.349                       |
| 7.                                | Perilaku pelaksana                     | 1753            | 2.971                     | 0.327                       |
| 8.                                | Penanganan pengaduan saran dan masukan | 1763            | 2.988                     | 0.329                       |
| 9.                                | Sarana dan prasarana                   | 1781            | 3.019                     | 0.332                       |
| Jumlah NRR tertimbang per unsur   |  |                 |                           | 3.115                       |
| Nilai IKM unit pelayanan=3.094x25 |  |                 |                           | 77.89                       |

Adapun rincian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2019 seluruh puskesmas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.23.2**  
**Nilai IKM Puskesmas**  
**Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun Tahun 2019**

| No | Nama Puskesmas    | Nilai IKM | Mutu | Kinerja     | Rangking |
|----|-------------------|-----------|------|-------------|----------|
| 1  | Sepintun          | 71.04     | C    | Kurang Baik | 15       |
| 2  | Butang Baru       | 77.12     | B    | Baik        | 10       |
| 3  | Batang Asai       | 75.68     | C    | Kurang Baik | 14       |
| 4  | Mersip            | 77.92     | B    | Baik        | 7        |
| 5  | Pulau Pandan      | 81.93     | B    | Baik        | 2        |
| 6  | Cermin Nan Gedang | 83.89     | B    | Baik        | 1        |
| 7  | Air Hitam         | 77.00     | B    | Baik        | 13       |





|    |                |       |   |      |    |
|----|----------------|-------|---|------|----|
| 8  | Sarolangun     | 78.14 | B | Baik | 5  |
| 9  | Limbur Tembesi | 77.10 | B | Baik | 12 |
| 10 | Sungai Baung   | 78.07 | B | Baik | 6  |
| 11 | Singkut V      | 77.18 | B | Baik | 9  |
| 12 | Pauh           | 76.77 | B | Baik | 11 |
| 13 | Mandiingin     | 77.12 | B | Baik | 10 |
| 14 | Pelawan        | 77.84 | B | Baik | 8  |
| 15 | Pematang Kabau | 79.06 | B | Baik | 3  |
| 16 | Singkut        | 78.54 | B | Baik | 4  |

Realisasi dana dan Program yang mendukung untuk mencapai sasaran

**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, indikatornya adalah :**

**1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan**

**1. *Program Pelayanan Kesehatan Primer***

dengan anggaran Rp. 16.686.220.065 dan terealisasi sebesar Rp. 13.087.897.595 atau 78,44%. Realisasi keuangan sebesar 78,44 dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,76% maka terjadi efesiensi pengguna sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.

**3.1.36. *Indeks Kepuasan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil***

**Tabel Nilai Unsur Pelayanan Pada Unit Pelayanan  
Dinas Dukcapil Kab Sarolangun**

| NO | UNSUR PELAYANAN    | NILAI<br>UNSUR<br>PELAYANAN | KINERJA     |
|----|--------------------|-----------------------------|-------------|
| 1  | 2                  | 3                           | 4           |
| 1  | PERSYARATAN        | 79,27                       | BAIK        |
| 2  | MEKANISME PROSEDUR | 73,66                       | KURANG BAIK |
| 3  | WAKTU PENYELESAIAN | 73,90                       | KURANG BAIK |
| 4  | BIAYA/ TARIF       | 74,33                       | KURANG BAIK |
| 5  | JENIS PELAYANAN    | 79,82                       | BAIK        |
| 6  | KOMPETESI PETUGAS  | 80,55                       | BAIK        |
| 7  | PERILAKU PETUGAS   | 74,33                       | KURANG BAIK |



|   |                                  |       |             |
|---|----------------------------------|-------|-------------|
| 8 | PENANGANAN<br>PENGADADUAN        | 73,54 | KURANG BAIK |
| 9 | SARANA PRASARANA                 | 87,26 | BAIK        |
|   | <b>INDEK KEPUASAN MASYARAKAT</b> |       | <b>BAIK</b> |

(Sumber : Hasil Survei)

Untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun maka dilakukan penjumlahan dari nilai rata-rata 9 unsur yang diamati dikalikan dengan angka penimbang yang sama yaitu 0.11 Hasil perhitungan seperti terlihat pada Tabel diatas menunjukan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun adalah sebesar **3,065**. Dari hasil perhitungan ini maka dapat disimpulkan bahwa nilai IKM setelah di konversi adalah sebesar **76,63** dengan mutu pelayanan pada **level B**. Ini berarti, kinerja unit pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun **Kategori Baik**.

Realisasi dana dan Program yang mendukung untuk mencapai sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, indikatornya adalah :**

#### **1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kependudukan**

##### **1. *Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik***

dengan anggaran Rp. 90.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 86.108.000 atau 95,68%. Realisasi keuangan sebesar 95,68 dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 98,24% maka terjadi efesiensi pengguna sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut.



### 3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja. Dalam penyusunan menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja. Dalam penyusunan teknis anggaran berbasisi kinerja tahun 2019 digunakan rencana strategi yaitu RPJMD yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD).

Keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menjalankan fungsi atau kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini karena hampir tidak ada program atau kegiatan pemerintah yang tidak membutuhkan pendanaan yang bersumber dari keuangan daerah. Semakin besar jumlah dana yang tersedia semakin banyak pula kemungkinan program atau kegiatan pemerintah yang dapat dilaksanakan. Fakta dan Permasalahan dari Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Penerimaan PAD kabupaten/kota di Provinsi Jambi masih tergantung pada penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan PAD lainnya yang sah.
2. Secara umum Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada awal tahun pelaksanaan RPJMD mengalami peningkatan, akan tetapi apabila dibandingkan dengan penerimaan dari dana perimbangan masih lebih kecil. Kondisi ini mengindikasikan tingkat ketergantungan daerah ini terhadap pemerintah pusat setiap tahunnya mengalami penurunan secara persentase, akan tetapi secara nominal bantuan yang diterima kabupaten/kota di Provinsi Jambi terus meningkat dalam jumlah yang cukup besar.



3. Pembiayaan daerah ini masih mengharapkan dari pemerintah pusat, karena objek pajak yang ada di kabupaten/kota di Provinsi sangat terbatas sebagai sumber pendapatan daerah, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi pajak dan retribusi daerah yang ada.

### **3.2.1. Komposisi APBD Kabupaten Sarolangun Tahun 2016-2019.**

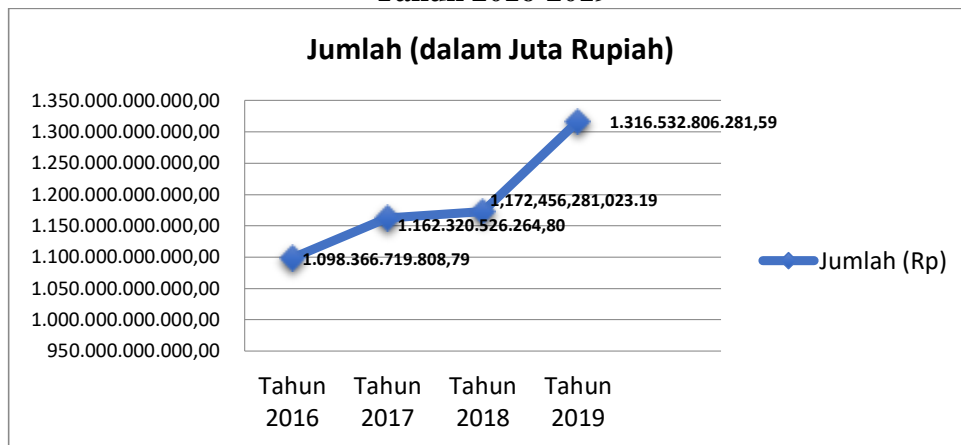
Pengelolaan keuangan daerah secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu manajemen penerimaan dan manajemen pengeluaran daerah. Kedua komponen tersebut sangat menentukan kedudukan suatu Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan otonomi daerah. Pengelolaan keuangan kabupaten Sarolangun periode tahun 2016 - 2019 telah dilaksanakan dengan cukup baik. Kondisi ini ditandai semakin meningkatnya pendapatan daerah kabupaten Sarolangun dari tahun 2016 sampai tahun 2019 terus mengalami peningkatan .

Porsi belanja juga semakin meningkat setiap tahunnya, walaupun setiap tahun APBD Kabupaten Sarolangun mengalami defisit, tetapi masih bisa ditutup dengan pembiayaan pada tahun bersangkutan. Struktur APBD terdiri dari 3 komponen yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Adapun perkembangan Pendapatan Daerah kabupaten Sarolangun dapat disajikan pada Grafik berikut:





**Grafik 3.1.**  
**Pendapatan Daerah Kab. Sarolangun**  
**Tahun 2016-2019**



*Sumber : BPKAD Kab. Sarolangun*

Dari Grafik 3.1. diatas dapat dilihat bahwa pendapatan daerah Kab. Sarolangun tahun 2016-2018 terus mengalami peningkatan. Komponen pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Peningkatan pendapatan daerah ini dikarenakan adanya peningkatan dari komponen pendapatan asli daerah (PAD) dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk komponen pendapatan asli daerah, pada tahun 2016 jumlah PAD kabupaten Sarolangun sebesar Rp 64.282.000.246,79 mengalami peningkatan sebesar 17,40 persen menjadi Rp 75.468.864.272,80 tahun 2017. Pada tahun 2018, PAD Kabupaten Sarolangun sebesar Rp 99.780.471.647,00 mengalami peningkatan sebesar 32,21 persen dari tahun 2017. Pada tahun 2019, PAD Kabupaten Sarolangun Sebesar Rp.120.666.900.482.59 mengalami peningkatan sebesar 20,93 persen dari tahun 2018.

Untuk komponen pendapatan daerah lainnya yaitu Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alakasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi



Khusus (DAK) pada tahun 2016 sebesar Rp.874.342.327.800,00 mengalami peningkatan sebesar 0,70 persen, pada tahun 2017 menjadi Rp.880.523.100.010,00, pada tahun 2018 Dana Perimbangan Kabupaten Sarolangun sebesar Rp 866.560.614.394,00 mengalami penurunan sebesar 0,16 persen dari tahun 2017 dan pada tahun 2019 Dana Perimbangan Kabupaten Sarolangun sebesar Rp. 962.068.366.817,00 mengalami peningkatan sebesar 11,02 persen dari tahun 2018.

Sedangkan untuk komponen Lain-lain pendapatan daerah yang sah, pada tahun 2016 sebesar Rp 125.763.490.982,00 mengalami peningkatan sebesar 72,01 persen pada tahun 2017 menjadi Rp 206.328.561.982,00, pada tahun 2019 meningkat menjadi 233.797.538.982,00 dengan peningkatan persentase 13.31 persen. Hal ini dikarenakan adanya transfer Dana Desa dari pemerintah Pusat yang telah diamanahkan oleh UU Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

### **3.2.2. Komposisi PAD Kabupaten Sarolangun Tahun 2014-2019.**

Penerimaan daerah berupa PAD harus dipicu pertumbuhannya secara terus-menerus, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun harus juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam menyelenggarakan urusan daerah.

**Tabel 3.23.5**  
**Komposisi PAD Kabupaten Sarolangun (juta rupiah)**  
**Tahun 2014-2019.**

| No | Jenis Penerimaan       | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 |
|----|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1  | Pajak Daerah           | 8,678      | 10,287     | 33,453     | 11,044     | 16,204     | 36.787     |
| 2  | Retribusi Daerah       | 4,252      | 3,234      | 2,982      | 2,432      | 2,535      | 3.758      |
| 3  | HPKDYd                 | 3,806      | 2,713      | 3,673      | 3,673      | 11,721     | 11.721     |
| 4  | Lain-lain PAD Yang Sah | 17,686     | 27,836     | 52,632     | 58,319     | 69,320     | 68.400     |
|    | Jumlah                 | 34,422     | 44,070     | 92,740     | 75,468     | 99,780     | 120.666    |

Sumber : BPKAD Kabupaten Sarolangun.



Dari table 3.23.5 diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara keseluruhan. Komponen PAD terdiri dari 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. HPKDyd dan 4. Lain-lain PAD Yang Sah. Peningkatan Pajak Daerah ini disebabkan adanya peningkatan Target Penerimaan Pajak Daerah dari tahun sebelumnya, pada tahun 2016 Pajak Daerah sebesar Rp.33.453.454.904,00, lonjakan penerimaan ini dikarenakan adanya penerimaan dari BPHTB. Pada tahun 2017 Pajak Daerah kembali mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar Rp.11.044.100.000,00 dan pada tahun 2018 kembali mengalami kenaikan sebesar Rp.16.204.100.000,00 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan secara signifikan yaitu sebesar Rp. 36.787.000.000,00.

Retribusi Daerah justru mengalami penurunan target penerimaan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 sebesar Rp.2.990.810.000,00 tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 22,94 persen menjadi sebesar Rp.2.432.200.000,00 hal ini dikarenakan adanya tidak tercapainya target-target Retribusi dari tahun 2016 yang berimplikasi pada penurunan target Retribusi tahun 2017. Pada tahun 2018 ada kenaikan target dari tahun 2017 yaitu sebesar Rp.2.535.541.000,00 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.758.341000,00.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai tahun 2018 kecuali tahun 2015 yaitu sebesar Rp.2.712.169.311, hal ini dikarenakan adanya penurunan pembagian laba keuangan dari lembaga keuangan, pada tahun 2016 HPKDyd sebesar Rp. 3.673.073.042,80 atau mengalami peningkatan sebesar 35,43 persen atau sebesar Rp. 3.673.073.042,80 pada tahun 2017. Pada tahun 2018 adanya peningkatan



penerimaan dari HPK Dyd sebesar Rp. 11.721.339.417,19 atau terjadi kenaikan sebesar 219,11 persen.

Lain-lain PAD yang Sah mengalami peningkatan penerimaan dari tahun ke tahun dan pada tahun 2016 penerimaan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp. 52.632.007.590,00 atau mengalami peningkatan sebesar 10,81 persen atau sebesar Rp. 58.319.491.230,00 pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp. 69.319.491.230,00 atau terjadi kenaikan sebesar 15,87 persen dan pada tahun 2019 sedikit mengalami penurunan sebesar Rp. 68.400.200.650,00 dengan persentase sebesar 1,34 persen.

### 3.2.3. Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 s.d. 2019

Selain PAD, Dana Perimbangan juga merupakan sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Dana Perimbangan berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dana Perimbangan terdiri dari DBH, DAU dan DAK. Tabel 3.23.7 berikut ini menyajikan komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Sarolangun Jambi Tahun 2014 s.d. 2018.

**Tabel. Tabel 3.23.6**  
**Komposisi Dana Perimbangan**  
**Kabupaten Sarolangun (juta rupiah)**  
**Tahun 2014-2019**

| No | Jenis Penerimaan | 2014    | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | Jumlah   | %  |
|----|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----|
| 1  | Dana Bagi Hasil  | 162,502 | 164,198 | 91,065  | 100,806 | 83,818  | 141,569 | 743,958  | 59 |
| 2  | DAU              | 521,591 | 517,687 | 587,491 | 588,319 | 583,152 | 599,555 | 3.397,80 | 97 |
| 3  | DAK              | 47,315  | 56,644  | 195,785 | 191,396 | 199,59  | 220,943 | 911,673  | 90 |
|    | Jumlah           | 733,422 | 740,544 | 874,342 | 880,523 | 866,56  | 962,067 | 5.057,46 |    |

Sumber : BPKAD Kabupaten Sarolangun

Penerimaan dana perimbangan Kabupaten Sarolangun paling besar dari DAU yaitu sebesar 97 persen, DAK sebesar 90 persen dan yang paling rendah





DBH hanya sebesar 59 persen. Besarnya alokasi DAU untuk daerah bertujuan untuk membiayai kewenangan pelimpahan penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mengatasi ketimpangan antar daerah. Besar dan kecilnya DBH yang diterima Pemerintah Kabupaten Sarolangun, disebabkan pengalokasian DBH untuk daerah-daerah berdasarkan daerah penghasil dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi adanya daerah penghasil dari sumber kekayaan alam yang ada di Provinsi Jambi. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

#### **3.2.4. Komposisi Belanja Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 s.d. 2019.**

Belanja daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah daerah. Semakin besar belanja daerah diharapkan akan semakin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah. Komposisi Belanja Kabupaten Sarolangun tahun 2014 s.d. 2019 dapat dilihat pada :

**Tabel. Tabel 3.23.7**  
**Komposisi Belanja Kabupaten Sarolangun**  
**Tahun 2014 s.d. 2019.**

| No | Jenis Belanja        | Tahun 2014 | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 |
|----|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1  | Belanja langsung     | 413,322    | 483,975    | 589,84     | 636,588    | 540,581    | 849,447    |
| 2  | Belanja Tak Langsung | 498,021    | 484,243    | 549,292    | 540,581    | 636,588    | 687,451    |
|    | Jumlah               | 911,343    | 968,218    | 1,139,132  | 1,177,169  | 1,177,169  | 1,536,899  |

*Sumber : BPKAD Kabupaten Sarolangun*

Tabel 3.23.7. di atas dapat kita lihat bahwa belanja langsung mengalami peningkatan setiap tahunnya begitu juga belanja tidak langsung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa belanja Pemerintah Kabupaten Sarolangun masih didominasi untuk belanja operasional (belanja



pegawai dan belanja barang jasa) dan mengalokasikan sebagian besar penerimaan daerah untuk membiayai operasional pemerintah daerah, khususnya untuk belanja pegawai. Oleh sebab itu baiknya belanja langsung dapat dikurangi pembelanjannya karena banyak terserap untuk belanja pegawai. Sedangkan belanja tidak langsung adanya belanja modal yang merupakan komponen belanja yang lebih banyak dan memiliki pengaruh langsung terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah kepada masyarakat, seperti penyediaan infrastruktur pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.

### **3.2.5. Kesehatan Keuangan Daerah**

Kesehatan keuangan daerah menjadi satu faktor yang sangat penting dalam mendorong terciptanya suatu harmonisasi pembangunan Daerah. Fungsi keuangan daerah dalam hal ini dapat diibaratkan sebagai indikator penting yang senantiasa memberikan kehidupan bagi sektor-sektor ekonomi dan pembangunan daerah guna aktualisasi produktivitas daerah secara keseluruhan. Adapun indikator keuangan daerah dapat dianalisis salah satunya melalui analisis Kapasitas Fiskal Daerah dan Analisis Ruang Fiskal Daerah.

### **3.2.6. Analisis Kapasitas Fiskal Daerah**

Kapasitas Fiskal adalah kemampuan keuangan suatu daerah yang dicerminkan melalui Penerimaan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan yang dikaitkan dengan Belanja Pegawai dan Jumlah Penduduk miskin.



$$\text{Kapasitas Fiskal Daerah} = \frac{(PAD + DBH + DAU + PL) - BP}{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}$$

Keterangan :

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DBH : Dana Bagi Hasil

DAU : Dana Alokasi Umum

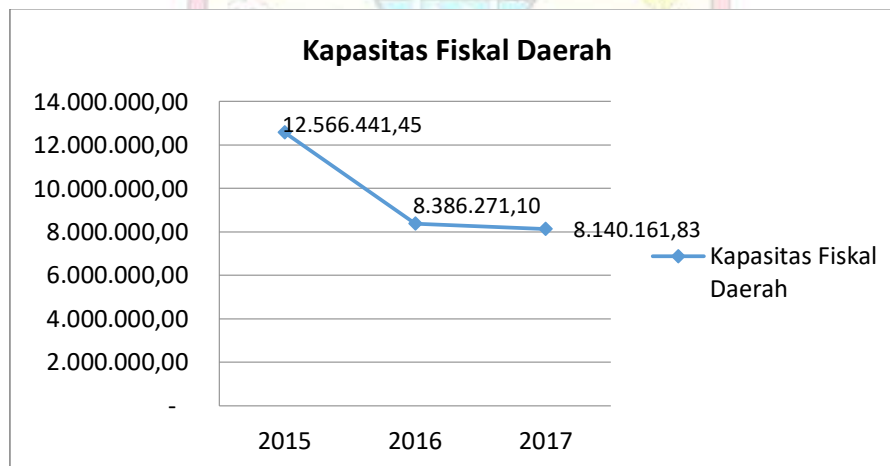
PL : Penerimaan Lain-Lain yang Sah kecuali DAK, Dana Darurat,

Dana Pinjaman lama dan Penerimaan.

BP : Belanja Pegawai

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bagaimana perkembangan kapasitas fiskal daerah Kabupaten Sarolangun sebagai berikut :

**Grafik Tabel 3.2.**  
**Perkembangan Fiskal Daerah Kabupaten Sarolangun**  
**Tahun 2015-2017**



Selama periode tahun 2015-2017, kapasitas fiskal Kabupaten Sarolangun terus mengalami penurunan. Ini bermakna terjadi penurunan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam kerangka menjalankan agenda-agenda pemerintahan dan pembangunan daerah. Penurunan ini terjadi dikarenakan terjadinya Penurunan Pendapatan Asli Daerah Kab. Sarolangun.



### 3.2.7. Analisis Ruang Fiskal Daerah

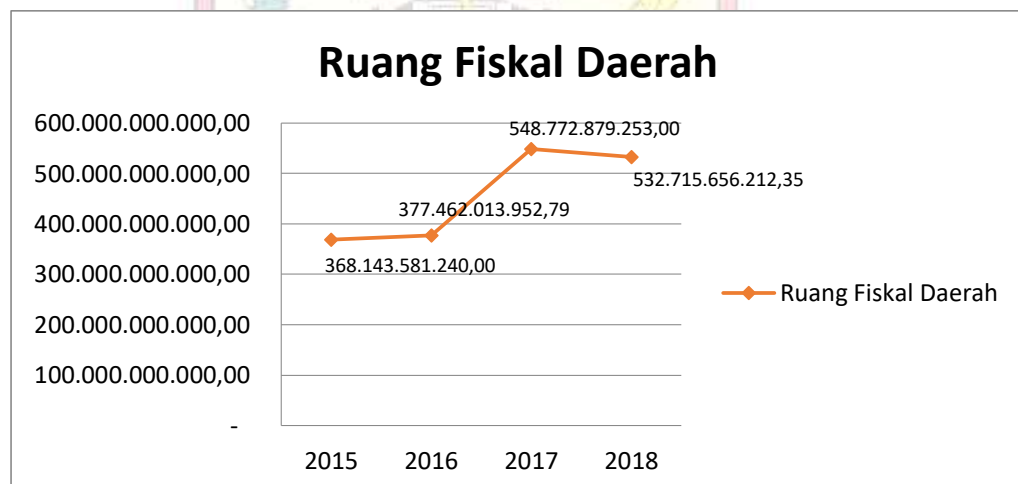
Indikator Ruang Fiskal menunjukkan jumlah dana netto yang masih bisa digunakan oleh Pemerintah Daerah setelah pendapatan nonearmarked dikurangkan dengan belanja pegawai tidak langsung.

$$\text{Ruang Fiskal Daerah} = \text{Total Pendapatan} - (\text{DAK} + \text{Pendapatan Hibah} + \text{Dana Darurat} + \text{Dana Penyesuaian Otsus}) -$$

*Belanja Pegawai Tidak Langsung.*

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui pula bagaimana kondisi ruang fiskal daerah Kabupaten Sarolangun, sebagaimana berikut :

**Grafik Tabel 3.3.**  
**Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Sarolangun**  
**Tahun 2015-2017**



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa, selama periode tahun 2015-2017, ruang fiskal Kabupaten Sarolangun terus mengalami peningkatan. Ini bermakna semakin longgarnya keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam kerangka menjalankan agenda-agenda pemerintahan dan pembangunan





daerah. Peningkatan terjadi signifikan pada tahun 2017, hal ini dikarenakan tidak adanya pendapatan yang diperoleh Kabupaten Sarolangun yang bersumber dari Dana Penyesuaian/Oto

Anggaran Pendapatan dan Realisasi belanja dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2018, adalah sebagai berikut:

---

### **3.3. PENDAPATAN**

---

Dengan berpedoman kepada aturan yang ada, maka bagian pendapatan daerah telah dicantumkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 tahun 2018 Kabupaten Sarolangun Tahun 2019.

Pada tahun anggaran 2019, pendapatan Kabupaten Sarolangun sebesar Rp. **1.316.532.806.281,59** yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. **120.666.900.482,59** Dana Perimbangan Sebesar Rp. **962.068.366.817,00** Lain-Lain PAD yang sah Rp. **233.797.538.982,00** Sampai akhir tanggal 31 desember 2019 pendapatan Kabupaten Sarolangun terealisasi sebesar Rp. **1.318.666.364.825,73** atau 101,16%. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp. **97.870.224.380,58** atau 81,11 %, kemudian Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp. **972.212.674.454,00** atau 101,05%.



## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bahan pertanggungjawaban, LKj Pemerintah Kabupaten Sarolangun merupakan sarana evaluasi dan perbaikan diri bagi seluruh Unit Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang.

Pemerintah Kabupaten Sarolangun, sebagaimana tercermin dalam Visinya mewujudkan **“SAROLANGUN LEBIH SEJAHTERA”** dalam RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022 telah menetapkan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam rentang satu tahun anggaran, dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana amanat Perpres Nomor 29 tahun 2014, dan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Sarolangun tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal.



Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja.

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir. Selain itu, pencapaian indikator sasaran belum maksimal dicapai pada tahun kedua, hal ini disebabkan karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu pelaksanaan, sehingga diharapkan pencapaian indikator sasaran yang maksimal dapat dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.





## PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN **INSPEKTORAT**

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Telp. (0745) 9270687  
**SAROLANGUN**

### PERNYATAAN TELAH DIREVIU

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN  
TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Sarolangun, 19 Maret 2019.

**INSPEKTUR KABUPATEN SAROLANGUN**



*[Signature]*  
**Drs. H. MUSLIHADI, M.Pd**  
Rembina Utama Muda  
NIP. 19651231 199203 1 091



Dipindai dengan CamScanner